



**UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA**

**PERAN SATUAN TUGAS PENERANGAN TNI  
DALAM MEMBERIKAN INFORMASI YANG BERKUALITAS  
PADA TANGGAP DARURAT BENCANA  
LETUSAN GUNUNG MERAPI 2010**

TESIS

**HONDOR SARAGIH  
1 2011 02 03 0101**

SEKOLAH PASCASARJANA STUDI KEAMANAN  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BENCANA

JAKARTA  
JANUARI 2013



**UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA**

**PERAN SATUAN TUGAS PENERANGAN TNI  
DALAM MEMBERIKAN INFORMASI YANG BERKUALITAS  
PADA TANGGAP DARURAT BENCANA  
LETUSAN GUNUNG MERAPI 2010**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan

**HONDOR SARAGIH  
1 2011 02 03 0101**

**SEKOLAH PASCASARJANA STUDI KEAMANAN  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BENCANA**

**JAKARTA  
JANUARI 2013**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Hondor Saragih  
NPM : 1 2011 02 03 010  
Program Studi : Manajemen Bencana untuk Keamanan Nasional  
JudulTesis : Peran Satuan Tugas Penerangan TNI Dalam Memberikan Informasi Yang Berkualitas Pada Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi 2010

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Manajemen Bencana untuk Keamanan Nasional (*Disaster Management for National Security*) Sekolah Pascasarjana Studi Keamanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Dr. Yudi Rusfiana ( )  
Pembimbing 2 : Ir. Sugeng Triutomo, DESS ( )  
Pembimbing 3 : Mayjen TNI (Purn)  
Ir. Ricardo MH Siagian, MT, M.Sc ( )  
Penguji 1 : Brigjen TNI Herman, M.Si (Han) ( )  
Penguji 2 : Dr. Herlina JR Saragih, M.Si ( )  
Penguji 3 : Kolonel Sus Drs. Khaerudin, MM ( )  
Ditetapkan di : JAKARTA  
Tanggal : Januari 2013

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frase, kalimat, paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku

Jakarta, 7 Januari 2013

Hondor Saragih

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hondor Saragih  
NPM : 1 2011 02 03 010  
Program Studi : Manajemen Bencana untuk Keamanan Nasional  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERAN SATUAN TUGAS PENERANGAN TNI  
DALAM MEMBERIKAN INFORMASI YANG BERKUALITAS PADA  
TANGGAP DARURAT BENCANA  
LETUSAN GUNUNG MERAPI 2010**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 7 Januari 2013

Hondor Saragih

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyandang gelar Magister Manajemen Bencana untuk Keamanan Nasional dalam bidang Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tidak mudah bagi saya untuk merampungkan tesis ini. Oleh sebab itu, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Yudi Rusfiana, Bapak Ir. Sugeng Triutomo, DESS, Bapak Mayjen TNI (Purn) Ricardo MH Siagian, MT, M.Sc dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Para penguji Bapak Brigjen TNI Herman, M.Si (Han), Ibu Dr. Herlina JR Saragih, M.Si, Bapak Kolonel Sus Drs. Khaerudin, MM;
3. Pusat Penerangan (Puspen) TNI yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan untuk penelitian ini;
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan untuk penelitian ini;
5. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan untuk penelitian ini;
6. Para informan yang telah menyediakan waktu untuk diwawancara sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang mendukung penelitian ini;
7. Ketua Program Studi Manajemen Bencana beserta staf yang telah memberikan bantuannya;
8. Rekan-rekan seangkatan Program Studi Manajemen Bencana atas

kebersamaan, keceriaan, dukungan dan bantuan yang diberikan selama ini;

9. Istriku dan anak-anakku yang selalu menyemangati saya, terlebih dalam masa-masa akhir pembuatan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Jakarta, 7 Januari 2013

Hondor Saragih

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian .....	8
<b>2 TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
2.1 Tinjauan Pustaka .....	9
2.1.1 Bencana Letusan Gunung .....	9
2.1.1.1 Definisi Bencana .....	9
2.1.1.2 Bencana dan Bahaya .....	10
2.1.1.3 Bahaya Letusan Gunung .....	12
2.1.1.4 Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung .....	14
2.1.2 Informasi .....	14
2.1.2.1 Definisi Informasi .....	14
2.1.2.2 Ketahanan Informasi .....	15
2.1.2.3 <i>Public Relations</i> .....	16
2.1.2.4 Kualitas Informasi .....	17
2.1.2.4.1 Perspektif Normatif .....	17

2.1.2.4.2	Perspektif Media Massa .....	22
2.1.3	Media Massa .....	23
2.1.3.1	Pembingkaiian (Framing) Media Massa .....	23
2.1.3.2	Media Massa dan Berita Bencana .....	24
2.1.4	Peran Militer dalam Penanggulangan Bencana .....	26
2.1.4.1	OMSP dalam Penanggulangan Bencana .....	26
2.1.4.2	Strategi Komunikasi Public Relations Militer dalam Penanggulangan Bencana .....	27
2.2	Kerangka Pemikiran .....	29
<b>3</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1	Sumber Data/Subjek/Objek Penelitian .....	31
3.1.1	Sumber Data .....	31
3.1.2	Subjek Penelitian .....	31
3.1.3	Objek Penelitian .....	31
3.2	Desain Penelitian .....	31
3.2.1	Tipe Penelitian .....	31
3.2.2	Konteks Penelitian .....	32
3.3	Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.4	Lokasi Penelitian .....	36
3.5	Teknik Analisa Data .....	36
3.6	Diagram Alir Prosedur Kerja Penelitian .....	40
<b>4</b>	<b>ANALISA DATA DAN HASIL PENELITIAN</b>	
4.1	Satgas TNI PB dan Satgaspen TNI PB Gunung Merapi .....	41
4.1.1	Satgas TNI PB Gunung Merapi .....	41
4.1.2	Satgaspen TNI PB Gunung Merapi .....	43
4.2	Kualitas Informasi yang Dihasilkan Satgaspen TNI .....	47
4.2.1	Menurut Personil Satgaspen TNI .....	47
4.2.2	Menurut Personil Puspen TNI .....	58
4.2.3	Menurut Pakar <i>Public Relations</i> .....	60
4.3	Kualitas Informasi yang Dihasilkan Media Massa .....	73

4.4	Upaya Satgaspen TNI Mengawal Informasi .....	87
4.5	Hasil Penelitian .....	92
4.5.1	Tugas <i>Public Relations</i> .....	92
4.5.2	Fungsi <i>Public Relations</i> .....	93
4.5.3	Kualitas Informasi dari Perspektif Normatif .....	93
4.5.4	Kualitas Informasi dari Perspektif Media Massa .....	95
<b>5</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1	Kesimpulan .....	99
5.2	Saran .....	101
	DAFTAR PUSTAKA .....	103

## **ABSTRAK**

Nama : Hondor Saragih  
Program Studi : Manajemen Bencana untuk Keamanan Nasional  
Judul : Peran Satuan Tugas Penerangan TNI Dalam Memberikan Informasi Yang Berkualitas Pada Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi 2010

Menemukan kualitas informasi suatu lembaga adalah langkah awal dalam membangun citra lembaga tersebut. Peneliti meneliti pandangan 12 narasumber dari Satgaspen TNI, Puspen TNI, pakar *public relations*, dan media massa untuk mengetahui pandangan mereka mengenai kualitas informasi Satgaspen TNI Merapi 2010. Metode analisis yang digunakan adalah analisis naratif. Ditemukan kalau narasumber dari media massa pada umumnya berpendapat kalau kualitas informasi TNI kurang baik kualitasnya, sementara narasumber TNI berpendapat kalau kualitas tersebut baik dan tetap terjaga sampai ke tangan pembaca. Para pakar berbeda pendapatnya mengenai kualitas informasi. Beberapa saran kemudian diberikan untuk menyelaraskan hubungan seperti pelatihan bersama antara militer dan media massa sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas.

Kata kunci: *Satgaspen TNI, media massa, kualitas informasi, Letusan Gunung Merapi, analisis naratif*

## **ABSTRACT**

Name : Hondor Saragih  
Study Program : Disaster Management for National Security  
Title : Role of Information Task Force TNI Qualified In Giving Information On Disaster Response Merapi Eruption 2010

*Finding an agency information quality is the first step in building the image of the institution. Researchers examined the views of 12 speakers from Satgaspen TNI, TNI Puspen, expert public relations, and mass media to find out their views on the quality of the information TNI Merapi Satgaspen 2010. The method of analysis used is the analysis of narrative. Found that the sources of the mass media in general argue that the quality of the information poor quality military, while military sources have argued that the quality is good and is maintained up to the readers. Experts have different opinions about the quality of the information. Some suggestions were then given to harmonize the relationship as joint training between the military and the media so as to produce quality information.*

Keywords: *Satgaspen TNI, quality of information, Merapi eruption, narrative analysis, mass media*

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan antara Informasi dalam Komunikasi tentang Bencana pada saat Normal dan saat Kejadian .....	19
Tabel 4.1	Pemenuhan Prinsip Berbasis Peristiwa dalam Siaran Pers Satgaspen TNI .....	97

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bahaya, Kerentanan, Risiko dan Bencana .....	11
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran Penelitian .....	30
Gambar 3.1	Diagram Alir Prosedur Kerja Penelitian .....	40
Gambar 4.1	Bagan Organisasi Satgas TNI PB Merapi .....	41

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Narasumber .....	1
Lampiran 2	Panduan Wawancara .....	2
Lampiran 3	Matriks Hasil Wawancara Satgaspen TNI .....	6
Lampiran 4	Matriks Hasil Wawancara Puspen TNI .....	15
Lampiran 5	Matriks Hasil Wawancara Wartawan .....	18
Lampiran 6	Matriks Hasil Wawancara Ahli PR .....	35
Lampiran 7	Indikator Kualitas Informasi Siaran Pers Satgaspen TNI ..	47
Lampiran 8	Siaran Pers Satgaspen TNI .....	48

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Bencana alam merupakan salah satu ancaman bagi pertahanan dan ketahanan suatu bangsa di berbagai penjuru dunia. Potensi bencana alam berdampak jangka panjang, menelan korban jiwa dan materi dalam jumlah besar. Bencana alam bahkan mampu mempengaruhi fisik dan mental manusia serta struktur organisasi dalam suatu masyarakat secara tak terprediksi (Sellnow, Seeger, dan Umer, 2000:9). Karena sifat dari dampak bencana alam maka dibutuhkan informasi yang cepat, akurat, langsung, relevan, yang memberikan kepastian dan harapan bagi masyarakat agar bencana alam dan dampaknya dapat segera diatasi dengan efek perbaikan seminimal mungkin (Glik, 2007:35). Menurut Foulkner (2001:141), kegiatan berbagi informasi merupakan kegiatan tahap pertama dalam pengembangan perencanaan strategi untuk ketahanan bencana.

Berbagai studi literatur yang ditelusuri ada indikasi menunjukkan bahwa adanya peningkatan penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu untuk memperoleh informasi dalam setiap pelaporan mengenai respon masyarakat mengenai informasi bencana (McClendon dan Robinson, 2012:1, Dynes, 2006:8). Walaupun adanya peningkatan penggunaan teknologi informasi, peningkatan ini lebih berfokus pada inisiatif individual dalam menyebarkan informasi, misalnya peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam bentuk sms, jejaring sosial, dan blog. Sebagai contoh, respon masyarakat mengenai informasi bencana dalam kasus gempa Haiti 2010 banyak terbantu oleh berbagai pesan singkat, sehingga bantuan segera datang ke berbagai lokasi (McClendon dan Robinson, 2012:1). Informasi masyarakat dalam penggunaan teknologi mengenai informasi tentang bencana yang direspon dengan cepat akan bermasalah dalam kualitas penyampaian informasi karena

memiliki lingkup kecil (informasi yang diterima hanya berada dalam jangkauan persepsi individual), informasi tersebut memiliki akurasi rendah (informasi umumnya kualitatif), dan informasi tersebut sangat bertopang pada infrastruktur (menara ponsel atau internet) yang dapat dirusak dan dipengaruhi oleh bencana alam.

Untuk mendapatkan informasi yang berkualitas tinggi, dibutuhkan peran serta media massa pada level organisasi. Organisasi yang secara tradisional diandalkan dalam melakukan respon terhadap bencana adalah media massa. Sungguhpun demikian, media massa memiliki keterbatasan tersendiri. Media massa mungkin tidak siap ketika bencana tiba-tiba terjadi (Kemp, 2004:274). Selain itu, media massa cenderung membesar-besarkan data kualitatif, misalnya dengan menyebutkan kepanikan warga dalam lingkup yang lebih luas, sehingga memunculkan gambaran situasional yang tidak akurat (Quarantelli, 1984:9). Akibatnya, bukan hanya menimbulkan harapan bagi penerima informasi, berita media massa cenderung menimbulkan rasa takut dan menurunkan empati masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan bantuan (Khattak, 2002:40).

Solusi yang diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas tinggi dan akurat adalah dengan menggunakan piranti militer dan ilmiah. Militer juga memiliki sumberdaya yang cukup untuk melakukan penetrasi hingga ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau sipil. Dengan membentuk hubungan yang baik dengan media massa pada waktu situasi terjadi bencana, militer mampu memberikan kualitas informasi yang lebih baik. Sebagai contoh, kehadiran tentara yang diambil dalam gambar yang ada di televisi pada lokasi bencana terlihat gambaran situasi, walaupun kelihatan buruk, tetap terkendali dengan baik, sehingga mengurangi rasa takut penonton dan mendorong mereka untuk ikut serta memberikan bantuan (Pollack dan Wood, 2010:20). Selain itu, di lokasi terjadinya bencana itu sendiri, militer bukan hanya membantu para korban, namun juga memberikan perlindungan bagi Tim Kesehatan yang mengirimkan

bantuan medis secara darurat (Quarantelli, 2008:50) sehingga kehadiran militer lebih memperbanyak lagi dampak positif dalam penanggulangan bencana.

Hubungan militer dan media massa cukup kuat dalam konteks non bencana seperti perang atau konflik disintegrasi (Freedman, 2003:2). Pada umumnya, media massa tidak memberikan perubahan berarti dalam pengumuman darurat militer. Mereka dengan mudah menerima pembingkaihan yang dibuat oleh militer (Shoemaker dan Reese, 1996:131). Hal ini masuk akal karena mereka bekerja dalam satu kepentingan, yaitu kepentingan bangsa. Keduanya juga menghadapi musuh yang sama yaitu pihak lawan sehingga media massa sangat mengandalkan militer untuk melindungi diri.

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terjadinya bencana alam di dunia. Terdapat lebih dari 500 gunung dengan 128 diantaranya aktif, mencakup zona dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Sementara itu, tiga lempeng kerak bumi bertemu di wilayah Indonesia, hal tersebut dapat meningkatkan resiko gempa. Sebagian besar pertemuan antar lempeng terjadi di wilayah lautan sehingga memberikan ancaman tsunami. Posisi Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa, dan berada di antara dua samudera dan dua bagian besar daratan (Asia dan Australia), serta berbentuk kepulauan, membuat Indonesia rentan terhadap perubahan iklim drastis seperti kekeringan. Penggundulan hutan yang terjadi untuk berbagai tujuan memberikan ancaman kebakaran hutan dan longsor. Keberadaan 5000 lebih sungai yang menjadi pusat hidup dari 30% penduduk di salah satu negara terpadat di dunia ini memberikan resiko banjir (Puzon-Diopenes dan Murshed, 2006:113).

Pada tanggal 26 Desember 2004, bencana alam terbesar dalam satu abad terakhir terjadi di negara Indonesia, menelan korban setidaknya 230 ribu orang. Dalam kasus ini, salah satu permasalahannya adalah kurangnya informasi yang resmi dari pemerintah (Smith et al, 2012:11).

Masyarakat akhirnya mencari informasi di internet yang tentunya sangat sulit dalam memberikan informasi yang langsung dan akurat dari lokasi. Akibatnya, bantuan yang datang sering tidak tepat waktu dan sasaran. Sebagai contoh, ditemukannya bantuan pakaian yang membukit karena masyarakat yang menjadi korban merasa mereka tidak membutuhkan bantuan pakaian atau sandang namun lebih membutuhkan bantuan pangan dan papan. Masalah lain yang paling penting adalah tidak adanya sistem informasi peringatan dini. Walaupun pusat peringatan dini di Pasifik sudah dibangun tahun 1949, hingga tsunami Aceh, tidak ada pusat peringatan dini sejenis yang dibangun lagi di Samudera Pasifik (Leoni, Radford, dan Schulman, 2010:110).

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), TNI telah berperan dalam berbagai bencana nasional seperti Tsunami Aceh, Gempa Bumi di Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Sumatera Barat, banjir bandang di Wasior, serta letusan Gunung Merapi di Jawa Tengah dan DIY. Dapat dimaklumi jika bencana nasional pertama pasca pemberlakuan Undang-Undang ini belum memberikan kualitas informasi yang belum terlalu baik (Smith et al, 2012:11). Hal ini disebabkan oleh lumpuhnya infrastruktur penerangan setempat, ketidakmampuan pejabat dalam fungsi penerangan setempat dalam melaksanakan tugas dan fungsi penerangan secara normal, dan banyaknya kerusakan dan kerugian serta korban jiwa yang terjadi (Basuki, 2012:3). Pada tahun 2010, enam tahun setelah UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia diberlakukan, semestinya TNI telah memiliki peningkatan besar dalam kemampuan penanganan tanggap darurat bencana alam, khususnya dalam fungsi dalam memberitakan penerangan informasi.

Bencana alam nasional yang terjadi terakhir adalah letusan Gunung Merapi di Jawa Tengah dan DIY pada tahun 2010. Dengan ditetapkannya peristiwa tersebut sebagai situasi tanggap darurat, TNI membentuk Satuan Tugas TNI Penanggulangan Bencana Gunung Merapi (Satgas TNI

PB Gunung Merapi). Dalam satuan tugas ini, terdapat Satuan Tugas Penerangan (Satgaspen TNI) yang bertugas mengawal pemberitaan tentang Satgas TNI PB Gunung Merapi.

Dalam kondisi tidak ada bencana, militer dapat membatasi jumlah wartawan yang meliput medan perang yakni hanya wartawan yang sejalan dengan pemikiran militer (Hall, Neitz, dan Battani, 2003:187). Tetapi di kondisi bencana, hal ini tidak dapat dilakukan karena masyarakat sangat membutuhkan informasi. Karenanya, dengan memunculkan Media Center, diharapkan masyarakat mampu memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Hal ini banyak pula membantu mengingat media massa tidak siap dalam melakukan peliputan langsung dan media massa cenderung menggunakan sumber otoritas seperti militer. Karenanya, walaupun media massa dapat melakukan liputan langsung ke lokasi bencana, dalam kondisi bencana media massa juga banyak mengandalkan sarana militer. Masalahnya, bagaimana peran militer itu sendiri melakukan pengendalian terhadap wacana yang dapat menyimpang ketika informasi harus disampaikan lewat media massa ke masyarakat.

Tugas publikasi merupakan tugas yang berhubungan langsung secara eksternal dengan masyarakat. Dalam kegiatan ini, Satgaspen TNI membuat siaran pers dan mengirimkan email ke Puspen TNI yang kemudian didistribusikan ke media massa nasional. Satgaspen TNI juga melaksanakan tugas pelayanan media massa, koordinasi dengan Media Center Satuan Tugas Nasional Penanggulangan Bencana Gunung Merapi, serta tugas-tugas administrasi.

Satgaspen TNI mendesain sebuah informasi berdasarkan peliputan yang dijalankan oleh para anggotanya. Informasi tersebut kemudian disampaikan ke media lewat jalur Puspen TNI. Puspen TNI menghubungi media untuk kemudian media mempublikasikan siaran pers tersebut ke masyarakat. Dengan langkah ini diharapkan tercapai *awareness* dari masyarakat terhadap peran TNI dalam menanggulangi bencana Gunung Merapi.

Sungguhpun demikian, tidak semua informasi yang disampaikan oleh Satgaspen TNI dan Puspen TNI ternyata dipublikasikan oleh media. Ada suatu kesenjangan antara peran Satgaspen TNI dengan kenyataan yang ada sehingga informasi-informasi yang mereka kirimkan tidak diserap sepenuhnya oleh media. Kesenjangan ini misalkan dalam bentuk pemotongan, pengurangan, atau sama sekali tidak memuat siaran pers yang telah dibuat oleh Satgaspen TNI. Kesenjangan ini menunjukkan adanya peran hubungan publik Satgaspen TNI yang masih belum baik. Berdasarkan fenomena itu, peneliti terdorong untuk menulis penelitian sekarang dengan judul **“Peran Satuan Tugas Penerangan TNI Dalam Memberikan Informasi Yang Berkualitas Pada Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi 2010”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang akan diteliti, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana Peran Satuan Tugas Penerangan TNI Dalam Memberikan Informasi Yang Berkualitas Pada Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi 2010”.

Rumusan Masalah dapat diuraikan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas informasi yang dihasilkan oleh Satgaspen TNI pada tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi 2010?
2. Bagaimana kualitas informasi yang dihasilkan oleh media massa berdasarkan sumber Satgaspen TNI pada tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi 2010?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Satgaspen TNI dalam mengawal kualitas informasi saat melewati media massa pada tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi 2010?

### **1.3 Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Tugas Penerangan TNI dalam memberikan informasi yang berkualitas pada tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi 2010.

Secara khusus tujuan penelitian sekarang adalah:

1. Menganalisis kualitas informasi yang dihasilkan oleh Satgaspen TNI pada tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi 2010.
2. Menganalisis kualitas informasi yang dihasilkan oleh media massa berdasarkan sumber Satgaspen TNI pada tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi 2010.
3. Menganalisis upaya apa saja yang dilakukan Satgaspen TNI untuk mengawal kualitas informasi saat melewati media massa pada tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi 2010.

#### **1.3.2 Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi dari penelitian sekarang ini antara lain:

##### **1.3.2.1 Signifikansi Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis mendalam tentang peran Satgaspen TNI pada tanggap darurat bencana dan kualitas informasinya. Penelitian ini mempelajari bagaimana informasi dapat mengalami perubahan kualitas dalam proses transfer dari sumber melewati Satgaspen TNI dan media massa.

##### **1.3.2.2 Signifikansi Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi Puspen TNI tentang kualitas informasi yang dihasilkannya. Selain itu, penelitian ini dijadikan referensi dan masukan untuk pengembangan strategi pemertahanan kualitas informasi dalam konteks bencana alam.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memberikan sumbangan teoritis dalam bidang hubungan militer-media massa dan strategi peningkatan kualitas informasi

dalam latar belakang militer dan bencana alam. Hal ini penting terutama bagi Indonesia yang menganut kebebasan pers namun juga merupakan negara rawan terhadap bencana alam.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dengan penelitian ini, dapat diketahui bagaimana kualitas informasi yang dihasilkan Satgaspen TNI sehingga langkah-langkah peningkatan dapat dilakukan. Lebih lanjut, penelitian sekarang memberikan bahan pertimbangan bagi Puspen TNI untuk membangun strategi dalam mempertahankan kualitas informasi yang dihasilkan Satgaspen TNI dalam OMSP tanggap darurat bencana alam, khususnya bencana letusan gunung.

#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian dan Gambaran Desain Penelitian**

Ruang lingkup dalam penulisan penelitian ini dibatasi pada masalah yang terkait dengan Kualitas Informasi yang menjadi tanggung jawab Satgaspen TNI pada saat terjadinya bencana Gunung Merapi, mulai tanggal 26 Oktober sampai dengan 9 Desember 2010. Isu yang dikaji adalah isu proses sehingga menggunakan analisis hasil wawancara kualitatif dengan pendekatan analisis narasi. Sementara itu, isu tekstual yang umum diteliti menggunakan analisis wacana, *framing*, atau semiotika, terhadap teks siaran pers ataupun pemberitaan media massa, tidak dilakukan.

Penelitian sekarang merupakan penelitian kualitatif. Sumber berasal dari personil Satgaspen TNI Merapi 2010 dan Dinas Penerangan Umum (Dispenum) Puspen TNI yang memiliki pengalaman serta sumber eksternal seperti dosen ilmu komunikasi bidang ilmu *public relation*, dan para wartawan. Penelitian kualitatif dipilih karena mempermudah kajian yang berbentuk deskriptif. Penulis menggambarkan situasi yang terjadi di lapangan saat tersebut sehingga faktor-faktor analisis penelitian dapat ditarik. Studi secara umum dilakukan dalam kerangka analisis naratif.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai teori, pembahasan, dan pendekatan studi dan analisis peran militer dan media massa dalam bencana. Tujuannya untuk menyediakan latar belakang teoritis studi mengenai peran Satuan Tugas Penerangan TNI dalam memberikan informasi yang berkualitas pada tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi 2010. Bagian Tinjauan Pustaka dibagi menjadi empat bagian besar yaitu bencana, informasi, militer, dan media massa.

Bab ini diawali dengan deskripsi teori kebencanaan. Dengan mengikuti teori bencana, pembahasan difokuskan pada bencana letusan gunung. Selanjutnya, definisi informasi diperjelas, dengan berfokus pada ketahanan informasi yang merupakan aspek pertahanan dari studi ini. Di sini, kualitas informasi dijelaskan. Selain itu, komunikasi organisasi juga dibahas sebagai bentuk proses penyaluran informasi.

Bab ini juga membahas tentang peran militer dalam bencana alam dari sudut pandang pertahanan negara. Perhatian khusus diberikan pada hubungan militer-media massa. Bagian terakhir dari tinjauan pustaka membahas tentang media massa dari perspektif ilmu komunikasi. Perhatian khusus dalam bagian ini terletak pada teori pembingkai dan bagaimana peran media massa dalam kejadian bencana alam.

Terakhir, bab ini ditutup dengan Kerangka Pemikiran yang membahas tentang hubungan antara berbagai konsep yang telah dipaparkan dalam tinjauan literatur.

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Bencana Letusan Gunung**

###### **2.1.1.1 Definisi Bencana**

Secara singkat, bencana adalah “sebuah peristiwa yang mengakibatkan korban melebihi sumberdaya yang tersedia” (Glass dan

Schoch-Spana, 2002:219). Sumberdaya yang dimaksud di sini adalah sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di lokasi kejadian. Jika sumberdaya yang ada cukup, ia tidak dapat digolongkan bencana. Sebagai contoh, kejadian kebakaran satu rumah tidak dapat dipandang bencana karena masyarakat atau Pasukan Menanggulangi Kebakaran (PMK) dapat memperoleh sumberdaya (air dan pemadam) dalam lingkungan sekitar lokasi. Kebakaran ratusan rumah dapat digolongkan bencana karena masyarakat atau PMK tidak dapat mengatasinya dengan sumberdaya yang tersedia di lokasi. Karenanya, secara definisi, bencana pasti membutuhkan bantuan dari luar untuk dapat diatasi.

Quarantelli (2008: 45) membatasi bencana hanya pada dua jenis yaitu bencana yang disebabkan oleh alam dan bencana yang disebabkan oleh teknologi. Menurutnya, situasi konflik (misalnya perang, kerusuhan, serangan terorisme) dan krisis non-komunitas (misalnya tabrakan lalu lintas) tidak dapat dimasukkan kedalam kategori bencana karena terkait hubungan antar manusia. Karenanya bencana adalah “peristiwa yang disebabkan oleh non-manusia dan memberikan korban melebihi sumberdaya yang tersedia”.

Sementara itu, Bakornas PB (2007:3) mendefinisikan bencana sebagai “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

#### **2.1.1.2 Bencana dan Bahaya**

Suatu bencana disebabkan oleh adanya pemicu kejadian dan resiko bencana. Risiko bencana sendiri disebabkan oleh adanya bahaya dan kerentanan. Hubungan ini ditunjukkan dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Bahaya, Kerentanan, Risiko, dan Bencana (Bakornas PB, 2007:8).

Dalam Gambar 2.1, bahaya adalah “suatu keadaan alam yang menimbulkan potensi terjadinya bencana”. Berdasarkan aspek spesifiknya, bahaya diklasifikasikan menjadi (Bakornas PB, 2007:8-9):

- a. Bahaya geologi, mencakup gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, dan letusan gunung berapi:
  - 1) Gempa bumi, yaitu peristiwa pelepasan energi yang diakibatkan oleh pergeseran/pergerakan pada bagian dalam bumi (kerak bumi) secara tiba-tiba (BNPB, 2011:5).
  - 2) Tsunami, yaitu rangkaian gelombang laut dengan periode yang panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut (BNPB, 2011:5).
  - 3) Gunung Meletus/Letusan Gunung, yaitu bagian dari aktivitas vulkanik yang menghasilkan awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami, dan/atau banjir lahar (BNPB, 2011:5).
  - 4) Tanah Longsor, yaitu gerakan massa tanah atau batuan, maupun pencampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng (BNPB, 2011:5; Bakornas PB, 2007:26)

- b. Bahaya hidrometeorologis, mencakup banjir, gelombang pasang/badai, kekeringan, dan angin topan:
- 1) Banjir, yaitu limpasan air yang melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah di sisi sungai (BNPB, 2011:5; Bakornas PB, 2007:17)
  - 2) Kekeringan, yaitu “hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan” (Bakornas PB, 2007:33)
  - 5) Angin Topan, yaitu pusat angin kencang dengan kecepatan angin 120 km/jam atau lebih (BNPB, 2011:6; Bakornas PB, 2007:43)
  - 6) Gelombang pasang, yaitu gelombang tinggi yang ditimbulkan oleh gaya tarik menarik antara bumi dengan planet-planet lain terutama dengan bulan dan matahari dalam bentuk kenaikan muka air secara berlebih. Gelombang badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis disekitar wilayah Indonesia, dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam (Bakornas PB, 2007:48)
- c. Bahaya biologis, mencakup wabah penyakit, penyakit tanaman, hama dan penyakit ternak dan tanaman (Bakornas PB, 2007:9)
- d. Bahaya teknologis, mencakup kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, dan kegagalan teknologi (Bakornas PB, 2007:9).
- e. Bahaya lingkungan, mencakup kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, dan pencemaran limbah (Bakornas PB, 2007:9).

Studi literatur ini berfokus pada bahaya letusan Gunung sehingga pembahasan selanjutnya difokuskan pada bencana geologis tipe ini.

### **2.1.1.3 Bahaya Letusan Gunung**

Bahaya letusan gunung api dibagi dua berdasarkan waktu kejadiannya, yaitu bahaya utama (primer) dan bahaya ikutan (sekunder) (Bakornas PB, 2007:64).

- a. Bahaya Utama (primer). Bahaya utama letusan gunung adalah bahaya yang langsung terjadi ketika proses peletusan sedang berlangsung. Jenis bahaya tersebut adalah awan panas (*pyroclastic flow*), lontaran batu (pijar), hujan abu lebat, leleran lava (*lava flow*), dan gas beracun.
- b. Bahaya Ikutan (sekunder). Bahaya ikutan letusan gunung adalah bahaya yang terjadi setelah proses peletusan berlangsung. Ketika gunung meletus, terjadi penumpukan material dalam berbagai ukuran di puncak dan lereng bagian atas. Pada saat hujan sebagian material tersebut akan terbawa oleh air dan membentuk adonan lumpur yang turun ke lembah sebagai banjir bebatuan yang disebut lahar.

Komponen yang terancam oleh letusan gunung antara lain (Bakornas PB, 2007:68):

- a. Mahluk hidup dan harta benda yang ada disekitar pusat letusan atau kawasan rawan bencana.
- b. Semua bangunan yang dapat terbakar atau rubuh dilanda material letusan.
- c. Atap rumah, terutama yang terbuat dari seng mudah korosif akibat hujan abu (mengandung sulfur).
- d. Atap dan rumah yang terbuat dari kayu atau dari bahan yang mudah terbakar lainnya.
- e. Sumber air minum (terutama yang terbuka) mudah tercemar oleh debu gunung.
- f. Atap bangunan yang lemah tidak tahan terhadap endapan abu.
- g. Tanaman rusak menimbulkan gagal panen, cadangan pangan terganggu.
- h. Material letusan, terutama abu dapat mengakibatkan gangguan penapasan (ISPA) dan sakit mata.

#### **2.1.1.4 Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung**

Untuk mengetahui bahaya yang dapat ditimbulkan dari letusan gunung, Pemerintah mengklasifikasikan tingkat bahaya gunung di Indonesia kedalam skala tertentu. Status bahaya gunung antara lain:

- a. Aktif-Normal (level 1). Kegiatan gunung api baik secara visual, maupun dengan instrumentasi tidak ada gejala perubahan kegiatan.
- b. Waspada (level 2). Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumentasi mulai terdeteksi gejala perubahan kegiatan, misalnya jumlah gempa vulkanik, suhu kawah (solfatara/fumarola) meningkatkan dari nilai normal.
- c. Siaga (level 3). Kenaikan kegiatan semakin nyata. Hasil pantauan visual dan seismik berlanjut didukung dengan data dari instrumentasi lainnya.
- d. Awas (level 4). Semua data menunjukkan bahwa letusan utama segera menjelang. Letusan-letusan asap/abu sudah mulai terjadi.

### **2.1.2 Informasi**

#### **2.1.2.1 Definisi Informasi**

Informasi adalah “hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan”. (Wahyono, 2004:3).

Dari definisi di atas, maka informasi datang dari data, bukan langsung dari dunia nyata. Manusia mempersepsi alam, misalnya melihat suatu kejadian, kemudian mengolahnya menjadi sesuatu yang berguna berdasarkan faktor-faktor yang ada dalam dirinya sendiri. Apa yang ia pikirkan atau ucapkan itulah informasi. Informasi memang merupakan gambaran kejadian nyata, namun hanya mendekati kenyataan. Karenanya, dua orang yang melihat kejadian yang sama, dapat

memberikan informasi yang berbeda, tergantung pada aspek mana yang ia fokuskan dalam mengamati. Dengan kata lain, informasi tergantung pada data apa yang ia analisis.

Tidak mungkin semua data dianalisis karena kemampuan manusia mempersepsi alam terbatas. Sebagai contoh, seseorang melihat sebuah kejadian bencana letusan yang dalam sekali pandang terdiri dari kebakaran hutan, hancurnya rumah, rusaknya jembatan, adanya orang yang hanyut, dan meluapnya air. Ia tidak mungkin mengolah semuanya dalam pikirannya. Ia dapat mengatakan kalau bencana letusan yang terjadi menyebabkan ada orang yang hanyut. Kejadian kebakaran hutan luput dari perhatiannya secara tidak sadar karena orang yang hanyut lebih menarik daripada kebaran hutan yang terjadi di pinggiran sungai di lereng gunung tersebut.

Informasi yang disampaikan oleh manusia atas suatu kejadian seperti dalam ilustrasi di atas dikatakan telah mengalami pembingkaiian (*framing*) (Argoathy, 2003:4). Hal ini tidak dapat dihindari karena keterbatasan kognitif maupun keterbatasan alat. Untuk dapat memperoleh informasi yang akurat karenanya, dibutuhkan sumber lebih dari satu, baik itu sumber manusia ataupun alat.

#### **2.1.2.2 Ketahanan Informasi**

Karena informasi secara definisi merupakan alat bantu, maka ia dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Jika dikaitkan dengan perspektif ketahanan, informasi seharusnya dimanfaatkan untuk tujuan ketahanan nasional. Ketahanan nasional sendiri adalah “kondisi dinamis suatu bangsa yang berdiri di atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun tidak langsung, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional” (Soeroso, 2004:x).

Sejumlah negara telah memiliki kerangka ketahanan informasi yang baik. Kementerian Pertahanan Inggris misalnya, menyatakan bahwa “ketahanan membutuhkan data autoritatif dan informasi bermutu; karenanya informasi harus dipandang sebagai asset yang berharga” (MOD, 2011:17). Sementara itu, kerangka ketahanan informasi yang dibuat oleh Kemetrian Pertahanan Australia memiliki visi kalau ketahanan informasi mengandung tiga elemen: (1) satu sumber kebenaran (informasi yang benar), (2) sebuah budaya berbagi informasi antara mereka yang perlu mengetahui (orang yang tepat), dan (3) tata kelola informasi (waktu yang tepat) (Corcoran, 2011:5).

Bencana alam merupakan suatu bentuk ancaman karena langsung berpotensi membahayakan kelangsungan hidup warga negara yang secara kolektif mampu membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.

Agar dapat memberikan bantuan pada ketahanan nasional, informasi yang digunakan harus mendukung usaha menghilangkan ancaman yang ada. Suatu informasi dipandang tidak berguna jika ternyata justru bertujuan merusak ketahanan nasional tersebut. Dalam kasus bencana alam, informasi semacam ini misalnya informasi salah yang menimbulkan ketakutan di masyarakat, informasi yang justru memperburuk citra pemerintah/TNI dalam perannya sebagai pelaksana tanggap darurat bencana alam, atau informasi salah yang justru menyebabkan dampak negatif bencana alam semakin besar. Oleh sebab itu, usaha untuk mengurangi dampak bencana semestinya juga diarahkan pada usaha untuk mengurangi informasi negatif semacam ini.

### **2.1.2.3 Public Relations**

*Public Relations* (PR) adalah “pengembangan dan penjagaan hubungan strategis dengan berbagai publik dari sebuah organisasi” (Hagan, 2011:43). Publik yang dimaksud disini adalah “berbagai pemangku kepentingan, penyusun strategis, atau kelompok target suatu

organisasi termasuk karyawan, pelanggan, pemegang saham, anggota masyarakat, pemerintah, media massa, pesaing, dan apa yang disebut publik secara umumnya” (Hagan, 2011:44). Dikaitkan dengan konteks TNI, maka PR TNI adalah “pengembangan dan penjagaan hubungan strategis antara TNI dengan media massa”.

Tugas PR sangat beragam dan tergantung pada organisasinya. Secara umum, tugas PR antara lain (Raupp dan Van Ruler, 2004:10):

- a. Tugas Manajerial: menjaga hubungan atau mengatur komunikasi dengan publik untuk memperoleh kepercayaan publik dan/atau kesepahaman bersama
- b. Tugas Operasional: menyiapkan alat komunikasi.
- c. Tugas Reflektif: membicarakan mengenai organisasi di masyarakat secara keseluruhan dan bertanggung jawab.
- d. Tugas Pendidikan: membantu anggota organisasi menjadi kompeten secara komunikatif untuk merespon tuntutan masyarakat.
- e. Tugas Pengembangan Profesi: mengembangkan sendiri PR dalam bentuk standar profesi, deskripsi tindakan, etika, dan peran PR.

Fungsi dari PR antara lain (Clark, 2000:367):

- a. Mencari fakta dan memberikan umpan balik
- b. Membuat perencanaan dan program
- c. Melakukan tindakan dan berkomunikasi
- d. Melakukan evaluasi

#### **2.1.2.4 Kualitas Informasi**

##### **2.1.2.4.1 Perspektif Normatif**

Pada saat bencana terjadi, informasi baik bagi korban maupun masyarakat umum sangat dibutuhkan. Perilaku seseorang dalam bencana alam sangat dipengaruhi oleh faktor sosial yaitu rekan (teman, keluarga, tetangga, dan rekan kerja) dan media massa (Lindell, 2006:272). Mereka akan berusaha mencari informasi, dengan kualitas apapun (Latonero dan Shklovski, 2010:3) dan begitu informasi datang, mereka mendengar,

memahami, percaya, mempersonalisasi, dan akhirnya memutuskan /merespon (Dynes, 2006:8). Tindakan memutuskan/merespon ini dapat berakibat fatal. Jika kedua pihak ini memberikan informasi yang salah, hasilnya akan membahayakan nyawa korban. Sebaliknya, jika individu tidak mendengar (tidak memperoleh informasi), mustahil mereka dapat memahami, yakin, mempersonalisasi, ataupun memutuskan untuk bertindak (Dynes, 2006:9). Hal inipun dapat berakibat buruk.

Menurut Reynolds dan Seeger (2005:48), informasi dalam kondisi biasa dan darurat adalah berbeda. Perbedaan ini ditunjukkan pada Tabel 2.1. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana informasi dalam kondisi bencana harus diperlakukan berbeda dengan informasi pada kondisi biasa.

Studi O'Brien dan Mileti (1992:71) dalam kasus bencana gempa bumi di Loma Prieta menunjukkan kalau kualitas informasi berpengaruh terhadap penyesuaian diri masyarakat dan korban. Hal ini juga ditemukan oleh Mileti dan Darlington (1995:119) dalam kasus gempa bumi di San Francisco. Begitu pula, studi oleh Mileti dan Fitzpatrick (1992 dalam Lindell, 2006:272) menemukan kalau kualitas informasi berpengaruh terhadap kesiapan darurat dalam kasus Parkfield.

Tabel 2.1 Perbedaan Antara Informasi dalam Komunikasi tentang  
Bencana pada saat Normal dan saat Kejadian

Pembeda	Komunikasi normal	Komunikasi bencana/krisis
Isi	Pesan mengenai kemungkinan konsekuensi negatif dan bagaimana ia dapat dikurangi; membahas tentang pemahaman atas bahaya dan keyakinan budaya atas bencana	Pesan mengenai keadaan atau kondisi sekarang mengenai peristiwa yang spesifik; besar, durasi kesegeraan, dan pengendalian/tanggap darurat; penyebab, siapa yang salah, akibat
Sifat	Persuasif (mengajak) dalam bentuk iklan dan kampanye pendidikan umum	Informatif (memberi tahu) dalam bentuk berita atau siaran dari sistem peringatan dini
Frekuensi	Rutin	Tidak tetap
Pusat	Berpusat pada pengirim/pesan	Berpusat pada penerima/situasi
Referensi	Berdasarkan apa yang diketahui sekarang	Berpusat pada apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui
Persiapan pengiriman	Jangka panjang lewat kampanye	Jangka pendek, kurang persiapan, bersifat responsif
Sumber	Pakar, ilmuan	Otoritas, manajer kedaruratan, pakar pelaksana
Jangkauan	Individu	Individu, masyarakat, atau daerah
Pendukung	Iklan, famplet	Konferensi pers, edaran pers, pidato, situs internet
Pengendalian	Terkendali dan terstruktur	Spontan dan reaktif

Sumber: Reynolds dan Seeger (2005:48)

Menurut Glik (2007:35), kualitas informasi dapat dinilai dari kecepatan, akurasi, sifatnya yang langsung, relevansi, pemberian kepastian, dan pemberian harapan. Sementara itu, menurut Lindell (2006:272), kualitas informasi terdiri dari spesifisitas, konsistensi, dan kepastian sumber. Di sisi lain, secara umum, Nugroho (2010:63) menyebutkan kalau kualitas informasi adalah mudahnya informasi diperoleh dan terbukanya informasi-informasi tersebut untuk diakses demi tujuan tertentu. Dalam konteks penelitian sekarang, tujuan tersebut adalah untuk ketahanan nasional. Pemerintah sendiri menggariskan kalau kualitas informasi terdiri dari kecepatan dan keakuratan (Presiden RI, 2012:II.1-33). Penelitian sekarang menggunakan empat indikator dari kelompok indikator kualitas informasi Glik (2007:35) yaitu kecepatan, keakuratan, pemberian kepastian, dan pemberian harapan. Sifat relevansi dan langsung diasumsikan benar dengan sendirinya karena Satgaspen

TNI memperoleh langsung dari lapangan dan relevan dengan kejadian bencana letusan Gunung Merapi.

Berdasarkan sifat dari informasi dalam kondisi bencana, dibutuhkan perencanaan manajemen dalam komunikasi organisasi yang baik pada saat pra-bencana agar aliran informasi di saat bencana tetap terkendali dan berkualitas tinggi (Glik, 2007:45). Terdapat lima bentuk komunikasi organisasi pada konteks kebencanaan menurut Quarantelli (1984:13):

- a. Komunikasi Intra-Organisasi. Dalam kondisi normal, sistem komunikasi dirancang untuk mengolah dan mempertukarkan tipe dan jumlah informasi yang telah ditentukan. Dalam kondisi bencana, jumlah staf yang menggunakan sistem komunikasi meningkat drastis. Hal ini menyebabkan sistem komunikasi internal dapat mencapai *overload*. Akibatnya informasi yang masuk harus segera dikeluarkan, sering tanpa melihat pada kualitasnya. Akibatnya, informasi yang salah dapat tersalurkan ke masyarakat.
- b. Komunikasi antar organisasi. Dalam kondisi normal, komunikasi berjalan secara informal. Orang dari satu organisasi dapat berkomunikasi dengan orang dari organisasi lain tanpa melihat jenjang atau posisinya dalam struktur organisasi. Dalam kondisi bencana, hubungan ini berubah. Orang dari satu organisasi harus berhubungan dengan kontak baru yang tidak akrab atau tidak dikenal dalam kondisi normal. Komunikasi menjadi bersifat formal dan karenanya informasi yang muncul sulit untuk disampaikan karena takut akan tanggung jawab.
- c. Komunikasi antara organisasi dan masyarakat umum. Masalah yang muncul dalam komunikasi dengan masyarakat umum saat bencana adalah asimetri informasi yang besar. Para petugas mengetahui banyak hal tentang bencana sementara penduduk mengetahui sedikit sekali. Akibatnya, ketika petugas menyampaikan informasi, mereka berasumsi kalau mereka menyampaikan hal penting sesingkat dan sesegera mungkin, namun ternyata tidak dipahami oleh masyarakat.

Hal ini justru berbahaya karena menimbulkan kebingungan dan membuat perhatian masyarakat teralihkan dari bencana yang sesungguhnya.

- d. Komunikasi dari masyarakat ke organisasi. Dalam masa bencana atau pra-bencana, masyarakat membombardir organisasi dengan berbagai permintaan bantuan atau informasi. Jika jumlah petugas yang tersedia tidak mampu mengatasi berbagai permintaan yang masuk, efektivitas organisasi dipersepsi rendah dan mereka dituding tidak mampu bekerja maksimal.
- e. Komunikasi dalam sistem organisasi berbeda. Penanganan bencana membutuhkan kerjasama dari banyak organisasi. Dalam masa damai, sistem organisasi ini sering kali terpisah. Rumah sakit sibuk dengan tugasnya sendiri begitu juga militer. Tapi begitu bencana, mereka dipaksa untuk bekerjasama. Jika bagaimana bentuk kerjasama dan bagaimana tanggungjawab dari setiap pihak dalam kerjasama tersebut tidak digariskan dengan baik, hasilnya dapat berakibat kekacauan dalam sistem yang justru diharapkan untuk membantu masyarakat menghadapi bencana.

Ketika perspektif normatif dibawa kepada kepentingan TNI, maka informasi yang berkualitas bukan hanya informasi yang cepat, akurat, memberi kepastian, dan memberi harapan, namun juga menunjukkan citra positif TNI di masyarakat.

Pandangan mengenai kualitas informasi di atas lebih merujuk pada perspektif normatif dengan asumsi bahwa penerima informasi terfokus pada informasi yang diinginkan. Media massa menggunakan asumsi berbeda. Mereka melihat pada bagaimana menjadikan informasi dari bencana mendorong orang untuk memilih membacanya dari begitu banyak informasi yang mereka tawarkan. Karenanya, kita juga harus mempertimbangkan kualitas informasi menurut perspektif PR (*Public Relations*) dan media massa.

#### **2.1.2.4.2 Perspektif Media Massa**

Menurut perspektif ilmu jurnalistik, informasi yang berkualitas adalah informasi yang memenuhi prinsip-prinsip jurnalistik. Prinsip jurnalistik mencakup dua hal yaitu prinsip terhadap kejadian yang diberitakan dan prinsip terhadap berita yang dilaporkan. Prinsip dalam kejadian yang diberitakan adalah bagaimana media massa menangkap kejadian yang akan dilaporkan. Prinsip ini mencakup dua hal yaitu akurasi dan verifikasi (Nugroho, Putri, dan Laksmi, 2012:68). Prinsip terhadap berita yang dilaporkan adalah bagaimana media massa menyajikan berita tersebut ke masyarakat. Menurut Ersoy (2008:5), ada lima prinsip yang menentukan apakah kualitas berita yang dilaporkan baik atau tidak. Kelima prinsip tersebut adalah (1) sederhana, (2) reaktif pada peristiwa mengejutkan, (3) berbasis peristiwa, (4) objektif, dan (5) seimbang (mencakup kedua sisi).

Pada gilirannya, prinsip-prinsip jurnalistik di atas bersifat subjektif karena tergantung pada ideologi media massa. Media massa dengan ideologi berbeda memberikan fokus yang berbeda pula pada prinsip mana yang harus dikedepankan. Ada empat jenis ideologi media massa (Xiaoge, 2009:362):

- a. Media massa pembangun bangsa: tujuan utama adalah pembangunan sehingga berita-berita ditujukan untuk menjaga kestabilan sosial, membangun keharmonisan sosial, dan memperkuat ekonomi bangsa.
- b. Media massa rekan pemerintah: tujuan utama adalah menggunakan kebebasan pers namun memprioritaskan pada kepentingan nasional
- c. Media massa agen pemberdayaan: tujuan utama adalah memperkuat masyarakat jelata untuk berpartisipasi dalam pembangunan manusia dan kehidupan umum (Dagron, 2001)
- d. Media massa pengawas dan penjaga transparansi: tujuan utama adalah membongkar keburukan pemerintah untuk

menjaga kepentingan masyarakat atas pemerintahan yang adil dan transparan

Media massa di Indonesia pada masa Orde Baru tergolong sebagai media massa pembangunan bangsa. Ketika masa reformasi, kebebasan pers mendorong media massa di Indonesia memiliki paradigma beragam. Karena keanekaragaman ini, lebih tepat jika media massa-media massa di Indonesia dipandang secara umum menganut prinsip jurnalistik umum seperti yang telah digambarkan di atas. Atas alasan ini, maka kualitas informasi di media massa dapat dilihat dari perspektif prinsip jurnalistik. Prinsip-prinsip ini mencakup akurasi, verifikasi, sederhana, reaktif pada peristiwa mengejutkan, berbasis peristiwa, objektif, dan seimbang (mencakup kedua sisi).

### **2.1.3 Media Massa**

#### **2.1.3.1 Pembingkaiian (*Framing*) Media Massa**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, manusia melakukan pembingkaiian saat mengolah data untuk menghasilkan informasi. Hal yang sama juga terjadi dalam media massa (Glik, 2007:44). Media massa memiliki pretensi tertentu sebagai alat seleksi untuk menghasilkan informasi seperti apa yang akan mereka berikan. Wartawan tidak hanya memilih topik untuk dibahas namun juga menekankan atau mengabaikan informasi tertentu dalam pemberitaannya (Glik, 2007:44). Akibatnya, sebuah kejadian yang sama memiliki berita yang berbeda jika diliput oleh dua media massa berbeda. Lebih jauh, kedua berita dapat saling bertolak belakang.

Pembingkaiian berangkat dari teori representasi sosial (Washer, 2004:2561). Teori ini menyatakan kalau ketika masyarakat menghadapi fenomena baru seperti bencana alam, gagasan yang dipandang umum tentang hal tersebut akan segera muncul secara spontan (Glik, 2007:44). Pada awal kejadian bencana, media massa akan mengamati bagaimana masyarakat korban memandang peristiwa tersebut (Glik, 2007:44).

Perhatian masyarakat umum berfokus pada bagaimana korban menderita (perspektif *them*). Ketika minat ini menurun, media massa harus mendapatkan lebih banyak perhatian masyarakat dan mereka mulai berfokus pada dampak masyarakat itu sendiri (perspektif *us*) (Glik, 2007:44).

Pembingkaiian memang penting karena merupakan usaha untuk menggambarkan adanya keteraturan dalam situasi yang kacau dan tak terprediksi (Washer, 2004:2561; Sandman, 2003:20). Walau begitu, pembingkaiian yang salah berakibat pada munculnya berbagai mitos khususnya dalam situasi bencana.

Adanya pembingkaiian tersebut menyarankan pada para pelaksana langsung, misalnya Satgaspen TNI, untuk mengantisipasinya dengan memberikan informasi secara jelas dan menyeluruh (Covello, 2003:7). Hal ini juga menyarankan kalau pelaksana juga dapat memakai strategi pembingkaiian dengan menyeleksi berbagai berita media massa yang menjadi saluran ke masyarakat. Berita-berita yang tidak sejalan dengan ketahanan nasional misalnya, harus segera mendapatkan tindakan sehingga informasi yang disampaikan selalu tepat dan berkualitas tinggi (Glik, 2007:44).

#### **2.1.3.2 Media massa dan Berita Bencana**

Menurut Quarantelli (1996 dalam Faulkner, 2001:141), berbagai permasalahan yang dihadapi media massa dalam menghadapi bencana adalah:

- a. Ketidaksiapan media massa dalam menghadapi pelaporan bencana
- b. Terjadi ketegangan antara media massa lokal dan media massa nasional karena media massa lokal menganggap kalau bencana yang terjadi di wilayah kerjanya adalah bencana mereka, bukan bencana nasional

- c. Media massa cenderung memberitakan tentang aktivitas yang dilakukan organisasi formal, ketimbang melaporkan kegiatan pihak lain yang datang secara informal dan spontan
- d. Media massa cenderung menghadirkan mitos-mitos berupa adanya kepanikan warga, pencurian dan penjarahan, dan kerusuhan.

Berbagai kecenderungan di atas menyebabkan media massa seringkali menimbulkan masalah dalam penanganan bencana. McEntyre (2005:11) membuat daftar permasalahan tersebut antara lain:

- a. Pelaporan tidak akurat
- b. Media massa masuk ke lokasi tertentu tanpa izin, misalnya ke rumah sakit atau daerah berbahaya yang dilarang oleh otoritas
- c. Media massa kurang sensitif dengan orang lain di lokasi bencana, misalnya dengan melakukan wawancara pada korban yang sedang dalam kondisi trauma atau kesakitan
- d. Media massa tidak kooperatif dengan stakeholder lain sehingga sulit diatur
- e. Berita media massa menyebabkan berkumpulnya orang di lokasi bencana sehingga petugas lain sulit melakukan evakuasi korban (Auf der Heide, 1987:10.1; Philips, 1986:7)
- f. Media massa menambah beban pada petugas darurat dengan meminta bantuan untuk kepentingannya seperti mewawancarai petugas yang sedang sibuk berpikir (Auf der Heide, 1987:10.1, 10.5)
- g. Media massa ikut campur dalam operasi tanggap darurat sehingga menurunkan efektivitas bantuan cepat (Auf der Heide, 1987:10.7-8)
- h. Wartawan menimbulkan masalah keselamatan karena memasuki wilayah yang seharusnya tidak boleh dimasuki (Auf der Heide, 1987:10.8)

- i. Wartawan tidak memiliki pemahaman teknis mengenai situasi (Burkhart, 1987:357)
- j. Media massa salah menggambarkan situasi pada masyarakat dan menyebarkan mitos (Auf der Heide, 1987:10.12, 10.6)
- k. Berita merusak reputasi individu atau badan penanganan bencana

Hal-hal ini muncul karena berbagai faktor antara lain (McEntyre, 2005:17; Burkhart, 1987:361):

- a. Media massa ingin meraih sebanyak mungkin pemirsa/penonton/pembaca sehingga menjadikan bencana sebagai peristiwa sensasional
- b. Media massa ingin mendapat berita sesegera mungkin sehingga melecehkan korban
- c. Wartawan ingin segera menyiarkan berita sehingga berkinerja dibawah kondisi normal seperti gagal mengamalkan fakta, mengabaikan etika jurnalistik, menggunakan pakar pseudo, mengabaikan aspek penting, dan gagal mengakui kelemahannya

## **2.1.4 Peran Militer dalam Penanggulangan Bencana**

### **2.1.4.1 Operasi Militer Selain Perang dalam Penanggulangan Bencana**

Kemampuan untuk merespon dalam kondisi darurat telah lama dimiliki oleh militer (Fry dan Lenert, 2005:261). Hal ini penting karena respon cepat sangat dibutuhkan dalam medan perang. Militer memiliki ICS (Incident Command System) yaitu struktur organisasi praperencanaan untuk tanggap darurat (Lindell, 2006:256). Kemampuan melakukan mobilisasi dengan cepat merupakan keunggulan penting terutama dalam masa perang. Karenanya, militer terlatih untuk sadar dengan situasi dan siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Malahan, dapat dikatakan kalau setiap personil militer adalah sensor (Latonero dan Shklovksi, 2010:8).

Kejadian bencana alam juga memiliki karakteristik yang sama dengan perang. Peristiwa terjadi mendadak dan dalam waktu singkat memberikan dampak besar. Dampak fisik yang ditimbulkan bahkan sangat mirip dengan dampak fisik peperangan. Kehancuran di berbagai lokasi dan tertutupnya akses-akses, sarana dan prasarana vital.

#### **2.1.4.2 Strategi Komunikasi *Public Relations* Militer dalam Penanggulangan Bencana**

Menurut De Czege (2009), dalam perang Peloponnesia Yunani, kedua pihak mengetahui akan dua kebenaran:

1. Menjaga kepercayaan dan keyakinan diri sendiri dan sekutu dari sipil akan memastikan ketersediaan sumberdaya untuk misi apapun
2. Memenangkan penghormatan dan dukungan sipil dalam perang adalah kunci untuk menyelesaikan misi dengan sukses.

Hal ini semakin penting dalam kondisi sekarang yang saling berhubungan dan saling ketergantungan. Dalam masyarakat global, kesulitan-kesulitan yang dihadapi militer antara lain (De Czege, 2009):

1. Sulitnya mencapai kejutan strategis menggunakan pasukan konvensional yang besar
2. Mendorong pemimpin militer senior dan politis untuk lebih sadar dengan penggunaan kekuatan yang tidak seimbang
3. Memperkuat dampak kerusakan
4. Mempengaruhi pembuatan keputusan pada tingkat komando yang lebih tinggi dan melibatkannya dalam detail taktis
5. Membuat operasi rahasia lebih sulit dilakukan

Di sinilah menurut De Czege (2009) pentingnya peran PR militer dalam menyampaikan pesan ke masyarakat. Dalam menyampaikan pesan ke masyarakat, militer harus menjaga kualitas pesan untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat. Kualitas-kualitas ini antara lain:

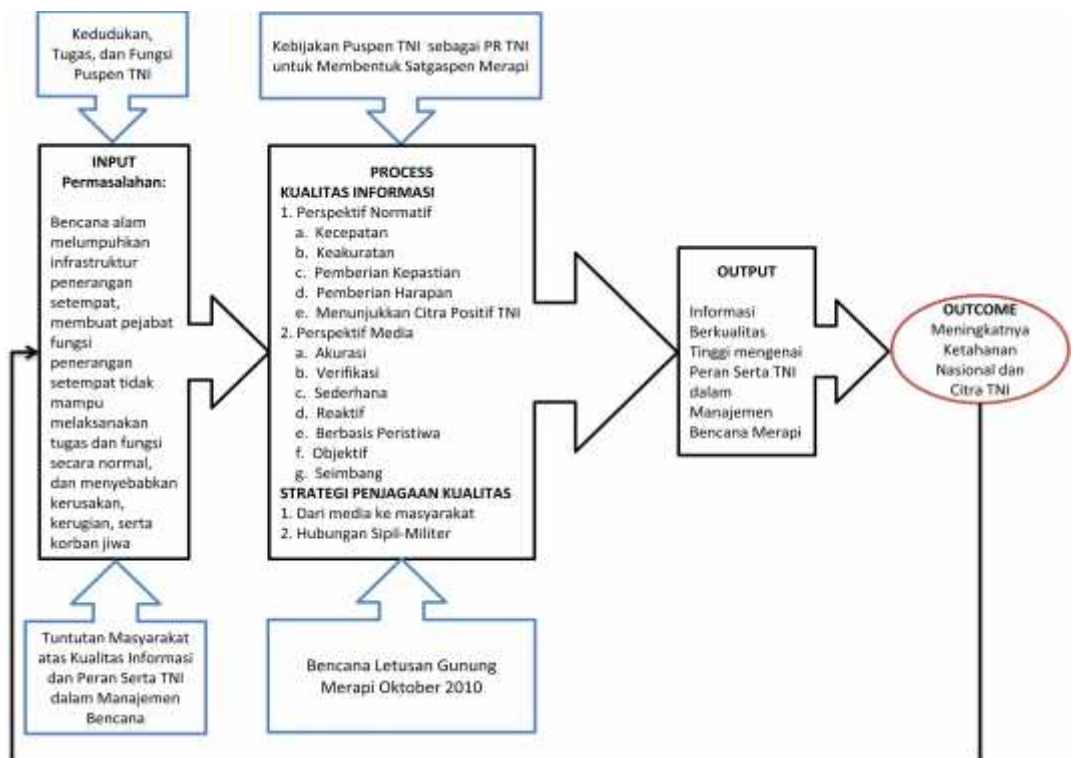
1. Kredibel. Kredibilitas bersifat relatif, pesan yang terlalu luar biasa mungkin benar, tapi dapat tidak dianggap oleh orang yang pengetahuannya kurang. Malahan, pesan semacam ini dapat memunculkan salah persepsi.
2. Sah secara lokal maupun oleh pembaca. Harus dipikirkan bagaimana masyarakat lokal dan pembaca memahami berita tersebut.
3. Harus dipahami sebagaimana yang dimaksudkan. Pembaca dan masyarakat lokal harus memahami pesan seperti apa yang dimaksudkan oleh PR militer.
4. Harus bersifat personal dan konkrit, bukan abstrak. Harus jelas orang-orangnya dan kejadiannya.
5. Harus mengkomunikasikan bagaimana mereka dapat bertindak dalam masyarakatnya. Dalam suatu pesan dari PR militer harus ada sebuah instruksi bagaimana pembaca dapat bertindak secara lokal dan jelas.

Kualitas pesan di atas tidak dilakukan oleh Satgaspen TNI sehingga memunculkan pandangan dari media kalau berita yang mereka terbitkan bukanlah sesuatu yang bernilai berita dan penting untuk disampaikan secara utuh pada masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah rambu-rambu di atas lebih tepat jika dijalankan pada masa perang. Sebagai contoh, tidak mungkin dalam siaran pers disertakan instruksi bagaimana menyelamatkan diri dari letusan Gunung Merapi ketika pembaca sendiri tinggal di wilayah Sumatera atau Kalimantan. Dalam masa tanggap darurat bencana, rambu-rambu seperti di atas belum tersedia. Untuk itu, dibutuhkan rambu-rambu kualitas informasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan penanggulangan bencana. Sayangnya, rambu-rambu yang ada lebih menjurus pada kualitas informasi secara umum (perspektif normatif), bukan secara khusus untuk PR militer. Dengan kondisi seperti di atas, peneliti lebih memilih menggunakan perspektif

normatif daripada perspektif PR militer di masa perang yang dapat tidak relevan dengan OMSP.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, dapat dibuat sebuah kerangka pemikiran yang menjadi landasan studi sekarang seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.2. Dalam gambar ini, ditunjukkan kondisi Indonesia yang rawan bencana alam memberikan tuntutan dari masyarakat untuk peran serta TNI dalam manajemen bencana di negara ini. Hal ini didukung oleh Visi, Misi, dan Tujuan Puspen TNI. Ketika bencana letusan Gunung Merapi terjadi, Puspen TNI membentuk Satgaspen TNI untuk memberitakan kondisi bencana dan bagaimana TNI terlibat di dalamnya. Pemberitaan ini membutuhkan kerjasama TNI dengan media massa. Outputnya adalah informasi berkualitas tinggi dalam perspektif TNI mengenai peran TNI dalam manajemen bencana letusan Gunung Merapi. Informasi berkualitas tinggi disini adalah informasi yang cepat, akurat, memberikan kepastian, memberikan harapan, dan menunjukkan citra positif TNI. Hal ini semestinya memberikan dampak (*outcome*) berupa peningkatan ketahanan nasional khususnya dalam konteks kebencanaan. Negara yang memiliki ketahanan tinggi seperti ini mampu mengurangi permasalahan yang dihadapi khususnya dalam bidang penerangan ketika bencana memang terjadi.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian

## **BAB 3**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Sumber Data, Subjek, dan Objek Penelitian**

##### **3.1.1 Sumber Data**

- a. Data primer, diperoleh dari wawancara di lapangan dengan narasumber yang pernah menjadi anggota Satgaspen TNI Merapi 2010, staf di Puspen TNI, dosen komunikasi bidang *Public Relations*, dan wartawan yang menjadi penyalur informasi dari Satgaspen TNI.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen berupa laporan akhir dan artikel berita dari media massa cetak/on-line, audio rekaman berita radio, dan/atau video rekaman siaran televisi yang berkaitan dengan topik penelitian.

##### **3.1.2 Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah Satgaspen TNI Merapi 2010.

##### **3.1.3 Objek Penelitian**

Objek penelitian sekarang adalah kualitas informasi dari Satgaspen TNI Merapi 2010.

#### **3.2 Desain Penelitian**

##### **3.2.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif karena memberikan gambaran mendalam mengenai permasalahan yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan dan berdasarkan penafsiran penelitian (Creswell, 2009:84). Penelitian ini tidak melakukan uji statistik atau perhitungan yang bersifat kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti baik dibantu orang lain atau tidak, merupakan alat pengumpul data. Sebagai penelitian kualitatif, penelitian sekarang berusaha memberikan gambaran akurat mengenai situasi yang terjadi di lapangan secara sistematis dan mendalam.

Penelitian ini juga tergolong sebagai penelitian historis. Menurut Nazir (2009:48), Penelitian dengan menggunakan metode historis menyelidiki yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan, serta pengalaman di masa lampau dan menimbang secara cukup teliti dan hati-hati tentang bukti validitas dari sumber sejarah, serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut. Dikatakan historis karena situasi tertentu yang dimaksud di atas telah berlalu. Karenanya, hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses serta pengaruh-pengaruh yang didapat dari fenomena yang dikaji adalah sesuatu yang bersifat historis.

Desain penelitian kualitatif ini bersifat fleksibel karena pengumpulan dan analisis data bergantung pada informasi yang diperoleh di lapangan. Karenanya penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yang telah dirumuskan sebagai panduan dasar mengumpulkan data.

### **3.2.2 Konteks Penelitian**

Untuk memperoleh gambaran yang diinginkan ini, penulis memandang bahwa konteks sangat berperan penting. Konteks penelitian ini adalah bencana alam letusan gunung Merapi di Yogyakarta tanggal 26 Oktober s/d 9 Desember 2010. Konteks ini dipilih karena merupakan bencana alam nasional terakhir yang pernah dihadapi oleh Indonesia pada saat tesis ini ditulis.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik:

#### **a. Analisis Dokumen**

Analisis dokumen adalah pengumpulan data dengan mengamati dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian baik dalam bentuk peraturan, catatan, laporan, dan sebagainya (Moleong,

2001). Dalam penelitian sekarang, dokumen yang dimaksud antara lain:

- 1) Laporan, mencakup:
  - a) Laporan Akhir Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi, Satgas Nasional Penanggulangan Bencana Gunung Merapi, BNPB.
  - b) Laporan Pelaksanaan Tugas Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Gunung Merapi, Satgas TNI PB Gunung Merapi Tahun 2010, Mabes TNI.
  - c) Laporan Akhir Satuan Tugas Nasional Penanggulangan Bencana Merapi 2010, Media Center Tanggap Darurat Merapi, Kominfo.
  - d) Laporan Pelaksanaan Tugas Satuan Tugas Penerangan Dalam Penganggulangan Bencana Merapi Tahun 2010, Puspen TNI.
- 2) Berita, mencakup dokumentasi media massa yang mendapatkan langsung sumber dari Satgaspen TNI dengan populasi mencakup (Puspen TNI, 2010:18):
  - a) 15 siaran pers tentang kegiatan Satgas
  - b) 13 wawancara dengan media massa nasional
  - c) Hasil pelayanan terhadap sembilan media massa cetak, elektronik, dan online

Dalam penelitian ini, hanya 15 siaran pers tentang kegiatan Satgas yang digunakan. 13 wawancara dan pelayanan terhadap media massa tidak dapat dilakukan karena bersifat audio-visual (non teks) dan untuk media massa cetak, peneliti tidak menemukan secara lengkap teks yang dimaksud.

b. Wawancara

Narasumber yang dipilih adalah narasumber yang relevan dengan masalah penelitian. Narasumber ini merupakan personil Satgaspen Puspen TNI Merapi 2010 serta personel Puspen TNI. Masing-masing organisasi diambil 2 orang yang paling relevan sehingga total diperoleh 4 orang narasumber dari Puspen TNI. Narasumber eksternal yang digunakan adalah 4 orang wartawan dan 4 ilmunan.

Narasumber dari ilmunan adalah ahli PR dari perguruan tinggi. Ilmunan khusus dimintai bantuan untuk memeriksa kualitas *press release* yang dikeluarkan langsung oleh Satgaspen TNI maupun dari media massa. Panduan wawancara ditunjukkan dalam Lampiran I.

Narasumber dari media massa dipilih adalah Tribun Yogya, Suara Karya, Antara, dan Rakyat Merdeka Online. Peneliti berusaha memperoleh lebih banyak narasumber namun keterbatasan akses dan waktu menjadi kendala bagi pengumpulan narasumber lebih jauh. Alasan pemilihan masing-masing media massa antara lain:

- 1) Tribun Jogja. Tribun adalah grup surat kabar lokal yang berada di bawah Kompas Gramedia Group (Nugroho, Putri, dan Laksmi, 2012:131). Sebagai bagian dari Kompas, Tribun sedikit banyak memiliki ideologi Kompas yang nasionalis dengan tema jurnalisme damai (*peace journalism*). Jurnalisme damai berarti Tribun Jogja berusaha agar membentuk wacana damai ketika konflik terjadi dalam masyarakat atau ketika suatu peristiwa dalam berita berpotensi memunculkan konflik. Pemilihan Tribun Jogja diharapkan mampu memberikan kualitas informasi yang sejalan dengan tujuan perdamaian.

- 2) Suara Karya. Suara Karya adalah surat kabar nasional yang didirikan oleh Partai Golkar (Nugroho et al, 2012:16). Semenjak era Orde Baru, Suara Karya terkenal sebagai media massa yang bersahabat dengan Pemerintah dan TNI. Keterkaitan Suara Karya dengan Partai Golkar memberikan jaminan bahwa surat kabar ini berideologi nasionalis. Orientasinya kemudian tergantung pada posisi Partai dalam pemerintahan. Dalam konteks sekarang dan masa lalu, Partai Golkar selalu berada di posisi di atas dan memiliki banyak wakil di pemerintahan. Karenanya, dalam konteks sekarang, Suara Karya akan cenderung mendukung pemerintah, termasuklah TNI. Pemilihan Suara Karya diharapkan mampu memberikan kualitas informasi yang sejalan dengan tujuan Pemerintah.
- 3) Antara. Antara adalah kantor berita Nasional Indonesia. Sebagai kantor berita nasional, Antara selalu memihak pada kestabilan pemerintahan. Pemilihan Suara Karya diharapkan mampu memberikan kualitas informasi yang sejalan dengan tujuan Pemerintah.
- 4) Rakyat Merdeka Online (RMO). RMO adalah surat kabar online yang merupakan bagian dari Jawa Pos Group, kelompok surat kabar kedua terbesar di Indonesia setelah Kompas Gramedia Group (Nugroho et al, 2012:133). Ideologi Jawa Pos adalah pembangunan nasional. Pemilihan RMO diharapkan mampu memberikan kualitas informasi yang sejalan dengan pembangunan.

Tidak dapat dipungkiri, di dunia media massa juga terdapat surat kabar kritis yang ideologinya berlawanan dengan empat media di atas. Surat kabar semacam ini misalnya surat kabar lokal kecil yang mengejar sensasi atau sejumlah surat kabar yang memiliki latar belakang pernah dibredel di masa Orde

Baru. Walau begitu, pangsa pasar dari surat kabar tersebut jauh lebih kecil di masyarakat. Kompas Gramedia Group dan Jawa Pos menguasai pangsa pasar surat kabar di Indonesia (Nugroho et al, 2012:67). Antara merupakan rujukan utama dari surat kabar yang tidak memperoleh berita secara langsung. Sementara itu, Suara Karya memiliki pembaca yang tidak termasuk lima besar di Indonesia, namun memiliki kestabilan dan akses yang mudah dengan Puspen TNI.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Jakarta tepatnya di Puspen TNI. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat keberadaan narasumber yang dibutuhkan untuk memberikan informasi penelitian.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis naratif. Analisis dokumen digunakan untuk menunjang hasil analisis naratif

Analisis naratif adalah salah satu tipe analisis kualitatif yang bertujuan memahami bagaimana seseorang memberi makna atas fenomena hidup mereka dengan menafsirkan pikiran, pengalaman, tindakan, dan ekspresi (Boeije, 2009:8). Ia didasarkan oleh asumsi kalau “pengalaman dan fenomena tertentu dapat ditafsirkan lewat cerita (narasi)” (Chant, 2002:5). Analisis naratif dipandang sebagai metode analisis kualitatif berdasarkan pengetahuan kalau ketika seseorang bercerita selalu ditemukan lima hal (Chant, 2002:5):

- 1) Adanya penekanan akhir yang bernilai
- 2) Adanya seleksi peristiwa yang relevan dengan tujuan
- 3) Adanya urutan peristiwa-peristiwa
- 4) Adanya urutan sebab akibat, dan
- 5) Adanya tanda demarkasi (awal, tengah, dan akhir)

Keuntungan penggunaan analisis naratif antara lain:

- 1) Memungkinkan narasumber berbicara secara alami dan memberikan petunjuk pada pertanyaan mengapa ia bercerita seperti itu (Chant, 2002:5).
- 2) Memungkinkan keterlibatan narasumber, tindakan yang mereka ambil, konsekuensi tindakannya, dan hubungannya dengan peristiwa yang terjadi dapat dipertahankan dalam aliran cerita tanpa kehilangan kebermaknaan pada konteks sosial atau organisasi dimana peristiwa ini terjadi (Saunders dan Thornhill, 2007:497).

Menurut Chism, Douglas, dan Hilson (2008:13), ada tiga jenis analisis naratif:

- a) Analisis naratif biografis: analisis yang berfokus pada peristiwa, orang, dan elemen biografis lain dalam kehidupan seseorang
- b) Analisis naratif psikologis: analisis yang berfokus pada pemikiran dan motivasi, dan bagaimana pengalaman seseorang membentuk pemikiran dan motivasi tersebut.
- c) Analisis naratif linguistik: analisis yang berfokus pada bahasa spesifik yang digunakan oleh narasumber dan dianalisis dengan analisis wacana.

Lebih lanjut, langkah-langkah melakukan analisis naratif adalah sebagai berikut (Chism et al, 2008:13-14):

- a) Kumpulkan cerita mengenai individu lewat berbagai sumber data
- b) Kumpulkan informasi dalam konteks dimana cerita ini terjadi
- c) Ceritakan kembali pengalaman ini dalam suatu kerangka umum yang menghubungkan elemen-elemen kunci, kisah kronologis, atau mengeksplorasi tema yang lebih luas
- d) Mengeksplorasi makna dari cerita ini, dengan masukan dari peneliti maupun narasumber

Hal yang perlu diperhatikan dalam analisis naratif adalah semua tanda berbicara, termasuk nada bicara narasumber. Jika narasumber memberikan penekanan atau mengulang-ulang informasi dalam

pembicaraan, maka hal ini menunjukkan kalau isu tersebut sangat penting. Jika narasumber memberikan informasi secara spontan, tanpa ditanya, maka ini menandakan kalau topik tersebut relevan atau bermakna lain yang personal dalam topik pembicaraan. Jika narasumber menolak, menghindar, atau diam atas pertanyaan, ini menandakan kalau narasumber menolak topik tersebut atas alasan tertentu (Hannula, 2006:227).

Penelitian ini menggunakan analisis narasi sebagai metode analisis karena tiga alasan:

- 1) Analisis naratif dipilih karena sesuai dengan konteks penelitian sekarang, yaitu pengalaman peristiwa di masa lalu. Studi ini dilakukan pada tahun 2012 sementara kejadian erupsi Merapi terjadi dua tahun yang lalu. Menurut Scott dan Usher (2011:126), sentral dari analisis naratif adalah waktu. Ini mengapa metode ini sering disamakan dengan metode analisis biografis.
- 2) Penelitian sekarang berkaitan erat dengan kronologis yaitu dari pusat informasi di Merapi, ke Satgaspen TNI, menuju Puspen TNI, media, dan akhirnya ke masyarakat. Adanya kronologis ini merupakan kerangka umum yang merupakan bagian dari tahapan penelitian yang menggunakan analisis naratif.
- 3) Penelitian ini melibatkan banyak narasumber sehingga memungkinkan ditemukannya berbagai penafsiran dari berbagai perspektif. Untuk memahami perspektif ini dibutuhkan konteks dan metode penelitian kualitatif yang sesuai dengan konteks adalah metode analisis naratif.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh baik melalui studi dokumen maupun wawancara, selanjutnya dipindahkan dan diubah menjadi bentuk tulisan (transkrip data). Setelah transkrip dilakukan, dilaksanakan pengelompokan data. Data yang berhubungan dipilih sementara yang tidak berhubungan tidak dimasukkan. Setelah data dikelompokkan, dilakukan pembuatan matriks perbandingan hasil

wawancara. Selama proses ini, peneliti melakukan cek dan pengecekan ulang dengan saling membandingkan antar data. Terakhir dibuat kesimpulan mengenai data. Hal ini penting terutama dalam membandingkan paparan narasumber mengenai media massa dengan dokumen berita itu sendiri. Dengan cara ini diperoleh kualitas informasi yang berbeda sehingga dapat disimpulkan apakah terjadi pengurangan atau penambahan kualitas informasi.

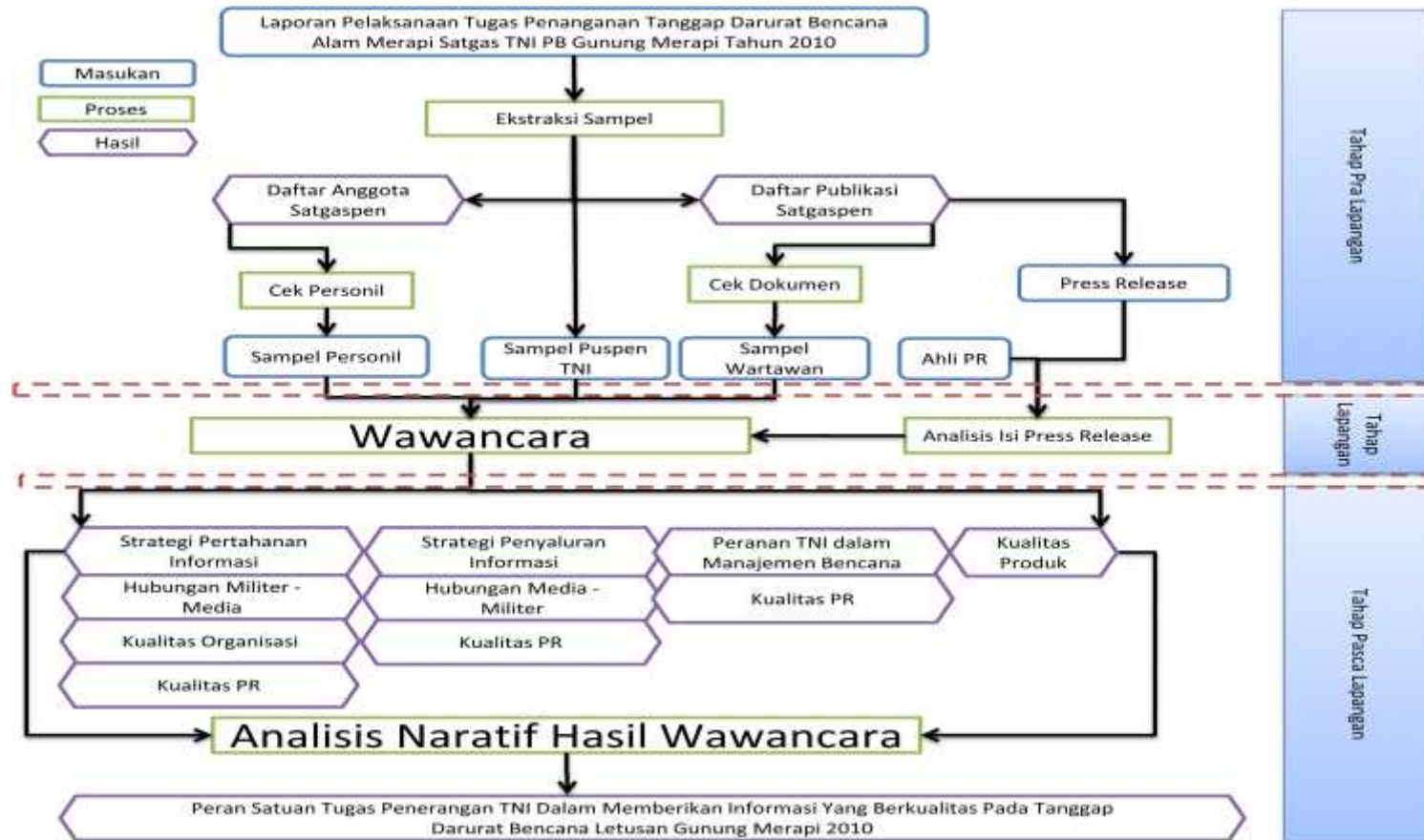
Berdasarkan gambaran di atas maka langkah-langkah pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengumpulkan cerita mengenai individu lewat berbagai sumber data
2. Mengumpulkan informasi dalam konteks dimana cerita ini terjadi dalam berbagai literatur/laporan Satgaspen maupun Puspen dan terbitan media massa
3. Menceritakan kembali proses perjalanan informasi beserta pengalaman dan pendapat narasumber dalam suatu kerangka umum yang menghubungkan elemen-elemen kunci sejalan dengan kriteria-kriteria yang telah dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian
4. Mengeksplorasi makna dari cerita ini dengan cara membuat kesimpulan akhir penelitian

Lebih lanjut, langkah-langkah ini dijabarkan secara lebih detail dalam Gambar 3.1.

### 3.6 Diagram Alir Prosedur Kerja Penelitian

Gambar 3.1 Diagram Alir Prosedur Kerja Penelitian



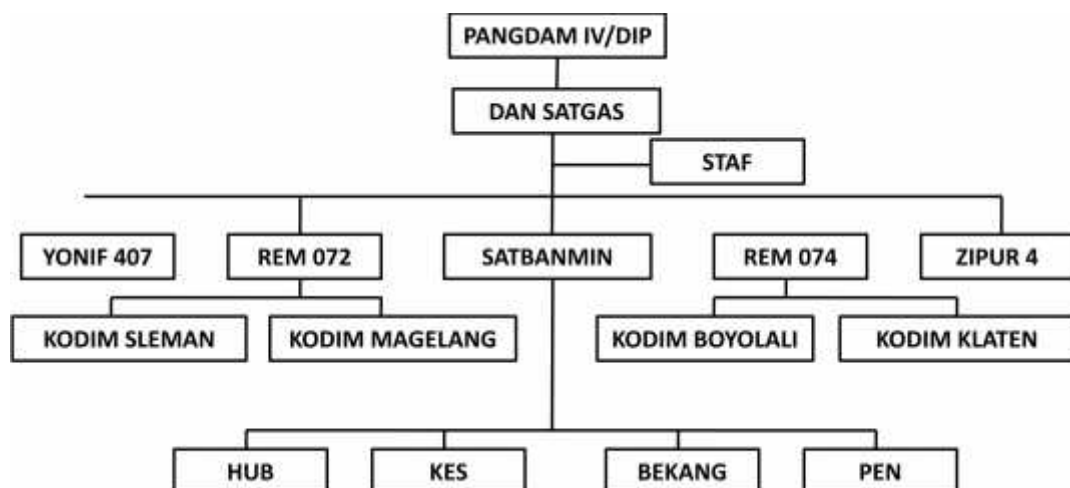
## BAB 4

### ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Satgas TNI PB dan Satgaspen TNI PB Gunung Merapi

##### 4.1.1 Satgas TNI PB Gunung Merapi

Satgas TNI PB Gunung Merapi di bentuk berdasarkan Surat Telegram Rahasia Panglima TNI No STR/631/2010 Tanggal 05 Nopember 2010 tentang Perintah Membantu Penanggulangan Korban Bencana Alam Gunung Merapi di wilayah Yogyakarta.



Gambar 4.1 Bagan Organisasi Satgas TNI PB Merapi

Pada tanggal 06 Nopember 2010 Satgas TNI PB Gunung Merapi secara resmi dibentuk dengan Brigjen TNI Syahiding selaku Komandan Satuan Tugas (Dansatgas), sehari hari beliau menjabat sebagai Kepala Staf Divisi Infantri 2 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kasdivif 2 Kostrad), mendirikan Posko di Gedung Pusat Informasi Pengembangan Pemukiman dan Bangunan (PIP2B) Yogyakarta, setelah mendapatkan data sementara dan petunjuk dari Dansatgas TNI PB maka satuan yang tergabung langsung melaksanakan kegiatan bantuan

kemanusiaan dengan mendirikan pos pos pengungsian, gelar komunikasi dan dapur lapangan serta membantu evakuasi.

Satgas TNI PB Gunung Merapi berjumlah 4993 orang Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 06 Nopember 2010 sampai dengan 25 Nopember 2010. Sejak tanggal 25 Nopember 2010 anggota Pembekalan Angkutan Komando Daerah Militer V Brawijaya (Bekangdam V/BRW) ditarik kembali untuk persiapan meletusnya Gunung Bromo sehingga jumlah personel TMT 26 Nopember 2010 menjadi 4944 orang. Satgas TNI PB Gunung Merapi Melaksanakan Penanganan Tanggap Darurat Bencana akibat meletusnya Gunung Merapi mulai 6 Nopember 2010 sampai dengan selesai di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY dengan membentuk Pasukan Evakuasi, Pasukan Pengendalian Penduduk dan Satuan Non Militer dalam rangka mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi normal.

a. Pasukan Evakuasi terdiri dari Pasukan Satuan Tempur (Satuan Infanteri, Marinir, Paskhas) bertugas

- 1) Blokade jalan kearah daerah rawan bencana yang telah ditentukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (20 Km).
- 2) Evakuasi penduduk yang masih berada di daerah rawan bencana yang telah ditentukan oleh BNPB (20 Km).
- 3) Mencari korban yang masih tersisa/tertinggal dikawasan rawan bencana yang telah ditentukan oleh BNPB (20 Km).
- 4) Pengamanan daerah yang ditinggal pengungsi pada jarak aman.
- 5) Evakuasi paksa penduduk yang masih bertahan di daerah rawan bencana yang telah ditentukan oleh BNPB ( 20 Km).

b. Pasukan Pengendalian Penduduk terdiri dari Pasukan Tempur, Pasukan Satuan Bantuan Tempur dan Satuan Komando Kewilayahan bertugas :

- 1) Memperlancar jalur distribusi logistik pengungsi.
- 2) Memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak.
- 3) Memperbaiki/menyiapkan sarana dan prasarana di lokasi pengungsian.
- 4) Menyiapkan/gelar komunikasi untuk mendukung kegiatan Satgas.
- 5) Menyiapkan air bersih untuk mendukung dapur lapangan/umum.
- 6) Menyiapkan dapur lapangan/umum.
- 7) Menyiapkan dan mendirikan Rumah Sakit Lapangan.
- 8) Menyiapkan obat-obatan untuk pengungsi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Daerah
- 9) Membuat kamar mandi dan toilet serta sumur bor

c. Satuan Non Militer/Personel Pendukung yang terdiri dari rakyat terlatih, Relawan, Palang Merah Indonesia (PMI), Search and Rescue (SAR), RAPI, Forum Komunikasi Pemuda Pemudi Indonesia (FKPPI), Pemuda Pancasila (PP), LSM yang bertugas membantu pasukan evakuasi dan pasukan pengendali penduduk (Laporan Purna Tugas Satgas TNI PB Gunung Merapi).

#### **4.1.2 Satgaspen TNI PB Gunung Merapi**

Satgas TNI PB Gunung Merapi diperkuat oleh Satuan Tugas Penerangan TNI (Satgaspen TNI) yang bertugas untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan Satgas TNI PB Merapi. Satgaspen TNI merupakan unsur pelaksana dalam susunan organisasi Pusat Penerangan TNI (Puspen TNI). Satgaspen TNI dibentuk sesuai kebutuhan. Satgaspen TNI dipimpin oleh seorang komandan yang disebut Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen). Dansatgaspen TNI dijabat oleh seorang Perwira Menengah TNI (Pamen TNI) berpangkat Letnan Kolonel. Tugas dan kewajiban seorang Dansatgaspen TNI antara lain:

- a. Menyiapkan data dan informasi aktual secara cepat di daerah penugasan.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan staf dan fungsi terkait guna memperoleh informasi secara cepat.
- c. Menyebarkan informasi yang akurat dan tepat waktu baik ke lingkungan internal TNI maupun eksternal (masyarakat luas).
- d. Mengkoordinasikan dan menyiapkan konferensi pers Komandan/ Panglima/ Pimpinan di daerah penugasan.
- e. Mengeliminasi informasi lawan dan memperbesar informasi sendiri guna memperoleh keunggulan informasi.
- f. Melaksanakan pengamatan berbagai pemberitaan media massa di daerah penugasan.
- g. Mengoordinasikan dengan unsur aparat penerangan Pemerintah Daerah (Pemda), TNI, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) daerah setempat untuk mencegah terjadinya disinformasi serta sosialisasi informasi yang benar kepada masyarakat.
- h. Menjalin kerjasama dengan unsur media massa setempat guna membangun opini positif dalam rangka terlaksananya tugas pokok satuan.
- i. Membuat laporan kepada Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) tentang perkembangan yang terjadi di daerah penugasan (Puspen TNI, 2009:109-110).

Satgaspen Puspen TNI berjumlah 5 orang yang bertugas tanggal 9 November 2010 sampai 9 Desember 2010 terdiri dari:

- a. Letkol Arh. Hari Mulyanto, Kepala Subdinas Kegiatan Peliputan dan Publikasi (Kasubdisgiatblik) Dispenum Puspen TNI.
- b. Lettu Caj. Ari Yusviki Noorhayati, S. Sos, Perwira Urusan Pengendalian Berita Media massa Cetak Subdinas Kegiatan Peliputan dan Publikasi (Paurdalbra Medtak Subdisgiatblik) Dispenum Puspen TNI.

- c. Serka Amir Mahari, Bintara Fotografer Subdinas Pengaturan Peliputan Dinas Produksi dan Dokumentasi (Bafotografer Subdisturlip Disproddok) Puspen TNI.
- d. Serda Ansori, Bintara Kameramen Subdinas Pengaturan Peliputan Dinas Produksi dan Dokumentasi (Bakameramen Subdisturlip Disproddok) Puspen TNI.
- e. PNS Maryoto, Tamtama Pengemudi Bagian Tata Usaha Sekretariat Pusat Penerangan (Tamudi Bagtaud Setpuspen) TNI. Sejak tanggal 24 Nopember 2010, PNS Maryoto diganti oleh Sertu Ngadimin, Bintara Pengemudi (Bamudi) Bagtaud Setpuspen TNI.

Publikasi yang berhasil dilakukan oleh Satgaspen TNI antara lain:

- a. 15 Siaran Pers tentang kegiatan Satgas. Dikirimkan ke Puspen TNI melalui email, untuk selanjutnya didistribusikan ke media massa cetak dan elektronik nasional, dengan judul :
  - 1) Dapur lapangan TNI untuk pengungsi Merapi.
  - 2) Satgas Brigade Khusus TNI PB Merapi.
  - 3) TNI gunakan Alkapsus evakuasi korban Merapi.
  - 4) Code tanggap merapi.
  - 5) Satgas TNI Gunakan Mobil Pintar Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) Bantu Korban Merapi.
  - 6) Gelar perhubungan Satgas TNI PB Merapi.
  - 7) TNI perketat daerah rawan merapi.
  - 8) TNI bantu warga bersihkan desa lereng merapi.
  - 9) Dansatgas TNI tinjau langsung pos pengamatan merapi.
  - 10)Dharma pertiwi bantu korban merapi.
  - 11)Dansatgas TNI pimpin penyisiran di lereng Merapi.
  - 12)Peranan Zeni Tempur (Zipur) dalam penanggulangan bencana merapi .
  - 13)TNI bersihkan Candi Borobudur.
  - 14)TNI perkuat tanggul bantaran Kali Code.
  - 15)TNI *excellent* tangani bencana Merapi.

- b. 13 kali wawancara dengan media massa nasional :
- 1) Rabu, 10-11-2010, wawancara Dansatgaspen dengan Tribunnews.com.
  - 2) Rabu, 10-11-2010, wawancara Dansatgaspen dengan Rakyat Merdeka On Line.
  - 3) Kamis, 11-11-2010, wawancara Dansatgaspen dengan Rakyat Merdeka On Line.
  - 4) Sabtu, 13-11-2010, wawancara Dansatgas TNI dengan Kompas On line.
  - 5) Minggu, 14-11-2010, wawancara Dansatgaspen dengan Rakyat Merdeka On Line.
  - 6) Senin, 15-11-2010, wawancara Dansatgaspen dengan Rakyat Merdeka On Line.
  - 7) Senin,15-11-2010, wawancara Dansatgas TNI dengan Radio Elshinta.
  - 8) Senin,15-11-2010, wawancara Dansatgas TNI dengan Metro TV (Kontributor Magelang).
  - 9) Senin, 22-11-2010, wawancara Dansatgaspen dengan Rakyat Merdeka Online.
  - 10) Senin, 22-11-2010, wawancara Dansatgaspen dengan Kompas Online.
  - 11) Rabu, 29-11-2010, wawancara Dansatgaspen dengan Rakyat Merdeka Online.
  - 12) Kamis, 02-12-2010, wawancara Dansatgas TNI dengan Kantor Berita Radio 68 H.
  - 13) Jumat, 03-12-2010, wawancara Dansatgaspen dengan Vivanews.com.
- c. Klarifikasi informasi kepada TV One tentang keberadaan sejumlah pengungsi di Magelang.

## 4.2 Kualitas Informasi yang Dihasilkan Satgaspen TNI

### 4.2.1 Menurut Personil Satgaspen TNI

Satgaspen TNI bukanlah satu-satunya saksi pertama dalam peristiwa Merapi. Ada banyak pihak terlibat langsung dan membuat berita mengenai peristiwa tersebut. Walau begitu Satgaspen TNI, sebagai pihak perwakilan dari TNI, merupakan pihak yang memiliki kepentingan paling kuat terhadap ketahanan informasi berdasarkan tugas yang diembannya dari Puspen TNI.

Dalam komando Satgas TNI PB Merapi, anggota Satgas dari Puspen TNI ada lima orang yaitu Letkol Arh Hari Mulyanto, Lettu Caj Ari Yusviki Noorhayati, Serka Amir Mahari, Serka Ansori, dan Maryoto. Dua narasumber yang dihubungi dalam penelitian ini adalah Letkol Arh Hari Mulyanto, Komandan Satgaspen TNI, dan Lettu Caj Ari Yusviki Noorhayati, S.Sos, Perwira Pers Satgaspen TNI. Di Puspen TNI, Letkol Arh Hari Mulyanto menjabat sebagai Kasubdisgiatblik Puspen TNI, sementara Lettu Caj Ari Yusviki Noorhayati menjabat sebagai Paurdalbra Medtak Puspen TNI.

Latar belakang Komandan Satgaspen TNI digambarkan sebagai berikut:

*Jadi untuk Satgaspen, saya mendapat tugas Satgas PB Merapi yang dipimpin oleh Brigjen Saidi. Saya mendapat tugas untuk bergabung disana dalam rangka memberitakan kegiatan Satgas TNI ini selama 1 bulan. Anggota saya terdiri dari Pers, Kameraman, Fotografer, dan satu Supir, jadi otomatis cuma lima orang. Tetapi dalam organisasi Satgas PB, saya tidak disebut sebagai Dansatgas, tapi saya disebut Juru Bicara Satgas. Terkait dengan pertanyaan tadi, saya mendapatkannya langsung dengan terjun ke lapangan. Saya selalu mendampingi Dansatgas kemanapun di lapangan. Jadi saya selalu melekat di sana dan setelah peninjauan*

*selalu di informasikan ke publik. Evaluasi selalu dilakukan setiap sore dan selalu saya ikuti untuk mengetahui perkembangan (H.M).*

Sementara itu, latar belakang Perwira Pers TNI digambarkan sebagai berikut:

*Saya kesana karena Merapi itu kan banyak bantuan dari luar negeri. Kemudian saya berangkat dengan Letkol Hari. Setiba di sana, saya lapor ke Dansatgas PB Merapi, kemudian setelah itu saya lapor ke BNPB karena saya diminta untuk jadi interpreter. Dari Dansatgas saya diperbantukan saja di Satgas PB nya. Perintahnya dari Satgas saya tetap di Satgas (A.Y.N).*

Walaupun terdapat perbedaan latar belakang penugasan, kedua narasumber mampu berinteraksi dengan baik di lapangan.

Mengenai kecepatan, Dansatgaspen TNI menunjukkan adanya usaha untuk memberikan informasi secepat mungkin. Usaha yang dilakukan bersifat kreatif sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

*Kecepatannya, saya selaku orang penerangan berusaha secepat mungkin. Saya buat siaran pers, saya arahkan kalau ada media massa ke Dansatgas. Saya mengundang media massa-media massa nasional dan lokal untuk meliput sendiri. Contohnya pada hari kedua, ada TVOne, langsung menayangkan secara live, yaitu tentang dapur lapangan TNI. Berbagai cara saya lakukan agar masyarakat tahu yang dilakukan TNI (H.M).*

Sementara itu, Perwira Pers menghubungkan kecepatan informasi dengan Kominfo dan peralatan yang tersedia:

*Kita kerjasama dengan Kominfonya. Jadi untuk informasi-informasinya kita dapat cepat. Kebetulan Wakapuspen duluan Setyo Sularso, kami sama beliau diperintahkan tinggal di situ. Ada mobil. Kami dari Puspen juga bawa kendaraan (A.Y.N).*

Kutipan di atas mengandung pengamatan kalau Satgaspen TNI bukan hanya memperoleh informasi langsung dari Satgas TNI PB namun juga dari Kominfo. Keduanya saling bersambut, Media Center dan Satgas TNI PB memberikan informasi awal untuk peliputan, kemudian Satgaspen TNI bergerak dengan kendaraan yang ada, lalu informasi diperoleh kemudian diberitakan lewat siaran pers.

Terkait dengan bagaimana informasi dikumpulkan di lapangan, Dansatgaspen TNI menyatakan:

*Prosesnya saya kumpulkan dari masyarakat langsung maupun ikut evaluasi setiap sore dari para relawan dan instansi terkait. Disamping itu dari posko-posko pengungsian. Misalnya yang terbesar di Mabuharjo, berapa jumlah pengungsinya, berapa bantuan yang datang. Disamping itu, data yang setiap hari dilaporkan di Posko (H.M).*

Perwira Pers melihat proses pengumpulan data dari perspektif lapangan, yaitu langsung ke lokasi sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

*Kita kan ada HT, jadi bisa memonitor keadaan di HT. jadi kita dekat dari Media Center, jadi setiap hari dapat update dari Kominfo. Kami juga ke lapangan, lihat kondisi. Kita melekat di Dansatgas. Kalau Dansatgas ke atas, kita ke atas. Dansatgas PB gantian dengan Dansatgaspen. Kalau ikut Satgas PB, saya standby di pos. Ada kantor di atas itu untuk TNI-Polri dari Kominfo (A.Y.N).*

Dansatgaspen TNI menggambarkan keakuratan informasi dengan menyatakan adanya masalah berkaitan dengan metode pengumpulan data dari berbagai pihak dan menekankan kalau sumber data yang digunakannya bukan yang 'akurat', tetapi yang 'resmi' :

*Keakuratan informasi di lapangan memang dalam PB di Merapi ini karena dilakukan berbagai instansi, banyak perbedaan dalam data.*

*Contohnya gini, kodim mendata pengungsi, pemda mendata pengungsi, dan polisi juga mendata pengungsi. Misalnya di Mangunharjo, sampai terjadi selisih sangat besar sampai 10 ribu pengungsi. Kemudian yang kedua adalah penyaluran bantuan. Simpang siurnya data karena, satu ada donor yang langsung menyerahkan ke pengungsi dan ada juga yang menyalurkan bantuan ke posko. Yang benar adalah harus ke posko, tetapi kadang kita tidak bisa menolak jika ada yang ingin langsung ke pengungsi. Termasuk ada yang misalnya begini, salah satu SMA di Yogya, disitu digunakan untuk penampungan. Tapi yang membantu itu alumnusnya yang merasa mampu, mereka langsung menyumbang ke situ. Jadi data tidak hanya ada satu, tetapi kita tetap berpedoman pada yang tercatat. Yang tidak resmi sendiri saya yakin banyak (H.M).*

Perwira Pers sendiri merujuk pada informasi kualitatif yang dikumpulkan di lapangan dengan menekankan sisi akurasi ketimbang sisi formalitas:

*Biasanya kita dapat informasi kalau kali Code banjir misalnya, kita tahu dari BNPB, kita langsung ke lokasi, kita lihat keadaannya seperti apa, bagaimana personil TNI menanganinya. Begitu selesai mengamati, baru dibuat beritanya lalu kita kirim. Karena malam hari, baru bisa dikirim pagi (A.Y.N).*

Kutipan di atas juga mengandung rujukan pada kekuatan informasi kualitatif terhadap informasi kuantitatif. Situasi bencana tampak mendukung agar informasi kualitatif dikumpulkan langsung di lapangan sementara informasi kuantitatif dikumpulkan dengan melihat pada data-data resmi.

Sellnow et al (2000:31) merujuk pada pentingnya personil manajemen kedaruratan untuk membuat keseimbangan antara informasi

kuantitatif dalam bentuk presisi, prediktabilitas, dan probabilitas, dan informasi kualitatif dalam bentuk pola dan perkiraan. Kedua bentuk informasi harus disajikan secara berimbang dan terlihat dari wawancara kalau informasi kuantitatif diasosiasikan dengan resmi tidaknya informasi tersebut, berbeda dengan informasi kualitatif yang dikumpulkan langsung dari lapangan:

*Posko itu yang sumber datanya resmi. Karena saya mencatat Posko itu yang didirikan secara resmi oleh Pemerintah. Jadi data yang akurat yang saya gunakan adalah data resmi, jadi pertanggung jawabannya enak (H.M).*

Secara detail, Perwira Pers menggambarkan bagaimana proses pengumpulan data dari setiap siaran pers yang dikeluarkan oleh Satgaspen TNI. Proses ini antara lain:

**1) Dapur lapangan TNI untuk pengungsi Merapi.**

*Kalau dapur lapangan itu kebetulan lokasinya berada di dekat tempat kita tinggal. Itu setiap hari. Kita datang ke lokasi pagi-pagi. Kita lihat dapur lapangan itu seperti apa, proses distribusinya, proses masakannya, karena kita bawa satu tim, kemanapun kita pergi selalu bareng-bareng. Ada kameramen dan ada fotografer. Dari saya sendiri hanya rekorder, kertas, sama pulpen. Karena kita terjun langsung kita amati langsung. Seperti jumlah korbannya berapa, kita bisa lihat langsung dari situ. Dari Poskonya masing-masing. Dapur lapangan itu gak hanya satu, ada banyak, itu dibagi untuk Posko mana. Jadi Posko yang tempat kita tinggal, itu melayani Posko yang di UPN. Jadi ia hanya melayani UPN saja. Ada beberapa yang memberi harapan, tapi kita lebih pada mencitrakan TNI secara positif.*

**2) Satgas Brigade Khusus TNI PB Merapi.**

*Karena kita bergabung di Satgas PB. Begitu ia dibentuk, berapa personil, pembagian satgas bagaimana. Karena kita kan berkumpul satu tempat dengan PB. Melalui radio komunikasi. Kami di handphone dengan Satgas PB. Jadi kita minta datanya langsung dari staf satgasnya. Setiap sore sama pagi itu ada laporan. Apel laporan. Jadi setiap satuan yang di lapangan apel bergantian ke posko radio. Kita ikut memonitor. Kita bisa menanyakan seperti apa.*

**3) TNI gunakan Alkapsus evakuasi korban Merapi.**

*Kita kan kemarin diberi tahu menggunakan apa. Jadi dari yang satuan-satuan itu ada kekuatannya berapa. Sekiranya dianggap menarik baru kita beritakan. Kalau keakuratannya, ya akurat, karena kita dapatnya dari pihak satuan. Yakin datanya akurat. Lebih ke pencitraan TNI. Kalau pada saat itu mungkin karena pengen tahu berita terbaru, mungkin dibaca masyarakat. Mereka membacanya lewat koran.*

**4) Code tanggap merapi.**

*Kita dapat informasi lebih dulu dari BNPB ke Kominfo. Begitu kita tahu akan ada kegiatan ini kita langsung merapat ke lokasi. Akuratnya dari BNPB. Sifatnya kualitatif. Kita langsung ke lokasi jadi mengalami.*

**5) Satgas TNI Gunakan Mobil Pintar SIKIB Bantu Korban Merapi.**

*Inikan datanya dari Kostrad TNI Malang. Pertanyaan di Mabes kita ini kemudian merapat ke Posko, dimana dan kapan, dari kita melaksanakan ini, kita mengikuti. Hari Selasa jam segini, kita ngikut. Kita di Posko terbesar. Lumayan lama ikut mobil, tapi tidak sampai satu hari. Kita ikut pada saat masyarakat baca ada berita onlinenya*

ada pertunjukan dari personilnya itu sendiri. Bahkan ada yang menanyakan kan harusnya muter, tapi mereka gak muter ke semua Posko karena sesuatu dan lain hal. Mereka membantu menghibur korban. Memang di tempat pengungsian sudah ada hiburan tapi tidak layak sekali. Itu program yang mengelola Kostrad Malang.

**6) Gelar Perhubungan Satgas TNI PB Merapi.**

Ini kebetulan karena satuan ada di Posko yang lain di Posko jadi kita bisa hubungi informasi. Sudah punya alat perhubungan. Semingguan sudah jalan. TNI dan BNPB untuk kelancaran TNI dan BNPB. Kalau Kominfo saya belum tahu. Kalau BNPB yang masuk ada beberapa chanel. Bermanfaat banget. Jadi kita bisa tahu situasi-situasi di lapangan. Kalau ada radio komunikasi dan perhubungan ini kita bisa tahu.

**7) TNI perketat daerah rawan merapi.**

Ini kita meninjau langsung ke atas dengan Kopassus TNI. Kan dapat datanya dari BNPB, udah seberapa parah terus kita kerjasama dengan Kopassus ke atas. Waktu itu sih sudah langsung bergerak. Karena panas di atas, tergantung kondisi di lapangan. Kita gak bisa bawa badan doang ke atas. Kita dipandu dengan kopassus karena mereka sudah ada yang ke atas duluan. Yang sampai di atas pak Hari dan rekan-rekan, saya tidak. Ada pro dan kontra juga karena ada lokasi yang tidak dapat dimasuki badan doang. Karena ada yang tidak diperbolehkan jadi kita gak tau. Tapi tetap ada juga masyarakat yang nekad naik. Karena walaupun sudah diingatkan tetap saja ingin mengambil harta benda.

**8) TNI bantu warga bersihkan desa lereng merapi.**

Ini dari Magelang. Prosesnya kita sama Zipur. Pakai beko. Karena punya alat, Zipur memakai bekonya selesai baru kita kembali ke

*Posko baru kita buat laporan. Karena kita langsung ninjau jadi akurat. Kalau yang tadi membersihkan, masyarakat bisa tahu kalau sudah dibersihkan, jadi gak banyak debu.*

**9) *Dansatgas TNI tinjau langsung pos pengamatan merapi.***

*Kita sampai Satgas TNInya langsung mendatangi ke Boyolali langsung ke atas. Kita pakai kendaraan Satgas TNI PB. Kan ada beberapa lokasi yang ada plang. Ada yang merusak plang, masyarakat ada yang dapat masuk juga. Dari laporan satuan, kan ada yang sudah dipasang tanda bahaya, mereka melakukan patroli. Ada yang melihat masyarakat mencoba masuk atau mencopot plang.*

**10) *Dharma pertiwi bantu korban merapi.***

*Ini yang dari Surabaya. Itu kita dapat informasi kalau ada yang mau beri bantuan, kan dari Surabaya butuh waktu. Jadi pas pagipaginya itu kita bisa mengikuti ibu-ibu Darma Pertiwi. Ngasi bantuan, menanyakan kondisi masyarakat seperti apa, menanyakan yang dibutuhkan di tempat pengungsian itu apa. Pakaian, makanan, selimut. Mengandung harapan, karena dengan datangnya ibu-ibu inikan, mereka berharap dapat bantuan yang sangat dibutuhkan.*

**11) *Dansatgas TNI pimpin penyisiran di lereng Merapi.***

*Ini waktu ternak-ternak penduduk yang gosong, yang kena debu dan asap, kalau gak dibakar bisa menyebarkan virus dan kuman-kuman. Jadi dansatgas saat itu meliputi. Masih ada bangkai-bangkai ternak warga. Dansatgas dan Polri ke lokasi-lokasi itu dan diambil untuk dibakar. Itu sebenarnya kita sudah tahu sejak lama kalau ada banyak bangkai, tapi karena kegiatan yang harus dijalani*

banyak jadi tidak terlalu cepat. Dari satuannya tadi laporannya. Terkadang si ada rapat antar pemimpin satuan.

**12) Peranan Zipur dalam penanggulangan bencana merapi .**

*Ini ditulis orang Zipur sendiri tapi diperhalus oleh Dansatgas. Itu sudah pasti akurat. Ditinjaunya yang sama berita yang pakai beko tadi. Ini lebih memperdalam peranan satuan zeninya. Ini lebih pada pencitraan saja.*

**13) TNI bersihkan Candi Borobudur.**

*Ini kita tinjau langsung dengan beberapa satuan. Jadi kita benar-benar ke Candi Borobudurnya. Kami memperoleh info kalau dari beberapa satuan ingin membersihkan debu. Kita tiba, baru mau mulai. Karena itu candi, gak sembarangan pakai alat, jadi pakai kuas. Debunya dikumpulkan dimasukkan ke karung. Informasinya pasti kita selain melihat-lihat juga nanya-nanya. Ini lebih ke situsnya sendiri.*

**14) TNI perkuat tanggul bantaran Kali Code.**

*Ini yang berkaitan dengan banjir lahar di Code sebelumnya. Jadi daripada nanti banjir, pasir itu dikeruk dengan personil TNI terus dimasukkan karung lalu disimpan di pinggir kali. Informasi ini dari BNPB karena banjirnya sudah satu atau dua hari sebelumnya. TNI bergerak kesana, Satgaspen ikut. Kalau misalnya bibir sungainya gak dikeruk, kan bisa masuk ke rumah warga karena waktu itu kan lagi hujan, takutnya semakin parah.*

**15) TNI excellent tangani bencana Merapi.**

*Hari terakhir kita mau selesai penugasan, jadi kegiatan yang sudah dilakukan Satgas TNI kita himpun di siaran pers ini. yang*

*menyatakan excellent itu kepala BNPB. Ia kan berkunjung ke posko satgas. Ini lebih ke pencitraan (A.Y.N).*

Deskripsi di atas menunjukkan pola yang jelas dalam pengumpulan informasi dari lapangan yang menunjukkan adanya keseimbangan data kuantitatif dan kualitatif. Kutipan di atas menunjukkan tingginya tingkat retensi data kualitatif dibandingkan data kuantitatif dan kalau data kualitatif dapat lebih mudah dijelaskan karena diperoleh langsung dari lapangan.

Adalah jelas kalau TNI harus juga memahami bahwa sesuatu yang resmi berarti sesuatu yang akurat. Adanya pandangan bahwa informasi resmi atau kuantitatif pada gilirannya juga merupakan informasi yang akurat digambarkan oleh komentar berikut:

*Informasi itu saya berusaha mendapatkan secara kualitatif, cek orang per orang. Seperti di Mangunharjo, jadi disini Dansatgas minta diulang sekali lagi karena selisih perhitungan tadi. Kondisi bencanakan orang tidak tertib. Seakurat mungkin kami dapatkan data dengan cek dan ricek. Perbedaan jumlah pengungsi itu saja merepotkan berbagai bidang. Pencatatan itu bukan hanya jumlah pengungsi, tapi juga jumlah ternak. Warga kadang tidak patuh dengan aparat. Jadi pendataannya susah. Ternyata ada yang diatas dengan ternaknya. Tapi sekali lagi, satgaspen selalu bertopang dengan yang ada di lapangan, yang kelihatan mata (H.M).*

Keberadaan kebutuhan untuk cek dan ricek tampak sebagai bagian kaidah jurnalistik yang juga melekat pada Satgaspen TNI.

Walau begitu, muncul kesan kalau hanya data kuantitatif yang membutuhkan cek dan ricek. Hal ini tercermin dalam kutipan di atas yang merujuk pada adanya selisih perhitungan. Dengan kata lain, selisih perhitungan lah yang mendorong dilakukannya cek dan ricek.

Peran media massa sendiri sangat membantu bagi tugas penerangan TNI. Hal ini disebutkan oleh Perwira Pers:

*Sangat membantu. Contohnya TVOne dari Jakarta. Kan ada yang bertugas di sana. Kita menghubungi Jakarta, dari TVOne ikut meliput juga. Dari korlap TVOnenya kita dikasi nomor telepon tim yang di Yogya. Cepat (A.Y.N).*

TNI dan media massa memiliki kepentingan utama yang berbeda dalam mengumpulkan informasi. Kepentingan utama media massa adalah bagaimana informasi, dalam bentuk apapun, dapat disalurkan pada masyarakat. Kepentingan utama TNI dalam mengumpulkan informasi ditunjukkan dalam kutipan berikut:

*Kita memberi informasi sedapat mungkin yang menenangkan. Kalau kita tidak memberi informasi yang tegas dan jelas, mereka bisa tambah bingung. Jadi kita membantu khususnya pada media massa. Sebagai contoh, Merapi itu pertama meletus, radius 20 km harus diungsikan. Dari 20 km bertahap menjadi 15 km, tapi dalam hal ini masyarakat masih banyak yang tidak patuh padahal ini bahaya, masyarakat tentunya akan jadi korban. Tapi kenyataannya mereka memakai jalan-jalan tikus. Kita himbau, kita beri keyakinan agar tidak memasuki wilayah bahaya tersebut. Masyarakat kadang tidak mematuhi larangan sehingga masih banyak yang melanggar. Aparat inikan patrolinya di jalan-jalan besar. Kita tidak dapat mengawasi satu per satu pengungsi juga. Jadi inilah yang terjadi di lapangan (H.M).*

Militer dimanapun di dunia ketika dalam situasi bencana memang menunjukkan pentingnya mengedepankan informasi yang bersifat menenangkan masyarakat. Jika masyarakat tenang, mereka dapat diarahkan dengan baik sehingga mereka dapat terhindar dari ancaman yang hadir.

#### 4.2.2 Menurut Personil Puspen TNI

Aspek dari struktur aliran informasi ini berkaitan erat dengan sifat TNI sendiri. Sifat hirarki formal dari Satgaspen TNI adalah langsung bertanggungjawab pada Puspen TNI. Hal ini menjadi landasan kuat untuk ketahanan informasi dari internal TNI sendiri.

Seperti telah digambarkan oleh narasumber dari TNI sebelumnya, Puspen TNI menerima informasi langsung dari Satgaspen TNI. Karena keduanya berada dalam satu kerangka yaitu TNI, maka dapat dipastikan kualitas informasi tetap terjaga dalam proses transfer.

MS dari Dispenum Puspen TNI menyatakan bahwa secara umum kualitas informasi yang dikirimkan oleh Satgaspen TNI dinilai baik:

*Saya waktu itu selalu mengikuti perkembangan. Saya rasa kualitasnya bagus karena bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang terjadi di sana dan bentuk respon TNI pada masyarakat. Jadi selama satu bulan penuh, mereka diberikan pada Satgas TNI PB. Pada waktu itu dipimpin Brigjen Syahiding. Pak Hari dan timnya menempel pada beliau. Mengenai pemberitaannya secara rutin, mengirimkan siaran pers ke Dispenum, lalu dibaca lalu dilihat layak tidaknya. Tapi secara umum, berita selalu dinilai positif oleh Puspen TNI dan dikirim ke berbagai media lalu direcord.*

*Tentang siapa saja media cetak yang diberikan itu bisa dilihat di laporan-laporan, saya tidak hapal, namun biasanya sesuai agenda mereka sendiri. Kemudian tentunya pemberitaan ini berdampak positif pada TNI sendiri. Kemudian kecepatan, cepat. Dan pada momen-momen tertentu juga menjembatani kebutuhan pers lainnya untuk pemberitaan yang ada di sana. Bahkan pernah siaran langsung di dapur umum. Bagaimana dapur umum TNI itu untuk masyarakat yang berjuang menghadapi bencana tersebut (M.S)*

Sementara itu, ES dari Dispenum Puspen TNI juga memberikan komentar serupa, namun menambahkan kalau Puspen TNI juga melakukan perbaikan pada lit sehingga dilakukan penyempurnaan.

*Berbicara masalah kualitas, itu sama saja. Informasi itu sudah memenuhi unsur-unsur berita, 5W1H, sehingga satgas mengirim informasi itu sudah memenuhi unsur itu. Cuma kita juga lihat situasi. Mungkin untuk litnya kita sempurnakan lagi.*

*Jadi dari segi kecepatan memang kan syarat mutlak, kita selalu menekankan personil puspen untuk mementingkan faktor kecepatan. Jadi mereka kirim berita secepat mungkin. Kalau pencitraan TNI semua sudah mencakup unsur itu. Mungkin walaupun ada yang menyoroti hal-hal negatif, orang bisa lihat kalau TNI itu tidak banyak bicara tapi banyak bekerja (E.S)*

Di Puspen sendiri, kualitas informasi diperbaiki lebih lanjut. Perbaikan yang dilakukan pada dasarnya tidak substansial sebagaimana dituturkan oleh M.S:

*Kebanyakan tidak substansial, hanya redaksinya, kan ada kalanya mereka, itu kan di lapangan, dengan kecepatan dan serba minim peralatan. Disitulah peran kita. Tapi bukan masalah substansi. Salah ketik, misalnya salah kalimat, seperti itu yang kita supervisi (M.S)*

Selain perbaikan kalimat atau kesalahan ketik, Puspen TNI juga memperbaiki dengan cara menambahkan pesan-pesan dari pimpinan sehingga berita menjadi lebih utuh:

*Jadi kita menerima, kadang-kadang unsur 5W1H itu sudah cukup. Kalau waktu cukup kita minta kelengkapannya. Kita juga kolaborasi. Jadi sudah dimasukkan pesan-pesan dari pimpinan sehingga masyarakat tahu. Tentunya ada penyempurnaan-*

*penyempurnaan dari kita di Puspen, agar benar-benar utuh, lengkap, dan tidak salah penafsiran (E.S).*

Dalam kasus kecepatan informasi dari Satgaspen TNI ke Puspen TNI berlangsung cepat karena telah dipersiapkan khusus untuk kasus bencana. Karena berada dalam satu sistem, dapat disimpulkan kalau kualitas informasi yang dibawa dalam jalur Satgaspen TNI ke Puspen TNI tidak mengalami perubahan mutu yang signifikan, terkait pada samanya kepentingan dari kedua pihak.

#### **4.2.3 Menurut Pakar *Publics Relation* (PR)**

Adanya pakar PR menjadi perwakilan pihak netral yang dapat menilai informasi secara objektif keilmuan dari Puspen TNI. Empat orang ahli PR masing-masing dari UPN, Universitas Sahid, UI, dan Universitas Bakrie diwawancarai untuk memperoleh penilaian mereka terkait kualitas informasi yang dikeluarkan oleh Puspen TNI.

Dosen Universitas Sahid pernah melakukan kerjasama penelitian dengan TNI sehingga dapat dipandang memiliki hubungan lebih dalam dengan TNI dibandingkan dosen lainnya. Ia menceritakan:

*Pengalaman saya dalam riset di bidang PR misalnya tentang loyalitas konsumen di bidang perikanan, saya pernah di Sahid dalam hubungannya dengan masyarakat, juga tentang strategi komunikasi di berbagai departemen seperti di PU atau di departemen perhubungan. Saya bencana tidak persis tapi ketika kasus tsunami saya pernah beberapa kali melakukan penelitian pada penanganan Aceh dalam upaya program kesehatan. Jadi bagaimana komunikasi kesehatan dapat dilakukan di Aceh. Saya juga pernah riset tentang persepsi politik di Aceh. Jadi tidak langsung pada bencana. Biasanya pada kesehatan. TNI saya pernah di riset pertahanan kemhan dalam tim yang meneliti tentang*

*isu PKI. Waktu itu tentang kekiniannya, seperti apa persepsi masyarakat sekarang tentang komunisme (T.W).*

Dosen UI sebaliknya, merupakan dosen yang lebih dekat hubungannya dengan masyarakat. Pendapatnya mengenai TNI banyak yang datang dari berita-berita media massa seperti halnya masyarakat secara umum:

*Saya secara global saja ya. Yang saya ketahui tentang TNI itu kerjanya minim, kurang baik, tidak totalitas. Fungsinya kan menjaga wilayah kedaulatan NKRI. Cuma belakangan ini dinilai tidak produktif. Setelah membaca ini, kaget juga saya pak. Ini menjadi pencerahan bagi saya, ternyata ada perspektif yang positif dari TNI. Selama ini saya menilai kalau TNI itu menunjukkan citra negatif segala macam. Mengapa? Kecewanya saya karena mereka mungkin akarnya dari konflik waktu wilayah Indonesia sebagiannya diambil oleh Malaysia, soal Ambalat itu. Nah itu, saya rasa akarnya dari situ, saya menilai TNI kerjanya minim. Oh oke, setelah membaca ini, ternyata ada penilaian positifnya di TNI (D.S.P).*

Menurut Pauchant, Mitroff, dan Lagadec (1991:27), ada enam strategi manajemen krisis yang dapat dilakukan organisasi dalam usaha meningkatkan kemampuan komunikasi krisis yaitu:

- a. Pelatihan media massa
- b. Memperbaiki *Public relations*
- c. Meningkatkan informasi pada masyarakat lokal
- d. Meningkatkan hubungan dengan kelompok penengah (Polisi, media massa, dll)
- e. Meningkatkan kerjasama atau lobi antar stakeholder
- f. Menggunakan teknologi komunikasi baru

Pada umumnya, organisasi menggunakan strategi pertama dan kedua untuk menghadapi krisis. Bagian ini mencoba memahami

bagaimana perspektif point kedua, yaitu perbaikan public relations, setelah sebelumnya melihat pada sisi media massa (point pertama).

Public relations didefinisikan sebagai “membangun hubungan baik dengan berbagai masyarakat organisasi dengan memperoleh publisitas yang membantu, membangun citra lembaga yang baik, dan menangani serta menghapus rumor, kisah, dan peristiwa yang tidak baik” (Codita, 2011:44). Walaupun sebenarnya merupakan istilah yang digunakan dalam bidang ilmu pemasaran, public relations sesungguhnya penting pula untuk organisasi lain seperti TNI. Hal ini disebutkan juga oleh dosen ilmu komunikasi Universitas Sahid:

*Kalau analisis PR, biasanya dalam prinsipnya melihat PR, orang konsennya pada pencitraan. Jadi kajian-kajian tentang PR diarahkan pada bagaimana pembentukan hubungan jangka panjang, entah itu analisis teks dari berbagai hal (T.W).*

Salah satu tujuan dari Satgaspen TNI sendiri adalah memelihara citra positif masyarakat luas terhadap TNI. Hal ini sejalan dengan tujuan dari public relations itu sendiri.

De Czege (2009:57) menyebutkan dua fakta yang harus dijadikan pandangan oleh *Public Relations* militer yaitu:

- a. Menjaga kepercayaan dan keyakinan diri sendiri dan masyarakat sekutu akan memastikan ketersediaan sumberdaya untuk misi apapun,
- b. Memenangkan penghormatan dan dukungan masyarakat di medan perang adalah kunci menyelesaikan misi dengan cepat dan berhasil.

Konsep lain yang sejalan dengan tujuan satgaspen TNI dan public relations adalah *Corporate Social Responsibility (CSR)*. CSR didefinisikan sebagai “kewajiban pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan yang melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara

keseluruhan bersama dengan kepentingannya sendiri” (Steyn, 2002:2). Satgas PB TNI secara umum merupakan lembaga yang langsung memiliki CSR karena merupakan bagian dari usaha TNI untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di waktu bencana.

Peluang untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat sangat terbuka dalam kasus Merapi, seperti diungkapkan dosen ilmu komunikasi UPN Veteran:

*Ada beberapa yang saya lakukan dalam analisis berita misalnya penelitian saya pada frame berita tentang pilkada. Melalui analisis framing diketahui bagaimana fakta disusun menjadi berita. Inikan saya tidak melakukan ini, yang saya lakukan membimbing mahasiswa terakhir dalam media massa online yang baru saya lakukan. Dari situ melihat keterlibatan masyarakat lewat citizen journalism dalam bencana Merapi. Ternyata mereka paling intens dalam aspek penanggulangan bencana, sementara pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi kurang terpampang. Kemudian analisis isi di surat kabar Kompas dan Kedaulatan Rakyat. Disana hasilnya narasumbernya banyak dari narasumber aparat keamanan dan kemudian memang mayoritas aspek tanggap darurat. Jadi artinya apa, media massa-media massa kita dan pemerintah hanya terlibat dalam masa tanggap darurat sementara yang lainnya belum. Tapi kita tahu kalau bicara bencana, harus ada rehabilitasi dan rekonstruksi, itu justru yang paling rawan. Tapi euforia di tanggap darurat padahal bencana Merapi sampai sekarang kan masih belum selesai. Kemudian disana hanya tampak media massa sendiri kurang mampu mengawal bencana dalam membuat berita (S.D).*

Kutipan di atas dengan jelas menunjukkan kalau adanya peluang dalam mengawal bencana dalam membuat berita bagi Satgaspen TNI secara khusus atau Puspen TNI secara umum dalam kasus Merapi.

Salah satu usaha awal yang dapat dilakukan dari Public Relations TNI adalah dengan menerbitkan siaran pers tentang kegiatan Satgas PB Merapi. Para pakar PR mengevaluasi siaran pers tersebut dan memberikan hasil yang berbeda-beda.

Menurut pakar dari Pusat Kajian Ilmu Komunikasi UI Depok:

*Caranya dengan media massa relationship. Itu kan salah satu strategi PR. Kalau dari segi isi beritanya, menurut saya apa yang disini telah jelas. Cara penyampaiannya dalam berita tidak ada dominasi kalau TNI ingin kelihatan, sudah balance. Buat saya ini bagus. Tidak ada masalah. Memang inikan tujuannya. Untuk memperbaiki citra karena selama ini kita melihat kinerja TNI minim. Karena melalui media massa, suatu organisasi, atau perusahaan, keluarnya dari media massa. Namanya membangun citra itu butuh waktu dan proses. Ini adalah salah satu upaya untuk menaikkan citra TNI, saya mengerti (D.M.P).*

Sebaliknya, dosen dari Universitas Bakrie memberikan kesan negatif pada siaran pers Satgaspen TNI:

*Alkapsus, itu istilah-istilah yang tidak dimengerti jurnalis. Kita harus hati-hati. Nanti jurnalis jadinya menelpon nanya apa itu alkapsus. Jurnalis harus bekerja dua kali untuk memahami berita ini. Kan tidak efisien (A.S.E).*

Adanya pandangan yang berbeda terjadi karena kedua ahli melihat dari sudut pandang berbeda. Dosen pertama melihat pada dominasi TNI dalam berita sementara dosen kedua melihat pada kerumitan berita dalam

dipahami oleh media massa. Sementara itu, ada juga dosen yang melihat dari perspektif media massa. Menurut dosen UPN:

*Kemudian ini mengenai kualitas informasi. Saya melihat dari sini, dari Puspen TNI dalam membuat berita masih belum menerapkan kaidah-kaidah profesional jurnalistik. Saya mohon maaf, karena disinikan ada kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku. Saya melihat bagian humas di Puspen, ini masih belum berpikiran seperti media massa, mereka masih berpikiran institusi. Padahal, sebagai seorang PR, ia harus bisa berpikiran seperti media massa. Artinya fakta-fakta apa yang diinginkan media massa. Salah satunya cara penulisan antara judul dan lead. Saya lihat mayoritas straight news, padahal disini ada standar yang harus diperhatikan. Contohnya lead, kata tidak boleh lebih dari 30 kata. Tapi hampir mayoritas seperti itu (S.D).*

Dosen Universitas Sahid menyorot mengenai fokus berita:

*Pers juga melihat rilis yang dikeluarkan muatannya apa, dia gak akan copas begitu saja. Kalau dikasih langsung ke masyarakat inikan yang diberitakan TNI nya bukan bencananya. Kalau dulu bisa top down. TNI dulu sangat bisa menggunakan media massa. Sebetulnya sekarang TNI menggunakan strategi PR, nah media massa tidak merespon karena kita lihat analisis isi kualitatif dalam setiap berita. Apa yang dikeluarkan oleh TNI ini sangat-sangat jelas, dari sekian paragraf, berapa kalimat yang muncul, jadi bukan bencana yang jadi topik ini. bagian TNI mana yang dilakukan. Misal dari 15, bisa saja 12 yang jelas-jelas tentang kegiatan TNI (T.W).*

Keempat dosen menilai kualitas berita dari sudut pandang yang berbeda-beda. Walau begitu, secara umum pakar menilai negatif terhadap kualitas siaran pers yang dibuat TNI.

Point positif yang ada adalah tidak adanya dominasi TNI dalam berita. Tapi inipun masih diragukan oleh dosen Universitas Sahid yang menilai bahwa TNI masih mendominasi berita tersebut.

Adanya dominasi TNI dalam berita sesungguhnya dapat dipahami karena siaran pers ini merupakan produk dari TNI. Dosen dari UI menilai kalau dominasi tersebut memang dapat dimaklumi dan masih dalam ambang normal. Dosen Universitas Sahid mengatakan itu tidak normal, sehingga membutuhkan perbaikan. Dosen Universitas Sahid memberikan alasan bahwa ini merupakan masalah historis dan TNI belum mampu beradaptasi dengan perkembangan media massa yang terjadi sekarang. Di masa lalu, TNI memang dipandang wajar memberikan berita dominasi, namun di masa sekarang sudah tidak wajar lagi.

Dosen UI juga mengajukan alasannya dengan memberi contoh:

*Kalau disini sih, yang saya bisa lihat, si penulis ini ingin memberitahukan kepada pembaca, audiensnya masyarakat umum. Terus terang saja ini jarang banget pak. Kalau buat saya sih bertujuan untuk menggambarkan bahwa citra TNI untuk peduli pada masyarakat ada dari pers mana saja. Ok. TNI peduli, makanya si penulis ini mengangkat banyak anak sekolah tidak sekolah lagi. Lalu diangkat mobil pintar. Nah ini. Dia ingin angkat satgas TNI juga peduli dengan mobil pintar ini. Kemudian ia mengangkat edukasi, dia juga peduli dengan memberitahukan pada warga Jogja, di point no 7. Kemudian dari puing-puing Merapi, juga bantuan warga. Dengan sukarela juga TNI berkorban untuk masyarakat Jogja, mereka langsung tinjau ke pos, hanya TNI saja yang bisa begini. Jadi dari ide penulis ini, ia ingin menggambarkan kepedulian TNI (D.M.P).*

Tetapi semata menggambarkan kepedulian TNI dinilai belum cukup oleh dosen Universitas Bakrie:

*Kalau framing sudah jelas yaitu untuk membantu para pengungsi. Sudah kelihatan semua hanya memang informasi yang kita berikan, apa yang saya ambil dari berita ini. ini bukan sekedar harus dibaca publik kan, tapi juga harus mendorong. Saya harus melakukan review dulu, kira-kira apa yang menarik dari sini. Cepatpun, kita harus pikir dua kali. Tujuannya adalah bagaimana berita ini jadi news value tinggi (A.S.E).*

Sementara itu, dosen Universitas Bakrie menyorot pada penggunaan istilah-istilah khusus kemiliteran oleh Puspen TNI. Penggunaan-penggunaan istilah ini mempersulit pembacaan oleh media massa dan masyarakat dan jika media massa harus memperbaikinya, maka akan ada jeda waktu yang tidak efisien bagi media massa.

Dosen UPN menyorot kemampuan Puspen TNI dalam memahami media massa dan menekankan kalau Puspen TNI harus mengubah dirinya menjadi pihak yang berpandangan media massa. Walau begitu, jika memang siaran pers TNI harus berbeda dari yang digunakan di masa lalu, maka ciri khas siaran pers TNI menjadi hilang. Kembali, ada sebuah pertarungan yang dihadapi oleh public relations TNI apakah harus menjaga citra sebagai militer yang tegas dan detail, atau menjaga citra sebagai militer yang bersahabat dan mengerti masyarakat.

Kelemahan lain disorot oleh dosen UPN:

*Ini yang saya tidak habis pikir, ini sumbernya yang ngomong siapa, gak ada namanya. Caranya lebih baik lagi langsung ditulis disini. Ya seperti buat berita itu lo mas. Jadi rancu kalau seperti ini. Ini mayoritas, maksimal 35 kata, unsur mana yang harus ditonjolkan. Tidak seperti itu (S.D).*

Selanjutnya:

*Karena framing itu kan ada empat aspek. Pertama, analisis sintaksis. Bagaimana ia disusun, judul, sub judul, lead. Kedua, aspek skrip. Bagaimana ia disusun, 5W1H, banyak whatnya tapi where dan when itu juga penting. Saya tidak tahu itu disini. Ini dimana, kapan, siapa yang ngomong, tidak lengkap. Ketiga, aspek tematik. Temanya ini tidak jelas. Apakah kesigapan TNI, apakah perannya di masyarakat, atau kecanggihan TNI dalam mencari korban. Inikan harus dilihat. Sehingga yang tampak itu actionnya di dapur umum. Yang ditonjolkan seharusnya bukan itu. Yang ingin ditonjolkan adalah kemampuan TNI, hal yang tidak dapat dilakukan masyarakat biasa. Jadi inikan menarik sebenarnya frame yang dibentuk. Saya tidak lihat disitu. Keempat, aspek retorik. Penekanannya. Yang ingin ditekankan kemampuan personil, ketangguhannya, atau apa? Itu yang belum saya lihat (S.D).*

Hal ini didukung dosen Universitas Sahid:

*Kualitas kalau isu tentang bencana, gak ada kualitasnya. Kalau dari PR, kita akan tanya orang lain. Jadi gak harus Pangdam ini, Brigjen ini, narasumbernya harus meminjam mulut orang lain. Ini kelihatan gak seimbang sekali. Justru kalau orang lain yang ngomong, keluar kualitasnya. Jadi sebisa mungkin diperhalus, meminjam narasumber, dan kerjasama dengan media massa. Apakah bentuknya menyewa kolom atau apa. Harus ada relationship dengan media massa. Dalam keadaan tidak ada bencana sekalipun, harus ada hubungan baik dengan media massa (T.W).*

Menariknya, dosen UI menilai kualitas siaran pers secara umum baik:

*Kualitas informasinya bagus, karena dengan detail. Contohnya nomor 9, "Peninjauan Pos Pengamatan Merapi dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi Gunung Merapi di lapangan yang masih berstatus awas, dengan ancaman bahaya langsung berupa awan panas dan tidak langsung berupa lahar". Dan ini diceritakan lagi oleh penulis "Di Pos Pengamatan Merapi Ketep-Magelang, Dansatgas TNI mendapat penjelasan dari petugas jaga tentang kondisi terakhir Gunung Merapi yang saat ini sudah mengalami penurunan meskipun masih menunjukkan aktivitasnya seperti pengeluaran awan panas, tremor, gempa vulkanik, dan guguran lava." Terus "Sedangkan di Pos Pengamatan Merapi Selo Boyolali, Dansatgas TNI dapat menyaksikan langsung aktivitas Merapi yang masih mengepulkan awan panas meskipun dalam skala kecil." Inilah point yang ingin ditekankan padahal daerah tersebut sangat berbahaya tapi TNI mampu melakukannya dengan menyaksikan langsung. Bahasanya sih sudah bagus. Ia ingin menyatakan, ini loh yang sebenarnya kami lakukan. Dengan bahasa ini, ingin menekankan kalau kami peduli (D.M.P).*

Sementara itu, dosen Universitas Bakrie menyimpulkan:

*Secara umum, data-datanya sudah lengkap, jelas, tapi ada istilah-istilah yang tidak dimengerti wartawan. Itu memang sering terjadi jika berita dari TNI, mereka senang menyingkat-nyingkat. Kita harus mempersiapkan foto, video, yang bisa membantu jurnalis. Minimal gak mereka ambil tulisan kita, hanya data-data. Kalau memang tujuannya untuk diliput, data-datanya harus lebih lengkap. Kata-kata bisalah diminimalisir dengan latihan. Juga harus pandai memilih momen-momen yang bisa diangkat ke media massa. Agar PR ini semakin baik lagi, kita harus punya narasumber-narasumber yang bisa dihubungi untuk memberi kesempatan jurnalis melihat*

*lebih dekat. Kita harus punya portal tersendiri yang bisa upload itu semua. Saya pikir itu (A.S.E).*

Selanjutnya:

*Sekarang jurnalis harus menguasai banyak hal. "Satgas Brigade Khusus TNI PB Merapi". Aku tahu setiap orang besar itu pasti disebut-sebut, tapi kalau ini ke publik, tidak dibaca. Ini tidak menggambarkan. Tidak banyak jabatan-jabatan yang keluar. Masih konvensional. Inikan seperti laporan berita acara. Menariknya gini, yang paling tinggi jabatannya, ia ngomong apa? Ya seperti itu. Atau "Mobil Pintar" ini menarik, SIKIP itu apa sih? Nah, begini, ambil satu saja yang mengambil memakai jasa mobil ini. Dia ngomong "waa, senang banget..." Terus masukkan satu narasumber dari jabatan tinggi kemudian informasi lebih lengkap, ada foto, ada video. Tapi memang berat. Cuma memang harus dibekali kemampuan fotografer, editing yang bagus. Menarik sekali. Yang memberikan akses masuk ke dalam ini kan TNI sendiri (A.S.E).*

Terkait dengan kualitas berita, para pakar memberikan sintesis kalau masalah sesungguhnya terletak pada kemampuan menulis, bukan dari materi. Data-data lengkap dan jelas, dan citra positif TNI terlihat jelas, hanya saja kelemahan ada pada penggunaan istilah-istilah khusus, kurangnya narasumber, dan kalimat yang terlalu panjang sehingga sulit dipahami.

Kelemahan dalam menulis ini ditunjukkan oleh dosen UPN:

*Nah ini buat alat khusus. Ini dari judul: TNI gunakan alkapsus evakuasi korban Merapi. Judul ini sebenarnya diambil dari yang paling bawah. Padahal seharusnya jika ini yang paling penting, ia yang harus diletakkan di atas. Sehingga ketika dikirim ke media*

*massa, ini tidak dihapus. Terus dari aparat keamanan yang diinginkan bukan berapa korbannya, tapi apa yang telah dilakukan. Apa prestasinya. Jadi masyarakat ada kebanggaan terhadap TNI, pada kondisi inilah. Makanya framing yang dibentuk itu tidak jelas arahnya mau kemana (S.D).*

Kemampuan menulis yang penting dikuasai oleh Satgaspen TNI kemudian adalah bagaimana mengolah kata-kata sehingga kata-kata kualitatif terletak di atas sementara data-data kuantitatif di letakkan terakhir, sesuai dengan kaidah penulisan berita media massa.

Tampak pula dari hasil wawancara kalau latar belakang dari para dosen mempengaruhi pendapat mereka dengan kuat. Dosen Universitas Sahid yang memiliki pengalaman dengan militer memberi kesan negatif atas berita TNI sebagai bentuk kritik yang sesungguhnya telah berlangsung lama. Dengan kata lain, dosen ini bukan hanya melihat pada sampel yang ditawarkan peneliti, namun juga siaran-siaran pers TNI sebelumnya yang pernah ia temukan semenjak berhubungan dengan TNI. Sementara itu, dosen UI awalnya memiliki kesan negatif yang datang dari media massa. Ketika mendapatkan siaran pers dari TNI yang berbeda, ia segera memunculkan kegembiraan sehingga menilai sesungguhnya masalah terletak pada jalur informasi antara Puspen TNI dan media massa.

Hal ini ditekankan oleh dosen UI:

*Ketika saya baca, point yang paling penting yang nomor 15 “TNI excellent tangani bencana Merapi”. Juga CSR yang diangkat itu soal mobil pintar ini, ini kegiatan CSR nya TNI. Ini buat saya sih, berarti anda ingin mengangkat citra positif dari TNI (D.M.P).*

Faktor latar belakang membuat penilaian terhadap kualitas informasi Satgaspen TNI menjadi berbeda-beda dari perspektif masing-

masing pakar. Situasi menjadi lebih kompleks dengan banyaknya perspektif media massa yang membuat para dosen memberi komentar sedikit banyak mirip dengan komentar yang dilontarkan wartawan.

Masalahnya sekarang adalah apakah memang perlu TNI menyesuaikan diri dengan kebutuhan wartawan dengan mengorbankan ciri khasnya sebagai organisasi yang tegas dan *to the point*. Apakah mungkin hal ini justru akan memberikan dampak negatif bagi TNI sendiri dimana TNI dipandang “terlalu memasyarakat” sehingga persepsi negatif masyarakat terhadap media massa juga menjalar ke TNI.

Dosen Universitas Sahid memberi petunjuk kalau adanya penilaian berbeda-beda sesungguhnya objektif. Perbedaan muncul karena masalah metodologis:

*Kalau analisis berita-berita ini, kita harus melihat dulu analisisnya dengan cara apa. Kalau kita memang ada beberapa seperti semiotik, framing, atau pakai apa? Kalau semiotik, paka metode semiotiknya siapa? Yang paling aman itu analisis isi deskriptif kualitatif. Jadi dari 15 ini, harus bisa lihat kalimatnya. Kita bikin indikatornya, jadi judul, headline, foto, caption, topik, narasumbernya juga. Jadi dibuat bagan saja (T.W).*

Pada akhirnya, seluruh evaluasi yang dilakukan oleh para ahli merupakan kombinasi dari latar belakang, metode analisis, dan perspektif yang tidakimbang. Dosen UPN menilai kualitas informasi siaran pers TNI buruk karena tidak menerapkan kaidah-kaidah jurnalistik. Dosen Universitas Sahid menilai kualitas informasi siaran pers TNI buruk karena juga tidak menerapkan kaidah-kaidah jurnalistik. Dosen UI menilai kualitas informasi siaran pers TNI baik karena detail sehingga menangkap ruang waktu sehingga kejadian banyak tergambarkan. Dosen Universitas Bakrie memberikan penilaian buruk karena terlalu padat.

Wartawan dan TNI memang berbeda baik secara profesi maupun kelas dan kepentingan. Membandingkan kualitas informasi yang ditulis wartawan dengan yang ditulis TNI merupakan hal yang tidak semestinya dilakukan. Memang harus ada beberapa perbaikan yang dilakukan pada kualitas informasi yang dikeluarkan oleh Satgaspen TNI. Masalahnya apakah yang harus diutamakan dalam hal ini: TNI, media massa, atau masyarakat?

#### **4.3 Kualitas Informasi yang Dihasilkan Media Massa**

Arus berita dari Puspen TNI ke media massa merupakan hal yang paling banyak disorot dalam wawancara yang dilakukan dengan wartawan. Hampir semua narasumber wartawan memberikan komentar negatif mengenai materi informasi yang diberikan oleh Puspen TNI.

Sejumlah wartawan tampaknya memandang bahwa Puspen TNI semestinya mengorbankan idealisme sistem penerangan TNI yang cenderung faktual dan formal untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat lewat press release yang cenderung mengikuti gaya media massa yang lebih menekankan aspek komunikasi.

Seorang wartawan dari Antara menggariskan kesannya mengenai TNI secara umum:

*Bagi media massa bagus, ketika TNI mengambil peran. Karena itu penting. Saya mungkin berbeda pendapat. Saya banyak meliput berita di Hankam hampir 5 tahun, di Polkam sejak 92. TNI menjalankan fungsi sosial, dimana-mana juga begitu, di Amerika juga begitu. Itu mengimbangi peran yang terkesan angker dan sadis. Itu bagus, disitu point TNI milik rakyat. Kalau yang lain nggak, hanya TNI kuat. Kalau pandangan media massa terhadap TNI dari kaca mata bencana bagus karena menunjukkan respon. Tentara berani, sementara yang lain tidak berani, itu memberikan harapan. Kehadiran tim penolong dalam bencana itu memberi optimisme*

*karena bencana itu umumnya memberi kesan pesimisme. Nah itu satu point buat TNI (B.S.B).*

Begitu pula:

*Kalau secara langsung aku belum pernah kerjasama dengan TNI. Ada beberapa lah orang dari Kopassus, Marinir, Kodam setempat. Tapi tidak ada ikatan resmi. Aku diajak teman dari DPR pernah ke Merapi. Memang kondisinya untuk mendapatkan informasi dari TNI itu yang paling valid. Karena saat itu mereka yang turun ke lapangan, mereka yang ada di Ring 1. Mereka paling kredibel, orang yang pertama turun, paling teliti terhadap data, terus mereka tidak sembarangan dalam bermain data, walaupun data-data mereka untuk internal mereka saja (F.S).*

Dilanjutkan dengan:

*Kalau kita dikasih semua informasi ya enak. Kan mereka beda dengan orang sipil atau LSM yang ngasih data. Kalau mereka memberi data berdasarkan pengamatan-pengamatan tapi tidak turun ke lapangan. Yang turun ke lapangan itu TNI. Walaupun dibandingkan dengan Polri, TNI itu datanya yang paling bagus (F.S).*

Dan secara khusus pada satgaspen:

*Kalau satgaspen sebagian besar komunikatif. Ya ada juga yang congkak, itu kita cuek saja. Karena saya sudah alami itu jadi saya tau. Letkol Hari misalnya orangnya relatif komunikatif, hanya memang agak kaku (F.S).*

Yang dijelaskan sebagai masalah kepribadian:

*Ego-ego itu biasa muncul dari seorang TNI. Misalnya yang dari akademi terhadap yang wamil itu beda. Saya punya teman bagian penerangan, tapi seorang bagian penerangan itu tidak boleh bicara*

*pada saya saja, tapi pada semua wartawan. Di lapangan, memang saya dianggap orang senior yang lebih tau TNI gitu lah (F.S).*

Wartawan dari media massa online memberikan kesan serupa:

*Kita mendukung baik lah. Positifnya sih pasca reformasi TNI mulai berbenah. Tapi tetap di lapangan ada friksi-friksi. Misalnya tentang backing, TNI membacking usaha hiburan malam. Walaupun tidak ada fisik, tapi tetap ada intimidasi-intimidasi. Kita juga paham, kita hanya verifikasi saja. Mungkin itu saja hal-hal yang membentuk jarak antara wartawan dan militer. Untuk saat bencana positif, negatifnya di luar bencana (A.P).*

Hal yang sama ditekankan pula oleh wartawan dari Tribun Yogya:

*Saya kira dalam hubungan pada bencana Merapi itu tidak ada yang tidak baik. Seringkali disampaikan di mana-mana kalau bencana Merapi itu menyatukan perasaan semua orang. Ini sisi kemanusiaan. Kita bisa segera tahu. Ketika di lapangan, wartawan bisa mengerti kalau kita menggunakan fasilitas negara bersama TNI, ada hal-hal yang harus dijaga kerahasiaannya. Ini kita mengerti. Kalau di tempat pengungsian, itu sudah tidak ada halangan, jadi kita merasa aman. Kita sama-sama merasa dalam satu misi kemanusiaan. Jadi saya bisa ketika tanggap bencana fine-fine saja dengan TNI. Kita juga enak saja kalau ketemu komandan. Karena mereka juga tahu dalam situasi seperti ini tidak perlu prosedur yang terlalu rumit (M).*

Wartawan Antara menjelaskan bagaimana media massa menerima siaran pers dari Puspen TNI:

*Ada beberapa hal, kalau dekat, lancar bagus. Kalau terima Press Release kita ditelpon, di sms, atau di BBM. Kalau perwira baru kenal, biasanya hanya lewat fax. Itu tidak cukup karena fax itu akan*

*diedarkan ke tempat lain dan dikerjakan kalau kita punya waktu. Itu harus ditelpon, untuk memastikan apakah dikerjakan sekaligus memberi lanjutan informasi (B.S.B).*

Wartawan ini menyebutkan kalau tersampaikan atau tidaknya informasi yang dikirim Puspen TNI berkaitan dengan pengalaman dari individu pengirim di Puspen TNI. Hal ini dapat diartikan bahwa karakteristik individu Puspen TNI sangat penting dalam menjaga arus informasi terus berjalan.

Selanjutnya dijelaskan oleh wartawan lain bagaimana memperlakukan informasi dari Puspen TNI:

*Sebenarnya seperti rilis-rilis yang lain, kita pasti konfirmasi ulang. Kita sms Puspen apa benar lalu verifikasi juga isi berita. Kan ini panjang, jadi kita potong. Kita kan media massa online, makanya berita-beritanya singkat. Jika nanti ada angle-angle menarik dari TNI kita ambil. Kalau panjang kita potong jadi dua atau tiga berita jadi tetap komprehensif (A.P).*

Selanjutnya:

*Ya karena versinya beda, misalnya penulisan nama dan pangkat. Si Fulan binti Fulan biasanya paragraf selanjutnya kita tulis namanya saja. Tapi kalau TNI kan terus ada pangkatnya. Jadi panjang gitu. Yang kedua content berita. Misalnya "TNI bantu warga lereng Merapi". Inikan umum. Jadi kita buat lebih spesifik (A.P).*

Perlu ditekankan disini kalau bagaimana media massa memperlakukan berita dari Puspen TNI tergantung pada jenis media massanya. Kutipan di atas berasal dari media massa online, sementara kutipan berikut dari media massa cetak:

*Jadi kita sebenarnya ada yang rilis kita jadikan berita langsung, atau ada yang kita ketik ulang, sesuaikan dengan gaya berita kita,*

*juga ada yang kita cek ulang. Karena hampir semua rilis, tidak hanya TNI tapi hampir semua lembaga, itu lebih mengedepankan aspek penting dari misi mereka. Tapi kita pengen lebih detail aspek yang ada di balik itu. Misalnya Dapur Umum, yang dibuat TNI seperti apa sih, kita tidak sekedar ingin tahu kalau TNI buat dapur umum. Kita pengen tau, bagaimana tentara yang laki-laki itu bisa memasak, bagaimana prosesnya para tentara mengaduk sayur sekian banyak itu, tetapi itu tidak pernah diberikan dalam rilis-rilis. Yang ada hanya sekedar TNI ada di dapur umum, TNI ada di tim evakuasi, TNI ada di tim kesehatan, yang penanggung jawabnya bapak ini, sudah, begitu saja. Tidak pernah ini menggunakan alat apa, gambarnya pun tidak, ini tahan tidak terhadap wedus gembel, kira-kira yang seperti itu kan tidak pernah tergambarkan. Jadi kalau sekedar informasi awal kita lempar, kalau ada soft copynya kita edit, kalau memang perlu kita tanyakan apa sih dibaliknya (M).*

Wartawan ini menekankan kalau siaran pers TNI tidak berbeda dengan siaran pers dari lembaga lainnya. Kesamaan ini bersifat negatif, yaitu hanya menonjolkan kepentingan pemberi siaran pers dan tidak memberi ruang bagi kepentingan media massa. Dengan kata lain, wartawan mempersepsi kalau siaran pers yang dikeluarkan Puspen TNI bermutu rendah.

Hal ini juga ditekankan oleh wartawan Antara:

*Bagi kami, press release yang kami peroleh umumnya tidak sesuai. Itu tidak sesuai dengan naluri wartawan karena kami seolah disuapi begitu saja. Jadi ada dua sikap media massa. Press release itu bagus atau tidak. Jika tidak, kita tambahi dengan wawancara untuk memberi makna lebih dari berita tersebut. Press release yang kita terima umumnya kita bongkar. Umumnya memang tidak memenuhi nilai berita dan struktur berita, misalnya tidak sesuai dengan*

*piramida terbalik. Jadi yang paling penting ditaroh di lokasi yang sebenarnya tidak penting. Siaran pers yang diterima dari pemerintah itu seperti sebuah TOR, ada pendahuluan, seperti pidato lah. Jadi wartawan biasanya melihat langsung ke bagian akhir karena biasanya disitu letak yang paling penting. Siaran pers dari TNI juga begitu umumnya. Lemah dalam mencari tahu yang diinginkan wartawan. Kedua unsur-unsur beritanya tidak jelas. Terakhir unsur why. Misalnya: Mabes TNI memutuskan membeli 100 tank Leopard. Mengapa? Pemerintah mengirimkan 1000 tenaga untuk ini-ini? kenapa dikirim? (B.S.B)*

Kembali disini sebuah referensi terhadap lemahnya kualitas materi yang diberikan Puspen TNI pada media massa.

Hal ini dijelaskan lebih jauh:

*Saya kira begini, bahwa secara umum, baik itu rilis dari TNI atau organisasi lain, ketika bencana atau normal, kadang kala gini, ada hal-hal, ini semua lembaga ya, tidak terlalu memahami kepentingan media massa. Yang dirilis hanya kepentingan mereka. Dikiranya hanya itu. Tidak pernah mereka berpikir kalau ini harus dimuat media massa dan kita harus informasikan seperti ini agar kepentingan media massa juga terpenuhi. Yang ada hanya seperti tanggal sekian akan ada acara seperti ini, sudah begitu. Coba, apa ini menariknya. Misalnya ada devile, kalau ada salah satu yang menggunakan payung batik misalnya, itu kan menarik. Itu tidak pernah terpikir. Ini semua lembaga, jadi bukan sikap, tapi materi. Sehingga yang dimuat ya hanya berita dua tiga alenia selesai. Kan sama sekali tidak menarik. Sesuatu yang bisa di informasikan, prestasi-prestasi yang luar biasa, itu unik, itu menarik, itu yang jarang diperhatikan. Acaranya apa sih? Cukup gitu. Coba misalkan,*

*dari lembaganya ini yang tidak pernah dilakukan apa ya? Itu kan menariknya. Tidak menghilangkan aspek penting juga. Tetap juga isinya sama. Tapi kalau cara begini doang tidak ada yang baca. Jadi yang menarik itu apa, jadi informasinya seperti apa, misalnya "Satgas TNI Gunakan Mobil Pintar, hanya gini doang, kalau ini kita muat di koran gak ada yang baca. Dari ini kita sajikan itu sederhana. Cukup 2 sampai 3 alenia di atas. Satgas brigade khusus diawaki 90% kowad, misalnya, satgas Merapi khusus menerima, ini kan bukan soal apa-apa. Ini yang menuntut kita tidak dipenuhi TNI dan lembaga-lembaga lain (M).*

Selanjutnya:

*Misalkan kemaren, ini contoh, ketika akademi AU itu bikin upacara menjelang lebaran. Kata saya dia pinter. Isu yang dimunculkan itu perintah dari gubernur AU untuk semua kadep yang pulang kampung bertugas untuk mengingatkan supir yang ugal-ugalan. Ini akan dibaca. Kalau ketemu masyarakat Jogja, tolong ditegur kalau ada kadep yang tidak mengingatkan supir. Padahal isinya hanya pelepasan kadep untuk libur lebaran saja. Makanya saya bilang dia pinter (M).*

Kemudian:

*Satgas TNI .... Ini saja. Gak ada yang menarik. Jadi kepala itu harus menariklah. Setelah baca, o menarik, ia baca terus. Kalau dari depan sudah tidak menarik, ujung-ujungnya tidak sampai juga ke masyarakat. Jadi soal materi, bukan sikap. Semuanya saudara waktu bencana. Semua golongan, semua jabatan, wartawan ketika disana, kalau sudah meliput, kita bantu-bantu, kita tidak mentang-mentang saya wartawan, kalau saya yang dekat ya saya yang bantu. Itu mampu, tidak terkecuali terhadap tentara (M).*

Dan disimpulkan bahwa:

*Kita kembali ke rilis oleh Puspen TNI atau apa, menurut saya yang paling utama tidak hanya misi mereka saja, tapi kebutuhan media massa juga diperhatikan. Yang penting menarik, gak harus gede-gede amat. Bahwa isinya sama saja dengan judul "TNI tanggal 5 peringati Hut TNI" tapi ditonjolkan siapa figur terkenal di masyarakat, ia akan memimpin barisan ini, tapi kalau yang digelondongkan, ya tanggal 5 memang upacara. Kesadaran bahwa rilis informasi pada media massa tidak sekedar memenuhi kebutuhan dia tapi kebutuhan media massa juga, yaitu layak untuk diberitakan, unik, enak dilihat, pokoknya prinsip-prinsip umum jurnalistik lah (M).*

Wartawan Suara Karya memberikan hipotesis mengenai mengapa mereka mempersepsi kalau materi yang diberikan Puspen TNI berkualitas rendah:

*Cuman seharusnya di kalangan atas harus ada yang memilah-milah, mana informasi yang dianggap dokumen negara mana yang bukan. Kalau Merapi kan tidak dapat dikatakan dokumen negara karena tidak boleh terlambat. Kedua, itu data-data itu mereka sadur itu tidak teliti. Data-data penting untuk good news tidak bisa muncul kadang-kadang karena sudah dipenggal-penggal dari atasnya (F.S).*

Persepsi kalau informasi yang diambil dari lapangan mengalami penyaringan besar hingga sampai ke media massa dalam bentuk tidak utuh menunjukkan bagaimana media massa memandang birokrasi di pemerintahan merupakan sesuatu yang sulit.

Wartawan senior dari Suara Karya tersebut menambah hipotesisnya dengan menyebutkan adanya prejudis TNI terhadap media massa yang berakar pada masalah historis:

*Antara komunikatif ya, dibilang tidak komunikatif ya juga. Jadi tetap ada kekhawatiran orang TNI terhadap media massa. Mereka menganggap media massa itu musuh. Dia menganggap yang disampaikan media massa itu yang jelek-jelek saja. Misalnya begini, kita sudah berteman akrab, kalau ada kekurangan dari teman saya, tidak akan saya sampaikan, karena ia pasti menyampaikan alasan-alasan, mungkin untuk kepentingan nasional. Ada satu pertimbangan dan wartawan melakukan pertimbangan itu (F.S).*

Dan kembali:

*Tapi yang ada memang mereka seperti memisahkan diri, tapi mungkin ini karena ada proses komandonya. Tingkatan-tingkatannya untuk informasi itu. Jadi komunikatif itu antara komunikatif dan tidak komunikatif, ya relatif lah. Cuma wartawan itu ingin orang yang ditemuinya itu komunikatif, terbuka gitu. Mungkin komandan itu bisa ngomong begini, "ini gak usah dikutip ya, hanya sebatas tau saja", seperti itu (F.S).*

Bagaimana media massa mengubah kualitas informasi dari Puspen TNI dijelaskan oleh wartawan Antara sebagai berikut:

*Akibatnya, kita cenderung melihat kembali. Pelan-pelan. Dalam situasi seperti ini, ada tiga hal yang harus dilihat kembali. Pertama, press clear nggak? Kalau sesuai langsung kita buat berita, karena sesuai dengan yang kita inginkan. Ini yang saya dorong. Dapat berita bagus. Diketik. Fit to print. Kedua, so-soul. Bagus tapi kalau ada waktu baru kita kerjain, atau nggak sama sekalnya. Kondisinya siaran pers dari Mabes TNI penting tapi tidak tahu bagaimana menulisnya. Jadi itu kita dudukkan kembali. Misalnya menggunakan piramida terbalik. Judul misalnya, harus punya sound bite, konkrit, 5-7 kata, tidak abstrak. Misalnya: RI Ultimatum Malaysia tentang*

*Ambalat. Ultimatum itu konkrit dan clear. Ia memberi strong message. Coba bandingkan dengan ini: Pemerintah Keluarkan Kebijakan Ekonomi Baru. Gak jelas kan? Abstrak. Lebih baik: Pemerintah Larang Impor Beras (B.S.B).*

Selanjutnya:

*Kemudian kalimat harus aktif, me-, me-, ber-, itu penting. Yang terakhir kesimpulan judul dan rekomendasi. Itu yang banyak kita dorong. Di pelatihan TNI, saya mainnya selalu di lit dan judul, gak mau berita. Karena nanti itu mengikut. Setelah itu unsur 5W + 1H nya. Setelah itu, biasanya dilengkapi dengan data-data nggak. Itu sering nggak ditambah, padahal penting untuk memberi konteks berita (B.S.B).*

Kutipan di atas menunjukkan bahwa media massa melakukan tiga hal yang menurut mereka memperbaiki kualitas informasi yang dikirim oleh Puspen TNI. Ketiga hal ini merupakan bagian dari idealisme media massa serta memperkuat pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat.

Saran yang diberikan wartawan untuk Puspen TNI dan satgaspen TNI adalah:

*Sudah bagus si mas, hanya kita jarang ketemu aja. Misalkan kita sering ketemu, biasa-biasa saja. Kita tidak menempatkan orang secara khusus di Puspen. Kalau di Merapi iya karena itu tempat bencana. Mungkin harus ditingkatkan komunikasi. Dengan komunikasi bisa menjalin kedekatan emosional, kita juga bisa dapat berita yang lebih dalam (A.P).*

Wartawan dari Tribun Yogya tidak mempermasalahkan isu hubungan, namun lebih ke skill menulis:

*Saya lebih dari awal lebih tertarik, kalau hubungan personal sudah clear, sekarang udah gak ada, udah selesai. Yang itu tadi, hubungan yang baik tidak sekedar hubungan personal. Kedua, kebutuhan saya terpenuhi, kebutuhan saya mencari berita yang layak, menarik, unik, tergambar. Kalau kedua kepentingan ini terpenuhi ya selesai. Kebutuhan saya terpenuhi, ketika ada yang baca, datang duit, saya gajian. Pesan dari masyarakat pada tentara itu jadinya baik. Kedua kebutuhan harus sinkron. Saya bisa saja senang dengan menulis semua keburukan TNI, laku koran saya, tapi bagi TNI apa untungnya. Begitu juga, kalau rilisnya hanya "Tentara masuk desa" ya saya jadi gak gajian. Jadi menurut saya, keseimbangan itu penting. Apa sih kebutuhan bencana, itu media massa dapat akses sedetil-detilnya atau TNI mampu berkolaborasi dengan wartawan, oke. Misalnya, ayo kita bantuin, ikut ya, kita juga bisa menulis kalau yang habis-habisan berjibaku waktu awal bencana ini TNI. Keuntungan kita, kita tahu persis, jadi clear. Sebenarnya kalau dua kepentingan ini bisa diklopkan, selesai hubungan ini. Cuma kadang-kadang belum banyak dipahami seperti itu. Tapi apa yang membuat ini dibaca orang. Saya lempar di pasar, untuk judul, untuk lit. Cuma lagi-lagi, seringkali, substansinya TNI itu menyampaikan informasi tentang ABCDEF itu tercapai. Kita bungkusnya, tetap ABCDEF masuk, tapi informasi yang ingin kita sampaikan bukan "TNI membuat jalan desa" tetapi kalau cerita anak-anak sekolah harus jalan kaki sekian jam, setelah ini ada jalan, mereka hanya beberapa jam, kenapa bisa begini? Nah, ini karena TNI yang buat. Yang seperti ini yang dibaca orang. Ya ini menurut saya ya strategi hubungan dengan media massa, strategi membuat berita, segala macam lah. Kalau kita memikirkan sepihak, TNI bisa seperti ini, apa untungnya saya? Ini keuntungan bagi TNI. Harus diselesaikan dan dipahami, saya kira itu kuncinya (M).*

Aspek lain yang disarankan narasumber dari wartawan adalah menjadikan satgaspen sebagai PR TNI:

*Saran saya satgaspen sudah tahu tugas mereka ya. Cuma satu, mereka diberi peran seperti PR. Jadi satgaspen itu sudah cukup untuk memberi informasi ke wartawan. Karena apa, karena komandannya hanya menerima laporan saja kan? Yang tahu lapangan itu satgaspen. Pasti satgaspen sudah didoktrin mana yang boleh mana yang tidak boleh diberitakan. Ini supaya mereka lebih komunikatif dan data yang disampaikan lengkap. Seperti di Konga Konga itu kan valid karena Lettu Suwandi, itu data-data mereka lengkap karena langsung dari satgaspen. Bahasa ga terlalu penting lah. Yang penting data wartawan sudah cukup itu, bahasa itu bisa diolah oleh wartawan itu sendiri (F.S).*

Wartawan lain yang belum senior menyebutkan kalau Puspen seharusnya lebih pandai menulis:

*Kalau kita dekat, Puspen bisa latihan menulis. Itu bisa berjalan. Kitakan butuh juga tim informasi dari tentara. Tentara juga butuh kedekatan dengan publik untuk menjelaskan. Makanya itu tentara harus belajar menulis (A.P).*

Wartawan dari Antara memberikan saran yang lebih lengkap dan sistematis. Untuk Perwira Penerangan:

*Tugas Perwira Penerangan yang bagus menurut saya adalah membanjiri media massa dengan informasi. Ia tidak menunggu. Kalau menunggu nanti malah diserang. Kalau proaktif mengesankan kalau tidak ada yang disembunyikan. Seperti dulu, saya pernah ditanya, mengapa kalau TNI memberi keterangan kalau tidak ada pembantaian di Aceh, tidak ada penembakan di Papua, dianggap publik dan wartawan benar ada pembantaian. Karena itu bohong. Itu tantangan bagi Perwira Penerangan. Ia*

*harus menjelaskan kebijakan yang sering bertentangan dengan media massa. Seringnya mereka tidak siap. Karena dari kami, TNI masuk daftar top 10 Newsmaker karena berkaitan dengan publik banyak: perang misalnya, atau bencana. Perwira juga selain aktif, ia juga menciptakan rutinitas. Ia harus diberi dan memberi informasi rutin. Karena kegiatan TNI itu banyak. Positifnya seperti itu. Ada yang mau dimintai keterangan. Negatifnya, seringkali mereka menjawab no comment, gak mau, atau bahkan gak peduli (B.S.B).*

*Yang kedua tentang kemampuan seorang Perwira. Seorang dalam tataran Kapten harus sudah bisa diberi kebijakan menjelaskan walaupun hanya menjelaskan faktual saja. Ketika didesak lebih jauh, jangan main di tataran policy, karena itu di atas level Kolonel. Cukup jawab, Kasad ada? Ada. Ada kejadian apa? Sedang kita cek. Begitu (B.S.B).*

*Yang ketiga, peran puspen bagi saya, melihat cara berpikir media massa. Seringkali nggak. Seringkali media massa hanya dijadikan alat. Akibatnya media massa posisinya berubah. Sekarang media massa mau jadi penguasa. Makanya cara paling cepat adalah lewat mengindustri. Dengan mengindustri, posisi tawarnya jadi tinggi dalam suatu sistem. Mereka bisa beli berita kalau banyak uang. Jadi lebih pada sikap negatif yang cuek, tidak mau tau jenis-jenis media massa. Krisis misalnya, mana yang harus didahulukan: TV, radio, internet, cetak (B.S.B).*

*Yang positif adalah sudah banyak anak mudanya mau mempelajari media massa. Tapi persoalannya media massa dipelajari sebagai apa. Sebagai partner atau apa. Kalau yang positif, mereka rata-rata mampu, yang senior biasanya (B.S.B).*

Dan untuk Satgaspen TNI:

*Pertama, Satgaspen harus punya hubungan di tiga level: di tingkat reporter, editor, dan pemred. Di tingkat reporter, kita bisa memberikan sebuah informasi, rutin, penuh, dan sering. Itu yang dibutuhkan adalah rutinitas, pagi, siang, malam, kayak begitu terus. Nanti dibangun evaluasi setiap minggu (B.S.B).*

*Di level redaktur, perlu ada dialog. Harusnya ada sebuah kepedulian yang lebih luas misalnya, kan seringkali media massa yang berperan. Jadi media massa kayak lebih berperan padahal bencana itu agenda publik. Misalnya tentang bantuan yang tidak sampai. Disinilah para redaktur dan satgaspen membangun sebuah agenda, misalkan mengundang anggota-anggota lain untuk terlibat, meminta bantuan, meminta kepada kepala kelurahan menyediakan ini (B.S.B).*

*Di level pemred minta kepedulian mengapa kita melakukan ini. Intinya harus ada support lah (B.S.B).*

*Kedua, perlu ada juru bicara yang bersedia dekat dengan wartawan. Karena kalau terlalu menggurui media massa, yang muncul justru sentimen media massa. Juru bicara itu yang dibutuhkan adalah yang bisa berdialog (B.S.B).*

*Ketiga, pembuatan media center. Di sana ada internet, cetak, ruangan, sistem komputer, semua yang dibutuhkan wartawan (B.S.B).*

*Keempat mesti ada informasi harian. Sebuah press release harian. Jadi banjirilah kami dengan informasi (B.S.B).*

Dalam perspektif wartawan, siaran pers yang dibuat oleh Puspen TNI berkualitas buruk dalam segi penampilan. Secara umum, para wartawan mengakui kalau kualitas informasi dalam segi isi sangat baik dan mengungguli pihak lain. Mengenai nilai informasi dari Puspen TNI

lewat jalur Puspen TNI ke media massa dapat disimpulkan kalau ada penguatan kualitas informasi dari segi penampilan namun terjadi penurunan kualitas informasi dari segi isi karena siaran pers dipotong-potong demi penampilan tersebut.

#### **4.4 Upaya Satgaspen TNI Mengawal Informasi**

Lebih lanjut, dalam proses wawancara, ditemukan kalau ada sebuah masalah dimana media massa menunjukkan kepentingannya sendiri:

*Ada juga dari media massa online. Dia melihat ada kebakaran di tenda dapur lapangan, tapi karena kita sudah koordinasi dengan baik, jadi gak jadi diliput (A.Y.N).*

Dansatgaspen TNI juga menyorot masalah ini dalam dua contoh kasus. Kasus pertama adalah peliputan pengungsian yang kumuh:

*Kita ketahui di zaman sekarang ini jaman keterbukaan. Memang media massa kita masih menganut prinsip *Bad News is a Good News*. Saya selalu mengajak media massa membuat informasi yang benar. Contoh, banyak sekali media massa yang sering meliput tempat pengungsian yang kumuh, yang kotor, ya memang semua tempat pengungsian itu kotor, namanya juga tempat pengungsian. Jadi jangan terlalu mendramatisir keadaan yang sudah dramatis, jadinya lebih susah. Jadi yang jelek kita tutuplah, yang bagus kita beritakan, agar yang melihat kita senang (H.M).*

Kasus kedua sama dengan yang disebutkan oleh Perwira Pers, yaitu tentang kebakaran di tenda dapur lapangan, namun lebih informatif:

*Di Mangunharjo itu ada kasus dapur lapangan terbakar. Media massa banyak yang mengambil gambar. Aparat-aparat berebut menyuruh media massa itu menghapus gambarnya. Ini kan kurang persuasif. Kalau ini diberitakan juga kita jadi susah. Jadi kami*

*lakukan pendekatan persuasif dan mereka paham dan akhirnya tidak dimuat. Jadi mereka mendukung kita (H.M).*

Adanya kecenderungan media massa untuk menangkap kejadian terbakarnya dapur lapangan menunjukkan kepentingan media massa untuk memperoleh peristiwa yang mendorong emosi seperti disebutkan oleh Shoemaker dan Reese (1996:48):

*Apakah berita yang diambil sering tergantung apakah ia “mengguncang” – bencana dan peristiwa lain yang “mengaduk emosi” (FitzSimon, 1993, hal. 25). Sebagai contoh, media massa lebih mungkin mengambil isu pemanasan global dan polusi air yang lebih emosional ketimbang isu sampah dan limbah (Gersh, August 1992). Pandangan ini didukung oleh Shoemaker, Danelian, dan Brendlinger (1991), yang menunjukkan kalau peristiwa dunia yang terlihat “menyimpang” lebih mungkin diberitakan oleh media massa AS dan lebih mungkin diliput secara luas daripada peristiwa yang tidak menyimpang, bahkan walaupun peristiwa yang tidak menyimpang tersebut memiliki kepentingan sosial yang tinggi.*

Pendapat di atas menunjukkan kalau media massa meliput dapur lapangan yang terbakar sebagai sebuah peristiwa menyimpang dalam kasus penanganan bencana Merapi. Tindakan ini sebenarnya berdampak buruk karena tidak sejalan dengan pandangan kalau informasi yang diberikan harus menenangkan masyarakat. Jika masyarakat mengetahui hal tersebut, mereka dapat tidak tenang, terutama masyarakat yang tinggal di pengungsian. Karenanya Dansatgaspen TNI mengambil langkah persuasif untuk menghentikan berita tersebut.

Perwira Penerangan menggambarkan bagaimana siaran pers yang mereka buat, yang telah sesuai dengan kepentingan menenangkan masyarakat, dipotong oleh media massa untuk mengambil hal-hal yang sesuai dengan kepentingan media massa:

*Setelah kita bikin siaran pers sesuai keadaan di Yogya, tapi ada yang diambil beberapa kalimat, fotonya saja, yang dibuat salah si nggak atau di tambah-tambah, tapi dikurangi ada. Karena hanya diambil sedikit saja (A.Y.N).*

Hal yang sama dinyatakan oleh Dansatgaspen TNI:

*Yang saya buat selama ini tidak ada yang dibesar-besarkan ataupun dibelokkan. Yang dikurangi ada karena kepentingan berita yang disorot media massa. Jadi secara luas tidak ada masalah, karena sejak pertama kali sudah saya tekankan kalau saya salah satu tugasnya adalah meluruskan berita yang tidak benar (H.M).*

Kutipan di atas merujuk pada kesamaan pengakuan kalau informasi yang disampaikan Satgaspen TNI masih belum mampu diterima sepenuhnya oleh media massa. Sedikit banyak hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya hubungan langsung antara Satgaspen TNI dengan media massa:

*Itu mungkin ke Puspennya. Kita tidak langsung ke media massa. Wartawan juga nggak kami bawa jadi nggak ada yang ikut kecuali yang TVOne tadi sekali. Kesannya baik, karena kita minta dipublish dan mereka mau meliput live (A.Y.N).*

Komentar ini membentuk jalur baru aliran informasi yaitu dari Satgaspen TNI ke Puspen TNI.

Walaupun demikian, tetap ada interaksi antara media massa dan Satgaspen TNI. Interaksi ini secara umum digambarkan positif:

*Kesan positifnya bahwa mereka mau bekerjasama dengan TNI. Pagi hingga malam, TNI lah yang bekerja, mereka tahu sendiri itu. Selama ini saya rasa tidak ada perselisihan yang terlalu menonjol karena kita selalu open, kita undang media massa kalau perlu. Selama satu bulan saya bekerja tidak ada kesan negatif (H.M).*

*Media massa itu mempunyai agenda sendiri, langsung ke lapangan. Kita media massa itu selalu kita undang saat melaksanakan penyisiran seperti yang dilakukan Kopassus. Dan media massa ini sangat senang kalau diajak TNI karena bisa memasuki wilayah berbahaya. Jadi terjalin hubungan yang sangat erat. Kadang-kadang kita undang, kita informasikan siapa yang mau ikut. Kadang kita pinjami, misalnya masker. Misalnya naik ke lereng Merapi itu kan panas, jadi kita pinjami. Jadi hubungan dengan media massa sangat bagus (H.M).*

*Kalau ada berita dikurangi, selama tidak mengurangi substansi, informasinya tidak saya masalahkan. Dan selama ini juga tidak ada yang seperti itu (H.M).*

Hal ini juga ditekankan oleh Perwira Pers:

*Kalau itu kita lebih pada hubungan baik Puspen dengan wartawan. Jadinya berita-berita yang dari Merapi itu gak ada yang dibesar-besarkan. Karena udah ada hubungan baik yang terjalin lama (A.Y.N).*

Satgaspen TNI juga memeriksa kualitas informasi yang telah dipotong tersebut secara langsung:

*Kualitas informasi tetap terjaga karena kita pantau terus dan kita kirim ke media massa terus kita kliping esok harinya. Kita cek. Kita buka internet, kita beli korannya. Jika ada yang dibelokkan kita langsung klarifikasi. Alhamdulillah tidak ada (H.M).*

Komentar terakhir di atas menunjukkan kemampuan Satgaspen TNI untuk mengawal informasi hingga ke titik akhir, walaupun mereka tidak secara langsung membawa informasi tersebut ke masyarakat. Ini memang merupakan tugas yang komprehensif bagi satgaspen karena mereka harus

mengumpulkan kembali informasi yang telah tersebar di masyarakat. Tugas ini cukup berat sehingga disarankan untuk penambahan personil.

Saran akhir dari Perwira Pers lebih kepada bagaimana pekerjaan mereka dapat lebih lancar serta pembinaan hubungan baik dengan media massa ke depannya:

*Kalau saran untuk Satgaspen, personilnya agar ditambah. Itukan di Merapi ada beberapa kegiatan. Jadi ada beberapa yang terpaksa di pending karena kita satu tim meliput ke tempat lain. Kalau saran untuk hubungan media massa militer saya rasa lebih pada usaha menjaga hubungan baik dengan wartawan yang juga sudah sering meliput TNI. Kalau wartawan diperhatikan juga mereka akan lebih perhatian (A.Y.N).*

Sementara itu, saran dari dansatgas lebih menekankan pada integrasi informasi:

*Kita itu penerangan tidak berdiri sendiri. Karena bencana ini berbeda dengan Darurat Militer di Aceh. Kita ini membantu pemda dan berada di bawah BNPB. Saya hanya satgaspennya TNI. Saran kedepan yang pertama, kita ini TNI harus terintegrasi dengan penerangan yang lain, baik PMI, BNPB, Rumah Sakit, terintegrasi kita seharusnya disana. Sebenarnya ini sudah difasilitasi di media center dan mereka juga punya yang lain. Dan pemberitaan ke depan, TNI punya versi sendiri, ini punya versi sendiri, seharusnya semua keluar dari satu pintu, yaitu humas BNPB. TNI memberitakan apa yang sudah dilakukan TNI. Ke depannya, itu masing-masing instansi mempunyai visi penerangan yang sama. Tidak saling menonjolkan satu sama lain kalau terintegrasi kan (H.M).*

Saran ini pada akhirnya sama dengan saran dari Perwira Pers:

*Kedua, Satgaspen kan anggotanya hanya lima, itu kan terlalu sedikit. Sementara bencana Merapi itu terjadi di empat wilayah. Yang timnya saja hanya tiga orang, yang dua harus melekat ke Dansatgas. Kadang saya pecah lima orang itu. Lain kalau saya punya empat tim, saya tempatkan di tiap kabupaten, inikan lebih efektif (A.Y.N).*

Kutipan di atas jelas menunjukkan kalau ada kesulitan bagi Satgaspen TNI dalam mengawal berita ke masyarakat.

#### **4.5 Hasil Penelitian**

Bencana letusan Gunung Merapi tahun 2010 merupakan sebuah bencana yang memiliki status tanggap darurat terutama karena melibatkan banyak lokasi lintas provinsi. Karena melibatkan banyak pihak, dibutuhkan penjagaan terhadap ketahanan informasi yang terbentuk di masyarakat. Puspen TNI bertindak sebagai PR TNI berusaha memberikan citra positif TNI yang berhubungan langsung dengan ketahanan informasi karena TNI adalah alat negara untuk menjaga pertahanan dan ketahanan bangsa.

##### **4.5.1 Tugas *Public Relations***

Dari gambaran mengenai peran Satgaspen TNI di Gunung Merapi, ditemukan kalau sejumlah tugas PR telah terlaksana dengan baik. Tugas yang terlaksana dengan baik adalah tugas manajerial, tugas operasional, dan tugas reflektif. Dalam tugas manajerial, Satgaspen TNI telah berhasil menjaga hubungan dan mengatur komunikasi dengan publik lewat menjembatani media massa untuk meliput langsung atau melakukan wawancara dengan personil TNI. Tugas operasional tercapai dengan mengirimkan sejumlah siaran pers yang diterima oleh Puspen TNI. Tugas reflektif juga tercapai lewat kesediaan menyampaikan informasi kepada wartawan lewat wawancara langsung ataupun tidak langsung. Tugas pendidikan dan tugas pengembangan profesi, walau begitu, tidak

ditemukan. Tugas pendidikan tidak terlaksana karena Satgaspen TNI ditekan oleh waktu sehingga harus mengirimkan berita secepat mungkin ke Puspen TNI. Tugas pendidikan sendiri dilaksanakan oleh Puspen TNI bekerjasama dengan media massa, misalnya dengan merekrut wartawan dari Antara untuk memberikan pelatihan. Tugas pengembangan profesi juga tidak dapat dilaksanakan oleh Satgaspen TNI namun terlaksana oleh Puspen TNI dalam bentuk pelatihan seperti telah dijabarkan di atas.

#### **4.5.2 Fungsi *Public Relations***

Dilihat dari fungsi PR, Satgaspen TNI telah menjalankan tiga fungsi PR dengan baik yaitu fungsi pencarian fakta dan umpan balik, fungsi tindakan dan komunikasi, dan fungsi evaluasi. Satgaspen TNI telah mencari fakta langsung ke lapangan maupun lewat data resmi, memberikan umpan balik berupa siaran pers ke Puspen TNI, melakukan tindakan dengan menjembatani media untuk meliput, berkomunikasi dengan media secara langsung lewat wawancara, dan evaluasi dijalankan dengan membuat kliping serta melacak kembali berita yang dibuat oleh media. Fungsi perencanaan dan program tidak dijalankan karena Satgaspen TNI sendiri terikat dengan Satgas TNI PB Merapi dan juga deskripsi tugas dari Puspen TNI. Deskripsi tugas dari Puspen TNI merupakan program yang diterima oleh Satgaspen TNI sementara perencanaan berada di tangan Satgas TNI PB Merapi. Satgaspen TNI hanya mengikuti kedua sumber tersebut. Hal ini mencirikan hirarki komando dalam TNI serta keterbatasan waktu yang dimiliki Satgaspen TNI.

#### **4.5.3 Kualitas Informasi dari Perspektif Normatif**

Kualitas informasi yang dibuat oleh Satgaspen TNI dari segi kecepatan dinilai baik. Begitu Satgaspen TNI tiba, berita langsung dibuat. Namun karena keterbatasan sumberdaya dan birokrasi, berita sempat mengalami penundaan. Sumberdaya yang terbatas merupakan

karakteristik kondisi bencana. Untuk menulis misalnya, dibutuhkan listrik, sementara untuk pengiriman data dibutuhkan jaringan internet. Kedua infrastruktur ini dapat rusak atau tidak tersedia di lokasi pengumpulan data oleh Satgaspen TNI. Begitu juga, birokrasi membuat berita yang dibuat malam tidak dapat langsung dikirimkan, namun harus menunggu pagi, saat kantor pemerintahan kembali buka.

Kualitas dari aspek keakuratan relatif baik. Data kualitatif diperoleh langsung di lapangan, sementara data kuantitatif diperoleh dari data resmi. Masih diperdebatkan apakah sebuah data resmi merupakan data yang bernilai tinggi. Di satu sisi, data resmi berarti mengandalkan orang lain untuk mengumpulkan data tersebut. Dengan kata lain, data resmi merupakan bentuk data sekunder atau tangan kedua. Sementara itu, para pembuat data resmi memiliki otoritas tinggi atas keakuratan data. Data resmi diperoleh dari Posko dan data tersebut berasal dari pendataan oleh personel TNI yang bertugas di sana. Karena masih dalam satu komando dan prosedur, dapat disimpulkan kalau data tersebut masih akurat.

Kualitas informasi dari segi pemberian kepastian menunjukkan kualitas yang tinggi. Tidak ada data yang meragukan. Semua siaran pers yang dibuat Satgaspen TNI menunjukkan data-data yang tegas disertai dukungan data-data.

Kualitas informasi dalam hal pemberian harapan tidak sepenuhnya ditemukan dalam siaran pers Satgaspen TNI. Hal ini berkaitan dengan perbedaan orientasi Satgaspen TNI. Satgaspen TNI berorientasi pada penjagaan citra TNI, bukan pada bagaimana mendidik atau memberikan informasi umum pada masyarakat. Walau begitu, fakta bahwa siaran pers tersebut dibuat oleh TNI dan TNI terlibat secara langsung dalam gambaran yang dibuat oleh siaran pers, secara tidak langsung memberikan harapan dan rasa aman bagi masyarakat pembaca. Hal ini sesuai dengan pendapat Pollack dan Wood (2010:20) kalau kehadiran

tentara saja telah cukup untuk memunculkan persepsi kalau situasi krisis tetap terkendali dengan baik, sehingga mengurangi rasa takut masyarakat dan mendorong mereka untuk ikut memberikan bantuan.

#### **4.5.4 Kualitas Informasi dari Perspektif Media Massa**

Dari perspektif media, kualitas siaran pers Satgaspen TNI masih harus diperbaiki. Prinsip akurasi memang diakui sangat baik jika berita tersebut datang dari TNI. Walau begitu, media massa tidak semuanya menerima prinsip verifikasi dalam siaran pers Satgaspen TNI. Mereka memandang siaran pers TNI hanya memenuhi kepentingan TNI sehingga hanya mengambil sebagian potongan saja dari siaran pers tersebut untuk memenuhi prinsip verifikasi. Salah satu tanda siaran pers TNI tidak memenuhi prinsip verifikasi adalah tidak ada wawancara langsung dengan orang non TNI misalnya korban atau pengungsi. Akibatnya, untuk memverifikasi, mereka harus memeriksa kembali dengan melakukan wawancara terhadap korban atau pengungsi.

Prinsip kesederhanaan dalam siaran pers TNI tercapai dengan baik karena berita bersifat langsung pada intinya. Walau begitu, kesederhanaan ini tertutupi oleh banyaknya istilah yang sulit dipahami oleh sipil atau media massa. Istilah-istilah seperti jabatan dan pangkat, Alkapsus dan SIKIP kurang dimengerti dan membutuhkan penjelasan lebih jauh.

Prinsip reaktif atas peristiwa tidak banyak tercermin pada siaran pers TNI. Hal ini karena sejumlah peristiwa yang diberitakan merupakan berita yang bersifat positif. Media sendiri tidak terlalu tertarik dengan berita positif. Memang dalam wacana bencana, prinsip ini sedikit banyak diakui oleh narasumber wartawan sebagai prinsip yang semestinya tidak digunakan. Seharusnya dalam bencana, tidak ada lagi pandangan "*bad news is a good news*" tetapi berubah menjadi "*good news is a good news*". Gambaran kecenderungan media massa untuk mengambil "*bad*

*news is a good news*” terlihat pada paparan personil Satgaspen TNI mengenai dapur lapangan yang terbakar. Satgaspen TNI sendiri akhirnya mampu mengatasi masalah ini secara persuasi.

Prinsip berbasis peristiwa hampir tercapai dalam seluruh siaran pers TNI. Untuk mengetahui prinsip ini, petunjuk utama adalah judul dari siaran pers tersebut. Beberapa judul tidak menunjukkan peristiwa seperti berita pertama, kedua, keempat, keenam, ke-12, dan ke-15. Judul-judul ini tidak mencerminkan basis peristiwa yang digunakan siaran pers. Sebagai contoh, berita ke-12 berjudul “Peranan Zipur dalam penanggulangan bencana Merapi”. Judul ini tidak menunjukkan adanya peristiwa, yang ditandai oleh penggunaan kata kerja aktif (me-, meng-). Judul lebih mirip dengan judul laporan untuk jangka waktu panjang sehingga tidak menekankan aspek pentingnya berita untuk dibaca segera. Sementara itu, berita ketiga, kelima, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, kesebelas, ke-13, dan ke-14 telah memenuhi prinsip basis peristiwa. Sebagai contoh, berita kesepuluh tentang Dharma Pertiwi bantu korban merapi menunjukkan kata kerja “bantu” sehingga mengesankan peristiwa datangnya Dharma Pertiwi ke lokasi pengungsian Merapi. Tabel 4.1 menunjukkan evaluasi terhadap judul-judul siaran pers berdasarkan prinsip basis peristiwa.

Prinsip objektif tercapai lewat keunikan berita yang dibuat oleh Satgaspen TNI. Media massa pada umumnya tidak dapat berada dalam posisi seperti Satgaspen untuk memperoleh informasi langsung dari tempat kejadian, baik karena faktor keamanan maupun faktor sumberdaya. Satgaspen TNI, karena melekat pada Satgas TNI PB Merapi, dapat langsung memperoleh informasi dari kejadian sehingga dipandang objektif dibanding media massa yang hanya dari sumber kedua.

**Tabel 4.1 Pemenuhan Prinsip Berbasis Peristiwa dalam Siaran Pers  
Satgaspen TNI**

<b>No berita</b>	<b>Judul</b>	<b>Kata kerja</b>	<b>Basis peristiwa</b>
1	Dapur lapangan TNI untuk pengungsi Merapi	Tidak ada	Tidak ada
2	Satgas Brigade Khusus TNI PB Merapi	Tidak ada	Tidak ada
3	TNI gunakan Alkapsus evakuasi korban merapi	Gunakan, evakuasi	TNI mengevakuasi korban Merapi
4	Code tanggap Merapi	Tidak ada	Tidak ada
5	Satgas TNI Gunakan Mobil Pintar SIKIB Bantu Korban Merapi	Gunakan, bantu	Satgas TNI membantu korban Merapi
6	Gelar perhubungan Satgas TNI PB Merapi	Tidak ada	Tidak ada
7	TNI perketat daerah rawan Merapi	Perketat	TNI membantu masyarakat agar tidak memasuki daerah rawan yang bisa mengancam hidupnya
8	TNI bantu warga bersih desa lereng Merapi	Bantu, bersih	TNI membantu masyarakat mengembalikan kondisi kehidupan
9	Dansatgas TNI tinjau langsung pos pengamatan Merapi	Tinjau langsung	TNI mengawasi ancaman yang dapat terjadi kepada masyarakat
10	Dharma Pertiwi bantu korban Merapi	Bantu	Dharma Pertiwi ikut membantu masyarakat
11	Dansatgas TNI pimpin penyisiran di lereng Merapi	Pimpin, penyisiran	TNI memberikan rasa aman pada masyarakat yang merasa kehilangan
12	Peranan Zipur dalam penanggulangan bencana Merapi	Tidak ada	Tidak ada
13	TNI bersihkan Candi Borobudur	Bersihkan	TNI membantu masyarakat mengembalikan kondisi kehidupan
14	TNI perkuat tanggul bantaran Kali Code	Perkuat	TNI membantu usaha pencegahan bencana
15	TNI excellent tangani bencana Merapi	Tidak ada	Tidak ada

Prinsip keseimbangan dalam siaran pers TNI tidak dapat dikonfirmasi karena sifat dari PR TNI yang bertujuan menjaga citra positif TNI di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan prinsip verifikasi. Wartawan

tidak dapat sepenuhnya mengutip seluruh berita dari Satgaspen TNI karena siaran pers dinilai hanya mencakup satu sisi, sementara media massa menganut prinsip *cover both sides*. Mereka membutuhkan informasi dari pihak lain mengenai kebenaran berita yang dibuat oleh Satgaspen TNI tersebut. Informasi ini sendiri tidak ditemukan dalam siaran pers Satgaspen TNI karena tidak ada wawancara dengan korban atau pengungsi.

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Kualitas Informasi yang dihasilkan Satgaspen TNI
  - 1) Kualitas informasi yang disampaikan oleh Satgaspen TNI telah sesuai dengan indikator perspektif normatif yaitu kecepatan, pemberian kepastian, pemberian harapan, dan menunjukkan citra positif TNI. Masih terdapat kekurangan dalam dimensi akurasi data kuantitatif. Akurasi data kuantitatif yang digunakan Satgaspen TNI lebih bersumber pada data yang resmi karena mempermudah pertanggungjawaban. Puspen TNI meningkatkan kualitas informasi dari Satgaspen TNI dengan menambahkan kelengkapan selain unsur 5W1H yang sudah terpenuhi sehingga lebih akurat. Adanya kekuranglengkapan disebabkan oleh situasi yang menuntut Satgaspen TNI untuk bekerja cepat dan langsung mengirimkan berita sesegera mungkin. Selain dua hal di atas, Puspen TNI juga memperbaiki kesalahan ketik dan memasukkan pesan-pesan dari pimpinan untuk menjadikan siaran pers utuh dan tidak salah penafsiran.
  - 2) Kualitas informasi yang disampaikan oleh Satgaspen TNI belum sesuai dengan indikator perspektif media massa yaitu verifikasi, kesederhanaan, reaktif, berbasis peristiwa, dan seimbang. Kualitas informasi hanya unggul dalam dimensi akurasi, namun tidak benar-benar baik. Dimensi akurasi dipandang baik karena Puspen TNI telah menambah kelengkapan data dan TNI sendiri dipandang lebih mampu mengumpulkan data dengan akurat

dibandingkan media massa dalam kasus bencana. Sungguhpun demikian narasumber media massa masih menilai belum sangat akurat karena masih kurang lengkap. Kaidah cek dan ricek (verifikasi) “terkesan” hanya dilakukan berkaitan dengan data kuantitatif. Hal ini disebabkan data kualitatif sudah dapat dipastikan kebenarannya, dan Satgaspen TNI langsung mendatangi sumber kejadian. *Press release* kurang dari segi kesederhanaan karena menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti, terlalu formal, dan tidak mengikuti standar berita media massa. *Press release* juga dinilai kurang dari segi reaktif karena beberapa masih terlalu umum dan terlihat terencana. Aspek berbasis peristiwa dinilai kurang karena *press release* lebih berfokus pada kegiatan TNI, bukan pada peristiwa yang dihadapi oleh TNI. Aspek seimbang dinilai kurang karena tidak ada pengumpulan data lewat wawancara. Aspek objektivitas *press release* telah terpenuhi dengan sendirinya karena langsung memperoleh informasi dari lokasi kejadian sehingga dipandang objektif.

- 3) Secara umum, para Pakar PR menyarankan peningkatan kemampuan jurnalistik pada Satgaspen TNI, sehingga informasi yang disampaikan berkualitas bukan hanya dari segi beritanya namun juga penyampaiannya.
- b. Kualitas informasi yang dihasilkan media massa

Media cenderung melihat *press release* yang dikeluarkan Satgaspen TNI pada umumnya kurang berkualitas dari segi jurnalistik. Akibatnya mereka harus mengetik dan mendesain ulang *press release* agar menarik dan sesuai dengan kaidah jurnalistik. Cara ini dimaksudkan agar *press release* dari TNI memiliki pesan yang kuat, konkrit, dan menarik untuk dibaca masyarakat. Hal ini berpotensi pengabaian karena tergantung pada kesiapan waktu dari media.

- c. Upaya yang dilakukan Satgaspen TNI dalam mengawal kualitas informasi

Satgaspen TNI telah mampu mengawasi kualitas informasi yang disampaikannya dengan melakukan klipring dan *surfing* atas berita-berita terkait di media setelah berita tersebut diterbitkan. Tidak ada masalah dalam bentuk penambahan atau pemblokiran informasi. Masalah yang ada adalah pengurangan informasi demi kepentingan pemberitaan yang masih dapat ditolerir.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian disarankan sebagai berikut:

- a. Personil Satgaspen TNI belum memahami cara media massa dalam mengumpulkan informasi misalnya dengan melakukan wawancara terhadap orang-orang tertentu di lokasi kejadian dan mengumpulkan data kualitatif yang paling menarik bagi pembaca. Saran konkrit dari penelitian ini adalah perlu adanya sebuah pelatihan yang berkelanjutan terhadap personil Satgaspen TNI dalam melakukan wawancara dan menulis. Pelatihan ini dilakukan dengan bekerjasama dengan media massa.
- b. Personil Satgaspen TNI harus mampu bekerjasama dan membangun hubungan baik dengan media massa sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan. Secara konkrit hal ini dapat dilakukan dengan TNI yang berinisiatif membentuk organisasi persaudaraan media-militer dan melaksanakan pertemuan silaturahmi dengan mengundang pihak media massa untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan hubungan mereka atau kasus tertentu.
- c. Pemberitaan yang dikirim oleh Puspen TNI ke media massa harus memperhatikan kecenderungan dan jenis media massa sehingga

dapat ditemukan cara yang optimal agar informasi dapat diambil dan disampaikan sebaik mungkin

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Auf der Heide, Erik. 1987. *Disaster Response: Principles of Preparation and Coordination*. Center of Excellence in Disaster Management & Humanitarian Assistance.
- Bakornas PB. 2007. *Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia*. Jakarta: Bakornas PB.
- BNPB. 2011. *Indeks Rawan Bencana Indonesia*. Jakarta: BNPB
- Boeije, H.R. 2009. *Analysis in Qualitative Research*. London: Sage.
- Chism, N.V.N., Douglas, E., Hilson, W.J. 2008. *Qualitative Research Basics: A Guide for Engineer Educators*. Rigorous Research in Engineering Education.
- Creswell, John. 2009. *Research Design*. University of Nebraska Lincoln
- Cocoran, Tony. 2011. *Returning Information Manajemen in Defence*. Australia DoD
- Dagron, A. G. 2001. *Making waves: Stories of participatory communication for social change*, New York: Rockefeller Foundation
- Hall, J.R., Neitz, M.J., Battani, M. 2003. *Sociology on Culture*. London: Routledge
- Leoni, B., et al. 2010. *Disaster Through a Different Lens: Behind Every Effect, There is a Cause*. ISDR.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Dep P&K
- MOD. 2011. *MOD Information Strategy*. UK DoD
- Nazir, M. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nugroho, A. 2010. *Komunikasi Pembangunan dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Kerangka Pembangunan Masyarakat Mandiri*. Universitas Diponegoro.
- Nugroho, Y., Putri, D.A., Laksmi, S. 2012. *Mapping the Landscape of the Media Industry in Contemporary Indonesia*. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance
- Pollack, J.H., Wood, J.D. 2010. *Enhancing Public Resilience to Mass-Casualty WMD Terrorism in the United States*. VA: Defence Threat Reduction Agency.

- Presiden RI. 2012. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012*. Jakarta: Bappenas.
- Puzon-Diopenes, V., Mushed, Z. 2006. *Community-Based Disaster Risk Management and the Media*. Bangkok: PDRSEA
- Quarantelli, E.L. 1986. *Organizational Behavior in Disaster and Implications for Disaster Planning*. Maryland: Federal Emergency Management Agency.
- Saunders, M.L.P., Thornhill, A. 2007. *Research Methods for Business Students*. 4<sup>th</sup> Edition. London: Pearson
- Scott, D., Usher, R. 2011. *Researching Education*. 2<sup>nd</sup> Edition. London: Continuum
- Shoemaker, P.J., Reese, S.D. 1996. *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content*. 2<sup>nd</sup> Edition. NY: Longman.
- Smith, A., Halstead, B., Esposito, L., Schlegelmilch, J. 2012. *Social Media and Virtual Platform: The New Situational Awareness for Emergency Management Professionals*. New Haven: YNH-CEPDR
- Soeroso, S. 2004. *Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Indonesia*. Jakarta: ESC.
- Wahyono Teguh, 2004. *Sistem Informasi : Konsep Dasar, Analisis Desain dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

#### **Jurnal dan Laporan Penelitian**

- Argothy, V. 2003. *Framing Volunteerism in a Consensus Crisis: Mass Media Coverage of Volunteers in the 9/11 Response*. University of Delaware Disaster Research Center Preliminary Paper #335
- Basuki, A.Y. 2012. *Peran Penerangan TNI Dalam "Tanggap Darurat" Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Puspen TNI.
- Burkhart, Ford N. 1987. Experts and the Press Under Stress: Disaster Journalism Gets Mixed Reviews. *International Journal of Mass Emergencies and Disasters* 5 (3): 357-367
- Chant, G. 2002. *What Claims to be New, What is New, and What Should be New in Qualitative Research*. Chant Link & Associates.
- Clark, C.E. 2000. Differences Between Public Relations and Corporate Social Responsibility: An Analysis. *Public Relations Review*, 26(3):363-380

- Covello VT. 2003. Best practices in public health risk and crisis communication. *J. Health Commun.* 8:5–8
- Codita, Roxana. 2010. *Research: Contingency Factors of Marketing-Mix Standardization*, Gabler
- de Czege, Huba Wass. 2009. *The Indivisible Challenge of Military Public Relations*. The Profesional Journal of The U.S. Army
- Dynes, R.R. 2006. Social Capital: Dealing with Community Emergencies. *Homeland Security Affairs*, 2(2):1-26
- Ersoy, M. 2006. *Sociology of Journalism: Traditional Journalism vs Peace Journalism*.
- Faulkner, B. 2001. Towards a Framework for Tourism Disaster Management. *Tourism Management* 22:135-147
- Fry, E.A., Lenert, L.A. 2005. *MASCAL: RFID Tracking of Patients, Staff and Equipment to Enhance Hospital Response to Mass Casualty Events*. AMIA Symposium Proceedings:261-265
- Glass, T.A., Schoch-Spana, M. 2001. Bioterrorism and the People: How to Vaccinate a City Against Panic. *CID*, 34:217-223
- Glik, D.C. 2007. Risk Communication for Public Health Emergencies. *Annual Review of Public Health*, 28:33-54
- Hagan, L.M. 2011. Building the Case for Educating Business Leaders on the Importance of Public Relations. *American Journal of Business Education*, 4(8):43-48
- Hannula, M.S. 2006. Affect in Mathematical Thinking and Learning: Towards Integration of Emotion, Motivation, and Cognition. Dalam *New Mathematics Education Research and Practice*, J. Maasz dan W. Schloeglmann (eds). Rotterdam: Sense, hal.209-232
- Kemp, R. 2004. Homeland Security: Best Practices in America. *Public Works Management Policy*, 8:271-277
- Khattak, A.J. 2002. *Transporation Security Identifying Vulnerabilities through Spatial Analysis of Risk Perceptions*. Southeastern Transportation Center (STC) Security Papers, 37-49
- Latonero, M., Shklovski, I. 2010. "Respectfully Yours in Safety and Service": *Emergency Management & Social Media Evangelism*. Proceedings of the 7<sup>th</sup> International IsCRAM Conference, Seattle, 1-10

- Lindell, M.K. 2006. Preparedness for Emergency Response, *Disasters*, 27:244-274
- McClendon, S., Robinson, A.C. 2012. *Leveraging Geospatially-Oriented Social Media Communications in Disaster Response*. Proceedings of the 9<sup>th</sup> International ISCRAM Conference –Vancouver, Canada, 2-11
- Mileti, Dennis S. and JoAnne DeRouen Darlington. 1995. Societal Response to Revised Earthquake Probabilities in the San Francisco Bay Area. *International Journal of Mass Emergencies and Disasters* 13:119-145
- Nugroho, Y., Putri, D.A., Laksmi, S. 2012. *Mapping the Landscape of the Media Industry in Contemporary Indonesia*. Jakarta: CIPG, Hivos, Manchester 1824
- O'Brian P., Mileti, D. S. 1992. Citizen Participation in Emergency Response Following the Loma Prieta Earthquake. *International Journal of Mass Emergencies and Disasters*, 10:71-89.
- Pauchant, Thierry C. , Mitroff and Patrick Lagadec. 1991. *Toward a Systemic Crisis Management Strategy: Learning from the Best Examples in the US, Canada and France*. Crisis Manajement vol.II. Sage
- Phillips, Brenda D. 1986. The Media in Disaster Threat Situations: Some Possible Relationships Between Mass Media Reporting and Voluntarism. *International Journal of Mass Emergencies and Disasters* 4 (3): 7-26
- Puspen TNI. 2010. *Laporan Pelaksanaan Tugas Satuan Tugas Penerangan dalam Penanggulangan Bencana Merapi T.A 2010*. Jakarta: Puspen TNI.
- Quarantelli, E.L. 2008. Disaster Crisis Management: A Summary of Research Findings. Dalam *Crisis Management*, Vol. II, editor: Arjen Bouin. London: Sage, hal. 45-56
- Raupp, Juliana. and Van Ruler, A. A. Betteke. 2004. "Trends in Public Relations and Communication Management Research. A comparison between Germany and the Netherlands" *Paper presented at the annual meeting of the International Communication Association, New Orleans Sheraton, New Orleans, LA*
- Reynolds, B., Seeger, M.W. 2005. Crisis and Emergency Risk Communication as an Integrative Model. *Journal of Health Communication*, 10:43-55
- Sellnow, T.L., Seeger, M.W., Ulmer, R.R. 2000. *Chaos Theory, Informational Needs, and Natural Disasters*. Central States Communication Association Annual Conference, Detroit, MI.

- Steyn, APR Benita. 2002. *From 'strategy' to 'Corporate Communication Strategy': a Conceptualisation*. Paper delivered at the 9th International Public Relations Research Symposium, held at Lake Bled
- Washer P. 2004. Representation of SARS in the British newspapers. *Soc. Sci. Med.* 59:2561–71
- Xiaoge, X. 2009. Development Journalism. Dalam K. Wahl-Jorgensen dan T. Hanitzsch (Eds), *The Handbook of Journalism Studies* (pp.357-370). New York: Routledge

### **Artikel Internet**

- Freedman, D. 2003. Witnessing Whose Truth? <http://www.OpenDemocracy.net>  
(ditelusuri 5 Oktober 2012)
- McEntyre, D.A. 2005. Disaster Response Operations and Management. <http://training.fema.gov/EMIWeb/edu/docs/drom/Session%2017%20-%20Managing%20the%20Media.doc> (ditelusuri 5 Oktober 2012)
- Sandman PM. 2003. *Four kinds of risk communication*. <http://www.petersandman.com> (ditelusuri 5 Oktober 2012)

## INDIKATOR KUALITAS INFORMASI SIARAN PERS PUSPEN TNI

Nara sumber	Perspektif Normatif					Perspektif Media						
	Kecepatan	Keakuratan	Pemberian kepastian	Pemberian harapan	Menunjukkan citra positif TNI	Akurasi	Verifikasi	Sederhana	Reaktif	Berbasis peristiwa	Objektif	Seimbang
UPN Veteran							X	X				X
Univ. Sahid					√		X					X
UI	√				√	√		√				
Univ. Bakrie					√		X	X		X		X
Jubir TNI PB	√	√	√	√	√	√						
Perwira Pers	√	√	√	√	√	√						
Tribun Jogja							X			X		X
Suara Karya								X				
Antara							X			X		
RMO								X	X	X		
Puspen 1	√	√	√	√	√							
Puspen 2	√	X	√	√	√							

## Matriks Hasil Wawancara Wartawan

Pertanyaan	M dari Tribun Yogya	FS dari Suara Karya	BSB dari Antara	AP dari Rakyat Merdeka Online
Pengalaman bertugas di Merapi?	<p>Kebetulan waktu itu bertepatan dengan gunung meletus. Tapi kan kita berjejaring. Berita-berita yang terjadi sebelum tanggal tersebut dipakai di Tribun Yogya. Karena secara resmi, Tribun Yogya baru 12- 13 desember. Kita sudah ada orang yang mempersiapkan sebelum gunung meletus.</p> <p>Kebetulan ya tanggal 26 oktober 2010 itu meletus sore, saya lagi di atas. Sore-sore jam 7 saya masih disitu dengan teman-teman. Paling akhirnya saya yang selamat bertemu Mbah Marijan. Setelah itu kita sudah banyak di bawah. Mulai dari pos pengungsian paling atas, dan seterusnya, kita aktif betul waktu itu. Ketika 1</p>	<p>Kalau secara langsung aku belum pernah kerjasama dengan TNI. Ada beberapa lah orang dari kopasus, marinir, kodam setempat. Tapi tidak ada ikatan resmi. Aku diajak teman dari DPR pernah ke Merapi. Memang kondisinya untuk mendapatkan informasi dari TNI itu yang paling valid. Karena saat itu mereka yang turun ke lapangan, mereka yang ada di Ring 1. Mereka paling kredibel, orang yang pertama turun, paling teliti terhadap data, terus mereka tidak sembarangan dalam bermain data, walaupun data-data mereka untuk internal mereka saja. Cuman persoalannya mereka punya data untuk dipublish mereka</p>	<p>Dulu waktu saya mengajar para perwira itu kelemahan siaran pers itu ada tiga R: tawar, hambar, dan datar. Tawar karena tidak disiapkan sebuah apa yang dimau oleh wartawan. Hambar karena tidak disiapkan sebuah jabatan atau orang yang paling tinggi untuk memberikan kualitas siaran pers. Datar karena ia tidak disusun sesuai format jurnalistik. Jadi, judul ada syarat-syaratnya, ada gaya-gaya penulisan wartawan, ada quotation, dsb, gitu.</p>	<p>Kebetulan kalau ke lapangan saya belum mengalami, jadi reporter kita yang turun. Seperti Permana ini minta izin kita, dulu posnya di Stadion Unggul Harjo. Akhirnya dia laporan ke sana. Intinya baik normal ataupun bencana harus ada verifikasi berita. Paska dari itu kita verifikasi ulang. Karena kita situs berita, jadi cover both sides itu di perimbangan berita. Misalnya versi TNI, versi BNPB, dan semua seperti itu. Sampai kita tetapkan si reporter itu bertahan atau kembali ke situasi awal.</p>

	<p>November di sini ada banyak wartawan, juga kawan-kawan di lapangan.</p>	<p>butuh proses. Berita harus diproses lagi oleh komandan satgasnya. Jadi proses birokrasi ini yang membuat berita sampai ke media itu makan waktu lama. Kalau saya lihat, proses ini karena berkomando. Semestinya ada satu yang bertindak sebagai PR. Kalau sebagai PR, ia dapat bertanggung jawab penuh atas beritanya. Sementara untuk informasi seperti itu kan mereka sudah hitung-hitungan waktu. Tidak bisa terlambat untuk berita bencana. Seperti itu, tapi mereka tetap harus ada birokrasinya, itu yang sulit. Jadi, untuk data valid tapi untuk prosesnya lambat. Cuman seharusnya di kalangan atas harus ada yang memilah-milah, mana informasi yang dianggap dokumen negara mana yang bukan. Kalau Merapi kan tidak dapat dikatakan dokumen negara karena tidak boleh terlambat.</p>		
--	--	---	--	--

		<p>Kedua, itu data-data itu mereka sadur itu tidak teliti. Data-data penting untuk good news tidak bisa muncul kadang-kadang karena sudah dipenggal-penggal dari atasnya.</p> <p>Kalau kita dikasih semua informasi ya enak. Kan mereka beda dengan orang sipil atau LSM yang ngasih data. Kalau mereka memberi data berdasarkan pengamatan-pengamatan tapi tidak turun ke lapangan. Yang turun ke lapangan itu TNI. Walaupun dibandingkan dengan Polri, TNI itu datanya yang paling bagus.</p>		
<p>Bagaimana press release dari TNI diolah?</p>	<p>Jadi kita sebenarnya ada yang rilis kita jadikan berita langsung, atau ada yang kita ketik ulang, sesuaikan dengan gaya berita kita, juga ada yang kita cek ulang. Karena hampir semua rilis, tidak hanya TNI tapi hampir semua lembaga, itu lebih mengedepankan aspek penting dari misi mereka. Tapi kita pengen lebih</p>	<p>Kalau di kotak-katik itu wajib ya. Dalam pengolahan bahasa itu tadi. Mungkin ada satu yang harus dipenuhi oleh staf penerangan. Tidak boleh berdasarkan pikiran dia tapi harus berdasarkan keputusan komandannya. Ujung-ujungnya bahasa dan datanya itu amburadul karena sepertinya harus</p>	<p>Pertama-tama ada enam cara wartawan memperoleh berita. Satu melalui reportase, yaitu melihat, menyaksikan sendiri. Kedua, dengan wawancara, wawancara itu memberi makna atas fakta. Ketiga, lewat press release. Keempat, lewat kantor berita asing. Kelima, lewat mengikuti jumpa pers. Keenam, lewat browsing</p>	<p>Sebenarnya seperti rilis-rilis yang lain, kita pasti konfirmasi ulang. Kita sms puspen apa benar lalu verifikasi juga isi berita. Kan ini panjang, jadi kita potong. Kita kan media online, makanya berita-beritanya singkat. Jika nanti ada angle-angle menarik dari TNI kita ambil. Kalau panjang kita potong jadi dua atau tiga berita jadi tetap komprehensif.</p>

	<p>detail aspek yang ada di balik itu. Misalnya Dapur Umum, yang dibuat TNI seperti apa sih, kita tidak sekedar ingin tahu kalau TNI buat dapur umum. Kita pengen tau, bagaimana tentara yang laki-laki itu bisa memasak, bagaimana prosesnya para tentara mengaduk sayur sekian banyak itu, tetapi itu tidak pernah diberikan dalam rilis-rilis. Yang ada hanya sekedar TNI ada di dapur umum, TNI ada di tim evakuasi, TNI ada di tim kesehatan, yang penanggung jawabnya bapak ini, sudah, begitu saja. Tidak pernah ini menggunakan alat apa, gambarnya pun tidak, ini tahan tidak terhadap wedus gembel, kira-kira yang seperti itu kan tidak pernah tergambarkan. Jadi kalau sekedar informasi awal kita lempar, kalau ada soft copynya kita edit, kalau memang perlu kita tanyakan apa sih dibaliknya.</p>	<p>mengikuti proses yang sudah ditentukan TNI. Kalau berita tersebut langsung diturunkan, publik jadi bertanya: ini yang buat wartawan atau bukan? Ujung-ujungnya harus kita olah bahasanya itu sehingga menarik. Tapi untuk mengolah itu, bukan persoalan bagi kami, karena sudah makanan kita sehari-hari. Kita tinggal baca, tutup, kita buat sendiri, tidak sulit lah, yang penting data utamanya ada pada kita.</p>	<p>internet. Fungsi jurnalistik yang paling kuat ada di pertama dan kedua yaitu melakukan reportase dan wawancara. Unsur-unsur objektivitas harus kuat dan ada juga balance dan relevance. News value harus ada. Artinya ada dampak. Misalnya seberapa banyak uang yang dikeluarkan, berapa jumlah korban, berapa jumlah rumah yang hancur, dan sebagainya. Unsur-unsur berita harus ada yaitu what, who, why, when. Berita yang bagus harus memunculkan sebuah why dan how, disitu bagaimana wartawan mencari berita.</p>	
<p>Bagaimana hubungan media</p>	<p>Saya kira dalam hubungan pada bencana Merapi itu</p>	<p>Antara komunikatif ya, dibidang tidak komunikatif</p>	<p>Bagi media bagus, ketika TNI mengambil peran.</p>	<p>Kalau untuk kasus Merapi ya membantu sekali, karena kita butuh</p>

<p>massa dengan TNI?</p>	<p>tidak ada yang tidak baik. Seringkali disampaikan di mana-mana kalau bencana Merapi itu menyatukan perasaan semua orang. Ini sisi kemanusiaan. Kita bisa segera tahu. Ketika di lapangan, wartawan bisa mengerti kalau kita menggunakan fasilitas negara bersama TNI, ada hal-hal yang harus dijaga kerahasiaannya. Ini kita mengerti. Kalau di tempat pengungsian, itu sudah tidak ada halangan, jadi kita merasa aman. Kita sama-sama merasa dalam satu misi kemanusiaan. Jadi saya bisa ketika tanggap bencana fine-fine saja dengan TNI. Kita juga enak saja kalau ketemu komandan. Karena mereka juga tahu dalam situasi seperti ini tidak perlu prosedur yang terlalu rumit.</p>	<p>ya juga. Jadi tetap ada kekhawatiran orang TNI terhadap media massa. Mereka menganggap media massa itu musuh. Dia menganggap yang disampaikan media itu yang jelek-jelek saja. Misalnya begini, kita sudah berteman akrab, kalau ada kekurangan dari teman saya, tidak akan saya sampaikan, karena ia pasti menyampaikan alasan-alasan, mungkin untuk kepentingan nasional. Ada satu pertimbangan dan wartawan melakukan pertimbangan itu. Tapi yang ada memang mereka seperti memisahkan diri, tapi mungkin ini karena ada proses komandonya. Tingkatan-tingkatannya untuk informasi itu. Jadi komunikatif itu antara komunikatif dan tidak komunikatif, ya relatif lah. Cuma wartawan itu ingin orang yang ditemuinya itu komunikatif, terbuka gitu. Mungkin komandan itu</p>	<p>Karena itu penting. Saya mungkin berbeda pendapat. Saya banyak meliput berita di Hankam hampir 5 tahun, di Polkam sejak 92. TNI menjalankan fungsi sosial, dimana-mana juga begitu, di Amerika juga begitu. Itu mengimbangi peran yang terkesan angker dan sadis. Itu bagus, disitu point TNI milik rakyat. Kalau yang lain nggak, hanya TNI kuat. Kalau pandangan media terhadap TNI dari kacamata bencana bagus karena menunjukkan respon. Tentara berani, sementara yang lain tidak berani, itu memberikan harapan. Kehadiran tim penolong dalam bencana itu memberi optimisme karena bencana itu umumnya memberi kesan pesimisme. Nah itu satu point buat TNI.</p> <p>Ada beberapa hal, kalau dekat, lancar bagus. Kalau terima Press Release kita ditelpon, di sms, atau di BBM. Kalau perwira baru kenal, biasanya hanya lewat fax. Itu tidak cukup karena fax itu akan diedarkan ke tempat lain dan dikerjakan</p>	<p>berita dari berbagai versi. Kan kalau versi berita BNPB terus kan gak lucu. Mungkin rilis dari TNI ini ada angle baru yang menarik. Misalkan tentang bagaimana TNI melakukan relokasi atau penjagaan. "TNI perketat jalan masuk" inikan gak mungkin dari BNPB, jadi ini kita ambil. Kita mendukung baik lah. Positifnya sih pasca reformasi TNI mulai berbenah. Tapi tetap di lapangan ada friksi-friksi. Misalnya tentang backing, TNI membacking usaha hiburan malam. Walaupun tidak ada fisik, tapi tetap ada intimidasi-intimidasi. Kita juga paham, kita hanya verifikasi saja. Mungkin itu saja hal-hal yang membentuk jarak antara wartawan dan militer. Untuk saat bencana positif, negatifnya di luar bencana.</p>
--------------------------	---	--	--	--

		<p>bisa ngomong begini, “ini gak usah dikutip ya, hanya sebatas tau saja”, seperti itu.</p>	<p>kalau kita punya waktu. Itu harus ditelpon, untuk memastikan apakah dikerjakan sekaligus memberi lanjutan informasi. Tugas perwira penerangan yang bagus menurut saya adalah membanjiri media dengan informasi. Ia tidak menunggu. Kalau menunggu nanti malah diserang. Kalau proaktif mengesankan kalau tidak ada yang disembunyikan. Seperti dulu, saya pernah ditanya, mengapa kalau TNI memberi keterangan kalau tidak ada pembantaian di Aceh, tidak ada penembakan di Papua, dianggap publik dan wartawan benar ada pembantaian. Karena itu bohong. Itu tantangan bagi perwira penerangan. Ia harus menjelaskan kebijakan yang sering bertentangan dengan media. Seringnya mereka tidak siap. Karena dari kami, TNI masuk daftar top 10 Newsmaker karena berkaitan dengan publik banyak: perang misalnya, atau bencana. Perwira juga selain aktif, ia juga</p>	
--	--	---	---	--

			<p>menciptakan rutinitas. Ia harus diberi dan memberi informasi rutin. Karena kegiatan TNI itu banyak. Positifnya seperti itu. Ada yang mau dimintai keterangan. Negatifnya, seringkali mereka menjawab no comment, gak mau, atau bahkan gak peduli.</p> <p>Yang kedua tentang kemampuan seorang perwira. Seorang dalam tataran kapten harus sudah bisa diberi kebijakan menjelaskan walaupun hanya menjelaskan faktual saja. Ketika didesak lebih jauh, jangan main di tataran policy, karena itu di atas level kolonel. Cukup jawab, kasad ada? Ada. Ada kejadian apa? Sedang kita cek. Begitu.</p> <p>Yang ketiga, peran puspen bagi saya, melihat cara berpikir media. Seringkali nggak. Seringkali media hanya dijadikan alat. Akibatnya media posisinya berubah. Sekarang media mau jadi penguasa. Makanya cara paling cepat adalah lewat mengindustri. Dengan mengindustri, posisi tawarnya jadi tinggi dalam</p>	
--	--	--	--	--

			<p>suatu sistem. Mereka bisa beli berita kalau banyak uang. Jadi lebih pada sikap negatif yang cuek, tidak mau tau jenis-jenis media. Krisis misalnya, mana yang harus didahulukan: TV, radio, internet, cetak.</p> <p>Yang positif adalah sudah banyak anak mudanya mau mempelajari media. Tapi persoalannya media dipelajari sebagai apa. Sebagai partner atau apa. Kalau yang positif, mereka rata-rata mampu, yang senior biasanya.</p>	
<p>Bagaimana kualitas informasi press release TNI menurut anda? (dalam pespektif media: akurasi, verifikasi, sederhana, reaktif, berbasis peristiwa, obyektif, seimbang)</p>	<p>Saya kira begini, bahwa secara umum, baik itu rilis dari TNI atau organisasi lain, ketika bencana atau normal, kadang kala gini, ada hal-hal, ini semua lembaga ya, tidak terlalu memahami kepentingan media. Yang dirilis hanya kepentingan mereka. Dikiranya hanya itu. Tidak pernah mereka berpikir kalau ini harus dimuat media dan kita harus informasikan seperti ini agar kepentingan media juga terpenuhi. Yang ada</p>	<p>Kalau satgaspen sebagian besar komunikatif. Ya ada juga yang congkak, itu kita cuek saja. Karena saya sudah alami itu jadi saya tau. Letkol Hari misalnya orangnya relatif komunikatif, hanya memang agak kaku. Ego-ego itu biasa muncul dari seorang TNI. Misalnya yang dari akademi terhadap yang wamil itu beda. Saya punya teman bagian penerangan, tapi</p>	<p>Bagi kami, press release yang kami peroleh umumnya tidak sesuai. Itu tidak sesuai dengan naluri wartawan karena kami seolah disuapi begitu saja. Jadi ada dua sikap media. Press release itu bagus atau tidak. Jika tidak, kita tambahi dengan wawancara untuk memberi makna lebih dari berita tersebut. Press release yang kita terima umumnya kita bongkar. Umumnya memang tidak memenuhi nilai berita dan struktur berita, misalnya</p>	<p>Ya karena versinya beda, misalnya penulisan nama dan pangkat. Si Fulan binti Fulan biasanya paragraf selanjutnya kita tulis namanya saja. Tapi kalau TNI kan terus ada pangkatnya. Jadi panjang gitu. Yang kedua content berita. Misalnya "TNI bantu warga lereng Merapi". Inikan umum. Jadi kita buat lebih spesifik.</p>

hanya seperti tanggal sekian akan ada acara seperti ini, sudah begitu. Coba, apa ini menariknya. Misalnya ada devile, kalau ada salah satu yang menggunakan payung batik misalnya, itu kan menarik. Itu tidak pernah terpikir. Ini semua lembaga, jadi bukan sikap, tapi materi. Sehingga yang dimuat ya hanya berita dua tiga alenia selesai. Kan sama sekali tidak menarik. Sesuatu yang bisa di informasikan, prestasi-prestasi yang luar biasa, itu unik, itu menarik, itu yang jarang diperhatikan. Acaranya apa sih? Cukup gitu. Coba misalkan, dari lembaganya ini yang tidak pernah dilakukan apa ya? Itu kan menariknya. Tidak menghilangkan aspek penting juga. Tetap juga isinya sama. Tapi kalau cara begini doang tidak ada yang baca. Jadi yang menarik itu apa, jadi informasinya seperti apa, misalnya "Satgas TNI Gunakan Mobil Pintar, hanya gini doang, kalau ini

seorang bagian penerangan itu tidak boleh bicara pada saya saja, tapi pada semua wartawan. Di lapangan, memang saya dianggap orang senior yang lebih tau TNI gitu lah.

tidak sesuai dengan piramida terbalik. Jadi yang paling penting ditaroh di lokasi yang sebenarnya tidak penting. Siaran pers yang diterima dari pemerintah itu seperti sebuah TOR, ada pendahuluan, seperti pidato lah. Jadi wartawan biasanya melihat langsung ke bagian akhir karena biasanya disitu letak yang paling penting. Siaran pers dari TNI juga begitu umumnya. Lemah dalam mencari tahu yang diinginkan wartawan. Kedua unsur-unsur beritanya tidak jelas. Terakhir unsur why. Misalnya: Mabes TNI memutuskan membeli 100 tank Leopard. Mengapa? Pemerintah mengirimkan 1000 tenaga untuk ini-ini? kenapa dikirim? Akibatnya, kita cenderung melihat kembali. Pelan-pelan. Dalam situasi seperti ini, ada tiga hal yang harus dilihat kembali. Pertama, press clear nggak? Kalau sesuai langsung kita buat berita, karena sesuai dengan yang kita inginkan. Ini yang saya dorong. Dapat berita bagus. Diketik. Fit to

kita muat di koran gak ada yang baca. Dari ini kita sajikan itu sederhana. Cukup 2 sampai 3 alenia di atas. Satgas brigade khusus diawaki 90% kowad, misalnya, satgas Merapi khusus menerima, ini kan bukan soal apa-apa. Ini yang menuntut kita tidak dipenuhi TNI dan lembaga-lembaga lain. Misalkan kemaren, ini contoh, ketika akademi AU itu bikin upacara menjelang lebaran. Kata saya dia pinter. Isu yang dimunculkan itu perintah dari gubernur AU untuk semua kadep yang pulang kampung bertugas untuk mengingatkan supir yang ugal-ugalan. Ini akan dibaca. Kalau ketemu masyarakat Jogja, tolong ditegur kalau ada kadep yang tidak mengingatkan supir. Padahal isinya hanya pelepasan kadep untuk libur lebaran saja. Makanya saya bilang dia pinter. Satgas TNI .... Ini saja. Gak ada yang menarik. Jadi kepala itu harus menariklah. Setelah baca,

print. Kedua, so-soul. Bagus tapi kalau ada waktu baru kita kerjain, atau nggak sama sekalinya. Kondisinya siaran pers dari Mabes TNI penting tapi tidak tahu bagaimana menulisnya. Jadi itu kita dudukkan kembali. Misalnya menggunakan piramida terbalik. Judul misalnya, harus punya sound bite, konkrit, 5-7 kata, tidak abstrak. Misalnya: RI Ultimatum Malaysia tentang Ambalat. Ultimatum itu konkrit dan clear. Ia memberi strong message. Coba bandingkan dengan ini: Pemerintah Keluarkan Kebijakan Ekonomi Baru. Gak jelas kan? Abstrak. Lebih baik: Pemerintah Larang Impor Beras. Kemudian kalimat harus aktif, me-, me-, ber-, itu penting. Yang terakhir kesimpulan judul dan rekomendasi. Itu yang banyak kita dorong. Di pelatihan TNI, saya mainnya selalu di lit dan judul, gak mau berita. Karena nanti itu mengikut. Setelah itu unsur 5W + 1H nya. Setelah itu, biasanya dilengkapi dengan data-data nggak. Itu sering

	<p>o menarik, ia baca terus. Kalau dari depan sudah tidak menarik, ujung-ujungnya tidak sampai juga ke masyarakat. Jadi soal materi, bukan sikap. Semuanya saudara waktu bencana. Semua golongan, semua jabatan, wartawan ketika disana, kalau sudah meliput, kita bantu-bantu, kita tidak mentang-mentang saya wartawan, kalau saya yang dekat ya saya yang bantu. Itu mampu, tidak terkecuali terhadap tentara.</p> <p>Kita kembali ke rilis oleh Puspen TNI atau apa, menurut saya yang paling utama tidak hanya misi mereka saja, tapi kebutuhan media juga diperhatikan. Yang penting menarik, gak harus gede-gede amat. Bahwa isinya sama saja dengan judul "TNI tanggal 5 peringatan Hut TNI" tapi ditonjolkan siapa figur terkenal di masyarakat, ia akan memimpin barisan ini, tapi kalau yang digelondongkan, ya</p>		<p>nggak ditambah, padahal penting untuk memberi konteks berita.</p>	
--	--	--	--	--

	<p>tanggal 5 memang upacara. Kesadaran bahwa rilis informasi pada media tidak sekedar memenuhi kebutuhan dia tapi kebutuhan media juga, yaitu layak untuk diberitakan, unik, enak dilihat, pokoknya prinsip-prinsip umum jurnalistik lah.</p>			
<p>Bagaimana cara anda menjaga kualitas informasi?</p>		<p>Diolah sendiri, tapi itu bukan persoalan yang rumit. Ada yang disampaikan data itu tidak nyambung, tapi itu jarang. Kalau kejadian seperti ini, biasa kita cari sendiri datanya. Intinya bagaimana mendapatkan data supaya nyambung. Seperti wartawan itu mengambil isu tidak kedaerahan tidak lokal, itu tergantung pada angle. Tiap wartawan punya angle masing-masing. Pos Kota misalnya, ia mencari berita lokal. Kalau Suara Karya kan nasional, jadi harus memutar-mutar jeli untuk mengambil isinya. Jika apa yang diberitakan Satgaspen</p>	<p>Metode berita. Karena punya pelanggan jadi kita sampaikan berita ke pelanggan. Beruntung sekarang era konvergensi media. Online, jadi bisa langsung jumpy down ke publik. Kita punya galeri buat publik. Kualitas itu dibentuk oleh tradisi dan sistem. Pertama, Antara menjaga kualitas SDM. Ia harus punya standar S1, bahasa Inggris harus kuat, minimal 500. Karena kita punya dua kaki: satu internasional dan satu dalam negeri. Itu membutuhkan wawasan dan penugasan yang beragam supaya ia memahami dengan jelas perannya. Yang ketiga, memenuhi standar jurnalisme. Itu ada pelatihan. Dengan pelatihan</p>	<p>Kita kan mempertanggungjawabkan jurnalistik kita. Jadi kita verifikasi dan cari perimbangan berita. Itu prinsipnya ABC (akurat, berimbang, dan cepat) agar bisa disebarakan ke publik. Dalam kondisi mencari berita bencana, sensenya beda. Otomatisnya kita kan harus membuat berita dengan memunculkan harapan. Dengan berita seperti ini mereka akan merasa nyaman. Itu kan psikologi massa juga. Dulu kan berita di Silet pernah ada. Itu yang kami hindarkan dari membuat berita. Itu faktornya save juga. Kan konsepsinya ada lima, 5W + 1H + 1S. Jadi membantu warga merasa dirinya aman dan nyaman. Kalau bagi wartawan normal, bad news is a good news, tapi kalau konteksnya bencana, good news is a good news. Tapi dengan catatan, harus melewati proses jurnalistik. Verifikasi, cover</p>

		<p>tidak menyentuh isu lokal, maka kita harus menelpon pemangku kebijakan, misalnya Iskandar Sitompul. Kadang kita bekerja sendiri. Waktu itu kita mengambil statemen Kapuspen. Jadi saya wawancara dia, ambil data, tapi statemen dia tidak saya kutip. Saya ambil dari statemen orang satgasnya saja. Saya bilang ke Kapuspen kalau statemen ia tidak saya kutip karena datanya kurang. Dia bilang oke. Jadi beres.</p>	<p>ada sebuah pemahaman atas objektivitas dan news value. Objektivitas itu sulitlah, tapi kita memaksakan sebuah jurnalisme fakta. Kalau koran masih tidak, banyak opini di dalamnya, anda bisa lihat sendirilah. Kita sulit karena publik kita beragam dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai strata sosial budaya. Jadi kita memakai standar umum. Kemudian pemahamannya mengenai relevance, no bias, cover both sides, balance, dan netral. Objektivitas itu terbagi menjadi dua pilar: ada faktanya dan ada sebuah impartiality, atau ketidakberpihakan. Ada faktanya itu menunjukkan relevansinya. Impartiality merujuk pada netralitas dan juga balance. Itu yang harus dijaga. Dan yang lain penting juga adalah cross check. Disiplin verifikasi. Itu yang membedakan kita dengan citizen journalism. Kalau di Air Asia kan ada slogan: now everybody can fly. Citizen journalism juga</p>	<p>both sides, begitu si mas.</p>
--	--	---	---	-----------------------------------

			<p>begitu, setiap orang bisa jadi jurnalis. Cross check membutuhkan waktu, kemampuan, intelektualitas juga. Kita ini Serving the Public Trust, ini yang memaksa kita untuk menjaga kualitas. Sekarang sedang digugat masalah ini, karena media mengindustri, making news making money. Tapi tetap kepada ujung-ujungnya serving the public trust.</p> <p>Dia diberikan juga sebuah kemampuan lagi, baik itu kualitas menulis, penampilan menulis, dan foto. Karena tidak setiap orang bisa menulis. Itu yang dilatih kualitasnya.</p> <p>Yang ketiga tentang kemampuan melobi. Karena lobi gak sekedar dekat-dekatan tapi juga negosiasi dan diskusi. Dibutuhkannya seorang lobbyist disitu. Makanya sekarang sudah ada konsep thinking journalism. Dia bukan hanya wartawan biasa tapi juga wartawan yang berpikir. Dalam era industri media sekarang, ia harus memikirkan sebuah persoalan. Dulu ia hanya</p>	
--	--	--	---	--

			<p>harus jadi jurnalis, ia hanya tukang lapor, selesai. Habis itu, kualitas narasumber. Karena ada tiga narasumber yang harus dijaga. Pertama, yang punya jabatan tinggi. Kedua, yang punya kompetensi tinggi. Dan ketiga, yang punya prestasi atau kepakaran. Jadi satu tentang SDM, dua tentang keterampilannya, dan ketiga memilih narasumber, kalau tidak publik tidak percaya.</p>	
<p>Bagaimana saran anda atas peran Satgaspen TNI untuk kasus bencana nasional yang akan datang, khususnya terkait dengan hubungan mereka dengan media massa?</p>	<p>Saya lebih dari awal lebih tertarik, kalau hubungan personal sudah clear, sekarang udah gak ada, udah selesai. Yang itu tadi, hubungan yang baik tidak sekedar hubungan personal. Kedua, kebutuhan saya terpenuhi, kebutuhan saya mencari berita yang layak, menarik, unik, tergambar. Kalau kedua kepentingan ini terpenuhi ya selesai. Kebutuhan saya terpenuhi, ketika ada yang baca, datang duit, saya gajian. Pesan dari masyarakat pada tentara itu jadinya baik. Kedua kebutuhan harus sinkron.</p>	<p>Saran saya satgaspen sudah tahu tugas mereka ya. Cuma satu, mereka diberi peran seperti PR. Jadi satgaspen itu sudah cukup untuk memberi informasi ke wartawan. Karena apa, karena komandannya hanya menerima laporan saja kan? Yang tahu lapangan itu satgaspen. Pasti satgaspen sudah didoktrin mana yang boleh mana yang tidak boleh diberitakan. Ini supaya mereka lebih komunikatif dan data yang disampaikan lengkap. Seperti di Konga Konga itukan</p>	<p>Pertama, satgaspen harus punya hubungan di tiga level: di tingkat reporter, editor, dan pemred. Di tingkat reporter, kita bisa memberikan sebuah informasi, rutin, penuh, dan sering. Itu yang dibutuhkan adalah rutinitas, pagi, siang, malam, kayak begitu terus. Nanti dibangun evaluasi setiap minggu. Di level redaktur, perlu ada dialog. Harusnya ada sebuah kepedulian yang lebih luas misalnya, kan seringkali media yang berperan. Jadi media kayak bencana itu agenda publik. Misalnya tentang bantuan yang tidak sampai. Disinilah</p>	<p>Sudah bagus si mas, hanya kita jarang ketemu aja. Misalkan kita sering ketemu, biasa-biasa saja. Kita tidak menempatkan orang secara khusus di Puspen. Kalau di Merapi iya karena itu tempat bencana. Mungkin harus ditingkatkan komunikasi. Dengan komunikasi bisa menjalin kedekatan emosional, kita juga bisa dapat berita yang lebih dalam.</p> <p>Kalau kita dekat, Puspen bisa latihan menulis. Itu bisa berjalan. Kitakan butuh juga tim informasi dari tentara. Tentara juga butuh kedekatan dengan publik untuk menjelaskan. Makanya itu tentara harus belajar menulis.</p>

	<p>Saya bisa saja senang dengan menulis semua keburukan TNI, laku koran saya, tapi bagi TNI apa untungnya. Begitu juga, kalau rilisnya hanya "Tentara masuk desa" ya saya jadi gak gajian. Jadi menurut saya, keseimbangan itu penting. Apa sih kebutuhan bencana, itu media dapat akses sedetil-detilnya atau TNI mampu berkolaborasi dengan wartawan, oke. Misalnya, ayo kita bantuin, ikut ya, kita juga bisa menulis kalau yang habis-habisan berjibaku waktu awal bencana ini TNI. Keuntungan kita, kita tahu persis, jadi clear. Sebenarnya kalau dua kepentingan ini bisa diklopkan, selesai hubungan ini. Cuma kadang-kadang belum banyak dipahami seperti itu. Tapi apa yang membuat ini dibaca orang. Saya lempar di pasar, untuk judul, untuk lit. Cuma lagi-lagi, seringkali, substansinya TNI itu menyampaikan informasi tentang ABCDEF itu</p>	<p>valid karena Lettu Suwandi, itu data-data mereka lengkap karena langsung dari satgaspen. Bahasa ga terlalu penting lah. Yang penting data wartawan sudah cukup itu, bahasa itu bisa diolah oleh wartawan itu sendiri.</p>	<p>para redaktur dan satgaspen membangun sebuah agenda, misalkan mengundang anggota-anggota lain untuk terlibat, meminta bantuan, meminta kepada kepala kelurahan menyediakan ini. Di level pemred minta kepedulian mengapa kita melakukan ini. Intinya harus ada support lah. Kedua, perlu ada juru bicara yang bersedia dekat dengan wartawan. Karena kalau terlalu menggurui media, yang muncul justru sentimen media. Juru bicara itu yang dibutuhkan adalah yang bisa berdialog. Ketiga, pembuatan media center. Di sana ada internet, cetak, ruangan, sistem komputer, semua yang dibutuhkan wartawan.</p> <p>Keempat mesti ada informasi harian. Sebuah press release harian. Jadi banjirilah kami dengan informasi.</p>	
--	--	--	---	--

<p>tercapai. Kita bungkusnya, tetap ABCDEF masuk, tapi informasi yang ingin kita sampaikan bukan "TNI membuat jalan desa" tetapi kalau cerita anak-anak sekolah harus jalan kaki sekian jam, setelah ini ada jalan, mereka hanya beberapa jam, kenapa bisa begini? Nah, ini karena TNI yang buat. Yang seperti ini yang dibaca orang. Ya ini menurut saya ya strategi hubungan dengan media, strategi membuat berita, segala macam lah. Kalau kita memikirkan sepihak, TNI bisa seperti ini, apa untungnya saya? Ini keuntungan bagi TNI. Harus diselesaikan dan dipahami, saya kira itu kuncinya.</p>			
--	--	--	--

## Matriks Hasil Wawancara Ahli PR

Pertanyaan	SD dari UPN Veteran Yogya	TW dari Universitas Sahid	DMP dari Universitas Indonesia	ASE dari Universitas Bakrie
Latar belakang anda?	Ada beberapa yang saya lakukan dalam analisis berita misalyna penelitian saya pada frame berita tentang pilkada. Melalui analisis framing diketahui bagaimana fakta disusun menjadi berita. Inikan saya tidak melakukan ini, yang saya lakukan membimbing mahasiswa terakhir dalam media online yang baru saya lakukan. Dari situ melihat keterlibatan masyarakat lewat citizen journalism dalam bencana Merapi. Ternyata mereka paling intens dalam aspek penanggulangan bencana, sementara pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi kurang terpampang. Kemudian analisis isi di surat kabar Kompas dan Kedaulatan Rakyat. Disana hasilnya narasumbernya banyak dari narasumber aparat keamanan dan kemudian memang	Kalau analisis PR, biasanya dalam prinsipnya melihat PR, orang konsennya pada pencitraan. Jadi kajian-kajian tentang PR diarahkan pada bagaimana pembentukan hubungan jangka panjang, entah itu analisis teks dari berbagai hal. Pengalaman saya dalam riset di bidang PR misalnya tentang loyalitas konsumen di bidang perikanan, saya pernah di Sahid dalam hubungannya dengan masyarakat, juga tentang strategi komunikasi di berbagai departemen seperti di PU atau di departemen perhubungan. Saya bencana tidak persis tapi ketika kasus tsunami saya pernah beberapa kali melakukan penelitian pada penanganan Aceh dalam upaya program kesehatan. Jadi bagaimana komunikasi kesehatan dapat dilakukan di Aceh. Saya juga	Nama saya Dian Putri. Saya dosen ilmu komunikasi. Saya baru satu tahun mengajar. Sebelumnya saya praktisi Pusat Kajian Ilmu Komunikasi UI Depok. Hanya sebentar sih. Dalam menganalisis PR, saya bagian TNI atau bencana belum pernah. Bidang ilmu saya teori komunikasi.	Saya pernah di TPI sekarang MNC TV, dan juga di TVOne sebagai direktur investigasi. Dalam konteks PR saya sering melatih teman-teman. Intinya adalah bagaimana tercipta simbiosis mutualisme tanpa kita harus membayar mereka.

	<p>mayoritas aspek tanggap darurat. Jadi artinya apa, media-media kita dan pemerintah hanya terlibat dalam masa tanggap darurat sementara yang lainnya belum. Tapi kita tahu kalau bicara bencana, harus ada rehabilitasi dan rekonstruksi, itu justru yang paling rawan. Tapi euforia di tanggap darurat padahal bencana Merapi sampai sekarang kan masih belum selesai. Kemudian disana hanya tampak media sendiri kurang mampu mengawal bencana dalam membuat berita.</p>	<p>pernah riset tentang persepsi politik di Aceh. Jadi tidak langsung pada bencana. Biasanya pada kesehatan. TNI saya pernah di riset pertahanan kemhan dalam tim yang meneliti tentang isu PKI. Waktu itu tentang kekiniannya, seperti apa persepsi masyarakat sekarang tentang komunisme.</p>		
<p>Bagaimana kualitas informasi dari press release yang dibuat oleh Satgaspen TNI berikut ini?</p>	<p>Kemudian ini mengenai kualitas informasi. Saya melihat dari sini, dari Puspen TNI dalam membuat berita masih belum menerapkan kaidah-kaidah profesional jurnalistik. Saya mohon maaf, karena disinikan ada kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku. Saya melihat bagian humas di Puspen, ini masih belum berpikiran seperti media, mereka masih berpikiran institusi. Padahal, sebagai seorang PR, ia harus bisa berpikiran seperti media. Artinya fakta-fakta apa yang diinginkan media.</p>	<p>Sebelum bicara kualitas, juga terkait kuantitas. Dalam hal ini sebetulnya TNI sudah ada upaya-upaya membuka diri dalam membina hubungan dengan masyarakat. terus ada kegiatan-kegiatan sosial itu bagus. Kualitas informasi saya bilang sebetulnya sudah ada mulai perubahan. Tapi karena memang ada aspek kerahasiaan yang tetap harus dijaga. Dalam prinsip PR juga begitu. Tetap harus punya filter mana yang harus ia beritakan mana yang harus ia jaga tentang</p>	<p>Saya secara global saja ya. Yang saya ketahui tentang TNI itu kerjanya minim, kurang baik, tidak totalitas. Fungsinya kan menjaga wilayah kedaulatan NKRI. Cuma belakangan ini dinilai tidak produktif. Setelah membaca ini, kaget juga saya pak. Ini menjadi pencerahan bagi saya, ternyata ada perspektif yang positif dari TNI. Selama ini saya menilai kalau TNI itu menunjukkan citra negatif segala macam. Mengapa? Kecewanya saya karena mereka mungkin akarnya</p>	<p>Secara umum, hal yang dilakukan Satgaspen dalam Tanggap Darurat Merapi seharusnya diapresiasi. Press release selayaknya untuk memberi kesan baik pada publik. Ini harus disertai data yang cukup sehingga berita-berita tidak berat sebelah. Jadi wartawan dalam memberitakan lembaga TNI sesuai juga dengan keinginan lembaga tersebut. Namun, dari beberapa artikel, masih konvensional sekali. Saya harus bilang gini. Kalaulah ini merupakan sebuah data kita masih terima. Misalnya dibaca</p>

Salah satunya cara penulisan antara judul dan lit. Saya lihat mayoritas straight news, padahal disini ada standar yang harus diperhatikan. Contohnya lit, kata tidak boleh lebih dari 30 kata. Tapi hampir mayoritas seperti itu.

Terus kemudian lit itu jenisnya macam-macam. Persoalan sebesar Merapi akan lebih baik what jadi harus ada penjas lit. Nah, ini belum. Siapa yang ngomong, dimana, kapan, apa yang dilakukan oleh TNI. Akibatnya pembaca itu harus melihat dari bawah. Saya misalnya yang paling menarik berita tentang alat khusus kemarin.

Nah ini buat alat khusus. Ini dari judul: TNI gunakan alkapsus evakuasi korban Merapi. Judul ini sebenarnya diambil dari yang paling bawah. Padahal seharusnya jika ini yang paling penting, ia yang harus diletakkan di atas. Sehingga ketika dikirim ke media, ini tidak dihapus. Terus dari aparat keamanan yang diinginkan bukan

perusahaan. Kalau kita begitu saja terbuka, bisa mudah diacak-acak. Aspek kehati-hatian TNI tetap terasa dalam berita-berita ini.

Kemudian yang saya concern, kita tidak punya pusat informasi. Kominfo tidak pada aspek content, mereka hanya pada bagaimana ranah publik bisa dikelola untuk kemaslahatan bersama. Siapa yang harus memikirkan content? Ada banyak bencana di negeri ini, kalau terjadi kita harus dipusatkan pada siapa? Media sebenarnya bingung. Secara nasional harus ada, misalnya bencana tsunami, siapa yang harus memfasilitasi informasi. TNI punya kesempatan di situ. Tapi orang memang takut adanya kemunculan neo-Departemen Penerangan. Tapi kalau TNI bisa melakukan ini, itu bisa sangat signifikan karena mereka memang punya sumberdayanya. Mereka bisa jadi sumber informasi yang utama. Bisa gak mereka memfasilitasi? Saya harap bisa. Jadi misalnya,

dari konflik waktu wilayah Indonesia sebagiannya diambil oleh Malaysia, soal Ambalat itu. Nah itu, saya rasa akarnya dari situ, saya menilai TNI kerjanya minim. Oh oke, setelah membaca ini, ternyata ada penilaian positifnya di TNI.

Ketika saya baca, point yang paling penting yang nomor 15 "TNI excellent tangani bencana Merapi". Juga CSR yang diangkat itu soal mobil pintar ini, ini kegiatan CSR nya TNI. Ini buat saya sih, berarti anda ingin mengangkat citra positif dari TNI.

Caranya dengan media relationship. Itukan salah satu strategi PR. Kalau dari segi isi beritanya, menurut saya apa yang disini telah jelas. Cara penyampaiannya dalam berita tidak ada dominasi kalau TNI ingin kelihatan, sudah balance. Buat saya ini bagus. Tidak ada masalah. Memang inikan tujuannya. Untuk memperbaiki citra karena selama ini kita melihat kinerja TNI minim. Karena

namun seberapa penting data ini, intinya news value nya. Sehingga dengan kata lain, yang terjadi itu ya hanya pemberitahuan saja, nilai beritanya terlalu kecil. Misalnya dari segi waktu, ini 9 november, beritanya kapan? Media massa butuh aktualitas. Ini salah satu bentuk news value. Kita bicara juga seberapa penting buat publik. Siapa yang ngomong. Proximity. Ini beberapa hal yang harus dipahami PR. Karena media massa bekerja dengan cepat. Ketika informasi yang kita berikan tidak kuat dalam news value, akan sangat tidak mendorong wartawan untuk menaikkan berita itu. Jadi ada beberapa unsur di kegiatan TNI yang membuat tertarik. Mungkin mereka punya kuota besar untuk Merapi, tapi kosong nilainya. Padahal, mereka harus memiliki unsur-unsur ini. Kebutuhan lainnya adalah data-data tambahan, akses untuk melihat langsung, narasumber untuk diwawancarai setiap saat. Gaya bahasanya juga, media massanya menjadi kurang tertarik. Ini masih sangat

berapa korbannya, tapi apa yang telah dilakukan. Apa prestasinya. Jadi masyarakat ada kebanggaan terhadap TNI, pada kondisi inilah. Makanya framing yang dibentuk itu tidak jelas arahnya mau kemana.

Karena framing itu kan ada empat aspek. Pertama, analisis sintaksis. Bagaimana ia disusun, judul, sub judul, lit. Kedua, aspek skrip. Bagaimana ia disusun, 5W1H, banyak whatnya tapi where dan when itu juga penting. Saya tidak tahu itu disini. Ini dimana, kapan, siapa yang ngomong, tidak lengkap. Ketiga, aspek tematik. Temanya ini tidak jelas. Apakah kesigapan TNI, apakah perannya di masyarakat, atau kecanggihan TNI dalam mencari korban. Inikan harus dilihat. Sehingga yang tampak itu actionnya di dapur umum. Yang ditonjolkan seharusnya bukan itu. Yang ingin ditonjolkan adalah kemampuan TNI, hal yang tidak dapat dilakukan masyarakat biasa. Jadi

kita bisa memikirkan siapa yang jadi tempat pertama kita lari ketika ada bencana untuk informasi. Kita kan sulit. Gunung meletus, larinya ke badan apa? Badan geologi kan? Tsunami kemana? Kenapa tidak ada center? Media center kan bentuknya ad hoc, bukan secara nasional. Sekarang karena ini, masing-masing mencari sumber berita yang mereka anggap relevan. Sekarang TNI fokusnya harus tetap apakah pada proses komunikasi kegiatan TNI seperti berita-berita ini, atau pada penguasaan informasi bencana secara nasional.

Kalau analisis berita-berita ini, kita harus melihat dulu analisisnya dengan cara apa. Kalau kita memang ada beberapa seperti semiotik, framing, atau pakai apa? Kalau semiotik, paka metode semiotiknya siapa? Yang paling aman itu analisis isi deskriptif kualitatif. Jadi dari 15 ini, harus bisa lihat kalimatnya. Kita bikin indikatornya, jadi judul, headline, foto, caption, topik,

melalui media, suatu organisasi, atau perusahaan, keluarnya dari media. Namanya membangun citra itu butuh waktu dan proses. Ini adalah salah satu upaya untuk menaikkan citra TNI, saya mengerti.

Kalau disini sih, yang saya bisa lihat, si penulis ini ingin memberitahukan kepada pembaca, audiensnya masyarakat umum. Terus terang saja ini jarang banget pak. Kalau buat saya sih bertujuan untuk menggambarkan bahwa citra TNI untuk peduli pada masyarakat ada dari pers mana saja. Ok. TNI peduli, makanya si penulis ini mengangkat banyak anak sekolah tidak sekolah lagi. Lalu diangkat mobil pintar. Nah ini. Dia ingin angkat satgas TNI juga peduli dengan mobil pintar ini. Kemudian ia mengangkat edukasi, dia juga peduli dengan memberitahukan pada warga Jogja, di point no 7. Kemudian dari puing-puing Merapi, juga bantuan warga. Dengan sukarela

umum sekali. Sehingga pada akhirnya, kita pikir menarik kah ini? Yang menarik misalnya pas baret merah menyisir korban. Kalau seperti ini, dapur lapangan, nanti akhirnya masuk berita tambahan, itupun kalau ada kolom yang kosong.

Alkapsus, itu istilah-istilah yang tidak dimengerti jurnalis. Kita harus hati-hati. Nanti jurnalis jadinya menelpnanya apa itu alkapsus. Jurnalis harus bekerja dua kali untuk memahami berita ini. Kan tidak efisien.

Kalau framing sudah jelas yaitu untuk membantu para pengungsi. Sudah kelihatan semua hanya memang informasi yang kita berikan, apa yang saya ambil dari berita ini. ini bukan sekedar harus dibaca publik kan, tapi juga harus mendorong. Saya harus melakukan review dulu, kira-kira apa yang menarik dari sini. Cepatpun, kita harus pikir dua kali. Tujuannya adalah bagaimana berita ini jadi news value tinggi.

Secara umum, data-datanya sudah lengkap, jelas, tapi ada istilah-istilah yang tidak

inikan menarik sebenarnya frame yang dibentuk. Saya tidak lihat disitu. Keempat, aspek retorik. Penekanannya. Yang ingin ditekankan kemampuan personil, ketangguhannya, atau apa? Itu yang belum saya lihat.

Jadi kualitas informasi kurang memenuhi standar. Straight news itu piramida terbalik. Apa yang ingin ditonjolkan itu harus di atas sementara yang dibawah akan semakin berkurang. Jadi kontes semantiknya harus kuat. Ini kelihatannya masih seremonial. Kalau seremonial nanti di media itu tidak menarik dan mungkin akan diabaikan. Padahal Puspen inginnya inikan bisa utuh disampaikan ke masyarakat.

Jadi harus bisa berpikir dengan cara pandang orang media. Sementara kalau bencana Merapi, mereka bisa membuat berita yang mendalam dengan struktur blok. Datanya harus kuat. Ini frame yang saya tampak.

narasumbernya juga. Jadi dibuat bagan saja.

Melihat pada teks, dalam artikel itu sendiri apa sih bagian dari berita. Isunya tentang nasi bungkus, siapa personil TNI yang disebutkan, jadi hal-hal yang detail tentang informasi bisa keluar. Ini sebetulnya dari ke-15 ini kan bentuk PR TNI. Pers juga melihat rilis yang dikeluarkan muatannya apa, dia gak akan copas begitu saja. Kalau dikasih langsung ke masyarakat inikan yang diberitakan TNI nya bukan bencananya. Kalau dulu bisa top down. TNI dulu sangat bisa menggunakan media. Sebetulnya sekarang TNI menggunakan strategi PR, nah media tidak merespon karena kita lihat analisis isi kualitatif dalam setiap berita. Apa yang dikeluarkan oleh TNI ini sangat-sangat jelas, dari sekian paragraf, berapa kalimat yang muncul, jadi bukan bencana yang jadi topik ini. bagian TNI mana yang dilakukan. Misal dari 15, bisa saja 12 yang jelas-jelas tentang kegiatan TNI. Kualitas kalau isu tentang bencana, gak ada

juga TNI berkorban untuk masyarakat Jogja, mereka langsung tinjau ke pos, hanya TNI saja yang bisa begini. Jadi dari ide penulis ini, ia ingin menggambarkan kepedulian TNI.

Kualitas informasinya bagus, karena dengan detail. Contohnya nomor 9, "Peninjauan Pos Pengamatan Merapi dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi Gunung Merapi di lapangan yang masih berstatus awas, dengan ancaman bahaya langsung berupa awan panas dan tidak langsung berupa lahar". Dan ini diceritakan lagi oleh penulis "Di Pos Pengamatan Merapi Ketep-Magelang, Dansatgas TNI mendapat penjelasan dari petugas jaga tentang kondisi terakhir Gunung Merapi yang saat ini sudah mengalami penurunan meskipun masih menunjukkan aktivitasnya seperti pengeluaran awan panas, tremor, gempa vulkanik, dan guguran lava." Terus "Sedangkan di Pos Pengamatan Merapi Selo

dimengerti wartawan. Itu memang sering terjadi jika berita dari TNI, mereka senang menyingkat-nyingkat. Kita harus mempersiapkan foto, video, yang bisa membantu jurnalis. Minimal gak mereka ambil tulisan kita, hanya data-data. Kalau memang tujuannya untuk diliput, data-datanya harus lebih lengkap. Kata-kata bisalah diminimalisir dengan latihan. Juga harus pandai memilih momen-momen yang bisa diangkat ke media massa. Agar PR ini semakin baik lagi, kita harus punya narasumber-narasumber yang bisa dihubungi untuk memberi kesempatan jurnalis melihat lebih dekat. Kita harus punya portal tersendiri yang bisa upload itu semua. Saya pikir itu.

Dari judulnya saja ketahuan kalau maksudnya positif sekali. Masalahnya kita hanya ingin memberi informasi saja atau ingin agar memberi pesan pada jurnalis dan membuatnya merasa berita ini penting dan melakukan liputan secara positif untuk kita. Jadi ini sangat normatif semua. Gaya penulisannya masih

	<p>Jadi framenya tidak jelas.</p> <p>Ini saya ambil contoh: Dapur lapangan TNI untuk pengungsi Merapi. Ini seharusnya yang buat dapur umum kan banyak. Apa yang dibuat TNI kelebihannya dibanding dapur umum yang dikelola institusi lain. Jadi framenya itu gak jelas. Misalnya TNI punya itu, dapur TNI mampu memasak untuk sekian ribu pengungsi. Inikan judulnya akan lebih menarik lagi: Dapur Umum TNI bisa memasak untuk sekian ribu pengungsi. Padahal itu faktanya di lapangan kan. Ini hanya “yang mendirikan posko dekat ...” inikan tidak ada bedanya dengan institusi lain. Padahal TNI membangun lima dapur umum, inikan hebat. Yang harus dibangun adalah kebanggaan masyarakat atas TNI. Ditengah masyarakat apakah yang dilakukan TNI, maka perlu dibangun aktivitas yang diluar bayangan orang. Termasuk misalnya kasus tsukoy kemarin, itu luar biasa. Ini dapur lapangan itu</p>	<p>kualitasnya. Kalau dari PR, kita akan tanya orang lain. Jadi gak harus pangdam ini, brigjen ini, narasumbernya harus meminjam mulut orang lan. Ini kelihatan gak seimbang sekali. Justru kalau orang lain yang ngomong, keluar kualitasnya. Jadi sebisa mungkin diperhalus, meminjam narasumber, dan kerjasama dengan media. Apakah bentuknya menyewa kolom atau apa. Harus ada relationship dengan media. Dalam keadaan tidak ada bencana sekalipun, harus ada hubungan baik dengan media.</p>	<p>Boyolali, Dansatgas TNI dapat menyaksikan langsung aktivitas Merapi yang masih mengepulkan awan panas meskipun dalam skala kecil.” Inilah point yang ingin ditekankan padahal daerah tersebut sangat berbahaya tapi TNI mampu melakukannya dengan menyaksikan langsung. Bahasanya sih sudah bagus. Ia ingin menyatakan, ini loh yang sebenarnya kami lakukan. Dengan bahasa ini, ingin menekankan kalau kami peduli.</p>	<p>konvensional. Tapi untuk mengubah pola semacam ini memang susah. Dari berita ke-6 “Perhubungan tidak memenangkan pertempuran tetapi tanpa perhubungan pertempuran tidak dapat dimenangkan”, demikianlah motto Corps Perhubungan....” ini kan lit kutipan tapi di lit ini tidak menarik. Apa pointnya? Apalagi dibaca dengan masyarakat umum. Meskipun ini hal yang positif. Ini harus diperbaiki. Pada umumnya memang clear, positif. Cara memberi informasi saja yang masih sangat konvensional. Harus dirubah dengan informasi yang lebih lengkap, memberikan narasumber yang siap di wawancarai. Itu sangat memungkinkan tapi memberi peran bagi si humas. Fotopun, gambarpun, memang butuh kecepatan. Faktanya biar kelihatan.</p> <p>Kalau sebatas memberi informasi ke jurnalis, selesai. Kecuali, dalam konteks Merapi yang paling disenangi yang dramatis. Misal penyisiran kopasus, tarik beberapa wartawan. Ketahuan, enak banget. Yang begitu itu kita</p>
--	--	--	---	--

gak jelas, banyak personil, inikan jumlah orangnya. Ada sekian dapur umum, nah ini di ke ataskan, kemudian di analisis.

Selanjutnya: Satgas Brigade Khusus TNI PB Merapi. Satgas ini tugasnya apa? Brigade khusus ini diterjunkan untuk apa? Nah brigade khusus ini dilengkapi apa. Kelebihannya apa. Ini yang saya catat.

Code tanggap Merapi. Erupsi kan sudah umum. Alinea ini litnya what. Ini sudah tahu. Ini apa yang ditonjolkan, satgas ini melakukan sesuatu, kenapa ia diterjunkan? Ini menyatakan juga siapa, misalnya Pak Adi. Langsung saja, "Pak Adi mengatakan ini, ini, ini". Kalau seperti ini kurang lengkap.

Satgas TNI Gunakan Mobil Pintar SIKIB bantu Korban Merapi. Ini, "...telah menimbulkan rasa trauma dan kesedihan ..." inikan semua orang sudah tahu. Yang ditonjolkan apa, itu yang diangkat ke

lakukan. Misalnya dapur, undang wartawan untuk makan. Tunjukkan tokoh-tokoh koki masak itu. Jadi harus pandai mengolah fakta misalnya secara partisipatif. Kalau tidak bisa, misalnya rawan atau rahasia, kita harus sajikan lengkap informasi itu, audio-video, dramatis, kita harus berpikir sebagai jurnalis, membantu bagaimana mereka memperoleh informasi.

Sekarang jurnalis harus menguasai banyak hal. "Satgas Brigade Khusus TNI PB Merapi". Aku tahu setiap orang besar itu pasti disebut-sebut, tapi kalau ini ke publik, tidak dibaca. Ini tidak menggambarkan. Tidak banyak jabatan-jabatan yang keluar. Masih konvensional. Inikan seperti laporan berita acara. Menariknya gini, yang paling tinggi jabatannya, ia ngomong apa? Ya seperti itu. Atau "Mobil Pintar" ini menarik, SIKIP itu apa sih? Nah, begini, ambil satu saja yang mengambil memakai jasa mobil ini. Dia ngomong "waa, senang banget..." Terus masukkan satu narasumber dari jabatan tinggi kemudian

permukaan.

Ini yang saya tidak habis pikir, ini sumbernya yang ngomong siapa, gak ada namanya. Caranya lebih baik lagi langsung ditulis disini. Ya seperti buat berita itu lo mas. Jadi rancu kalau seperti ini. Ini mayoritas, maksimal 35 kata, unsur mana yang harus ditonjolkan. Tidak seperti itu.

Ini setidaknya gayanya, gaya teacher, modelnya blok, artinya lit bisa diambil dari bawah. Sementara straight news, maka lit ni harus beda dengan judul. Ada kaidahnya. Karena kalau teacher, ia diharapkan membaca dari awal sampai akhir.

TNI perketat daerah rawan merapi. “merubah” ini salah mas, yang benar “mengubah”. Ini juga, sudah diulang-ulang. Karena status Merapi masih awas, untuk membantu mengamankan, maka TNI menempatkan personilnya di daerah ini. Itu kan nyambung mas. “Menyikapi perubahan ini,

informasi lebih lengkap, ada foto, ada video. Tapi memang berat. Cuma memang harus dibekali kemampuan fotografer, editing yang bagus. Menarik sekali. Yang memberikan akses masuk ke dalam ini kan TNI sendiri.

....” Ini kalimatnya masih terlalu panjang. Jadi orang membaca itu bingung. Tapi informasinya sebenarnya bagus.

Artinya ini, gaya ini belum ikut standar. Lihat Antara. Itu standarnya bagus. Jadi saya meliput disini, orang disana harus memahami bagaimana gaya menulis seperti gayanya media. Setiap media itu beda-beda. Beritanya bentuknya beda untuk media berbeda. Untuk online beda, koran beda, majalah beda, dan sebagainya. Jadi harus ada divisi-divisi yang membuat rilis berita TNI itu berdasarkan sasaran yang dituju. Ada yang sudah bagus, yang kurang where dan when.

Dharma Pertiwi bantu korban Merapi. Ini sudah bagus. Ini langsung. Inilah, kalau apapun yang ditulis itu harus dicermati, media pun punya banyak masalah disini.

TNI perkuat tanggul bantaran kali Code. Kenapa

memperkuat? “Kali Code yang mengalir di ....” Ini semua orang sudah tahu. Tapi kenapa ia terlibat disana. Kegiatan ini dilakukan kapan? Apa yang ia lakukan? Misalnya karena kondisinya sudah buruk dan sebagainya. Framenya itu kalau kali Code yang mengalir itu gak jelas. Saya rasa yang ditonjolkan TNI semestinya ingin menunjukkan kalau TNI punya kemampuan mengurangi beban masyarakat. seharusnya semua mengarah ke sana. Rata-rata kalimatnya terlalu panjang.

TNI excellent tangani bencana Merapi. “...TNI tanpa pamrih, mulai dari...” itu tidak dengan kata-kata. Ini harusnya di delete. Tapi dengan tindakan langsung, jadi tidak kelihatan narsis begitu kan. Kelemahan dari orang-orang PR TNI, memang tidak harus dengan kata-kata. Karena kalau media maunya fakta, gak mau orang “tanpa pamrih”. Faktanya apa, seperti itu. Itu berasal dari mana saja,

<p>Apa saran tentang cara yang seharusnya digunakan Satgaspen TNI agar kualitas informasi tetap terjaga hingga ke masyarakat?</p>	<p>tugas jaganya 24 jam misalnya, jadi tanpa statemen “tanpa pamrih” pun orang sudah tau kalau TNI tanpa pamrih.</p>			
	<p>Itu yang harus ditonjolkan adalah frame kalau TNI itu dekat dengan masyarakat. Karena asumsinya TNI itu dengan kekerasan dan kekejaman. Sebenarnya kalau saya lihat di media, itu sebenarnya sudah bagus. Nah seharusnya Puspen mengikuti itu. Yang membedakan kami dengan organisasi lainnya itu. Tidak usah mengulang-ulang bencana itu seperti apa. Apa yang harus kami lakukan yang orang lain tidak bisa, semestinya itu yang ditonjolkan. Retoris itu penting untuk membangun image kalau TNI tidak hanya di masa perang. Itu lewat tulisan-tulisan media, misalnya membuka helipad dalam waktu singkat, itukan tidak dimiliki organisasi lain. Tidur sambil bergelantungan waktu misi penyelamatan Tsukoy, dsb. Itu kalau framingnya, harus bisa membuat ini.</p>	<p>Jadi jangan terlalu menonjolkan apa yang sudah dilakukan. Secara umum, berita-berita ini kurang kualitasnya, terlalu dominan TNI. Bahwa informasi itu ada nilai, bahwa TNI tanggap yang disampaikan ke masyarakat. Itu bukan dari TNI sendiri, tapi dari narasumber masyarakat itu sendiri. Selanjutnya juga harus ada nilai edukatif. Bagaimana cara menyelamatkan diri dari gempa, jadi informasi-informasi ini harusnya ada. Jadi aspek edukasinya itu. Yang pertama kali harus dilakukan satgaspen adalah memperkenalkan diri pada publik. Jangan sampai ada persepsi kalau mereka ada hanya pada saat bencana. Pada saat tidak ada bencana, satgaspen dapat memberikan informasi edukatif kepada kita. Selain sosialisasi secara edukatif tadi, satgaspen juga harus membuka relationship</p>	<p>Saran saya adalah menjaga relasi kepada media itu sangat penting. Pendekatannya secara personal. Kadang kita yang butuh agar media mau menginput berita-berita dari kita sehingga membangun citra. Pertama, harus pendekatan secara personal. Mungkin TNI bisa memberi dana untuk mengadakan event kecil-kecilan buat media. Jadi sediakan sedikit dana untuk itu. Kalau Kompas dan media-media lain kita pegang, kita bagus, ini untuk membangun silaturahmi. Untuk menjalin networking. Terkadang point ini yang banyak disepelekan organisasi. Organisasi maunya semua informasi ditayangkan media padahal hubungan mereka dengan media tidak bagus. Pendekatan secara personal. Ini berita bagus tapi kalau hubungan personal buruk, media gak</p>	<p>Kita gak apa-apa. Sekali kita lepas, kita bilang besok ya, harusnya ada orang yang bisa ngomong cepat, kalau tidak hilang beberapa jam, kalau gak ada data akurat dan narasumber, kalau tidak susah. Seperti yang kemarin, mau minta maafpun susah karena orang sudah maki-maki. Tapi jangan takut. Narasumber siapkan. Data lengkapi. Kita harus berpikir sebagai jurnalis, selalu memikirkan news value. Seperti itu. Dapur lapangan itu menarik. Ini sisi lain dari TNI. Bagus tinggal bagaimana mengemasnya. Jadi jangan sampai tidak dibaca sama sekali oleh wartawan. Beritanya jadi gak naik. Kemarin yang dimanfaatkan kopassus nolongin orang. Oke kita media tahu itu pencitraan tapi publik juga mengkonsumsinya. Kalau normatif, tidak punya news value yang kuat. PR TNI tugasnya berat sekali. PR inilah yang punya</p>

		<p>dengan berbagai pihak, terutama pada media. Jadi TNI ini bisa memunculkan citra sebagai sumber informasi yang cepat, tepat, dan berkualitas, apalagi saat ia bekerjasama dengan BNPB. Jika TNI punya akses terhadap tempat yang luas, ia bisa datang dengan informasi yang tidak dimiliki oleh media.</p>	<p>ambil banyak, hanya headlinenya saja misalnya.</p> <p>Kalau dari segi bahasa bagus ya, tidak terlalu dominan. Ada beberapa buku PR di sini, ini yang dibahas. Hubungan media relationship sangat penting. Kalau dikerasi, media itu tidak mau. Memang hubungan bisa jadi hanya jangka pendek, tapi bisa jangka panjang jika dikoordinasikan ke bawahannya juga. Harus ada training khusus, nanti dibertahukan cara-cara membangun hubungan dengan media. Kalau dikerasin, makin gak jadi. Kecuali media-media yang ecek-ecek, mereka mau dibayar, ya terserah. Kalau koran-koran nasional itu tidak mau dibayar.</p>	<p>kemampuan. Saya beberapa kali liputan ke TNI, susahya setengah mati. Ngomong dengan PR, Prnya normatif. Hawk yang kemarin itu sayang sekali. Gak mesti mukulin orang. Okelah sudah ada mutasi. Pamen-pamen itu harus diajari cara berhadapan dengan jurnalis. Garis batasnya ada? Gak ada. Kita sudah bangun, jadi dari sekian banyak angkatan, polisi yang paling mudah, tapi ia sekarang bukan militer lagi. Yang paling berat AU. Kalau saya masuk ke marinir masih bisa, kecuali kasusnya berat, crisis management harus jalan. Kalau bencana, ada TNI, ya apa yang dilakukan TNI sangat penting untuk meredakan isu-isu yang pernah menyerang TNI.</p>
--	--	--	---	--

### MATRIKS HASIL WAWANCARA PUSPEN TNI

Pertanyaan	MS dari Dispenum Puspen TNI	ES dari Dispenum Puspen TNI
<b>Latar belakang Satgaspen TNI</b>	Jadi Puspen TNI pada saat bencana Merapi mengeluarkan Satgaspen. Itu secara struktur di bawah langsung Kapuspen TNI. Disitu Kadispenum hanya bertindak sebagai supervisor.	Saya pada saat itu Kasubdis atau orang yang menerima informasi dari satgaspen. Jadi saya penyaring informasi. Jadi informasi yang dikirim saya terima kemudian saya olah dan sebarkan ke media sesuai tujuan Satgaspen TNI sendiri
<b>Bagaimana kualitas informasi dari press release yang dibuat oleh Satgaspen TNI?</b>	<p>Saya waktu itu selalu mengikuti perkembangan. Saya rasa kualitasnya bagus karena bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang terjadi di sana dan bentuk respon TNI pada masyarakat. Jadi selama satu bulan penuh, mereka diberikan pada Satgas TNI PB. Pada waktu itu dipimpin Brigjen Syahiding. Pak Hari dan timnya menempel pada beliau. Mengenai pemberitaannya secara rutin, mengirimkan siaran pers ke Dispenum, lalu dibaca lalu dilihat layak tidaknya. Tapi secara umum, berita selalu dinilai positif oleh Puspen TNI dan dikirim ke berbagai media lalu direcord.</p> <p>Tentang siapa saja media cetak yang diberikan itu bisa dilihat di laporan-laporan, saya tidak hapal, namun biasanya sesuai agenda mereka sendiri. Kemudian tentunya pemberitaan ini berdampak positif pada TNI sendiri. Kemudian kecepatan, cepat. Dan pada momen-momen tertentu juga menjembatani kebutuhan pers lainnya untuk pemberitaan yang ada di sana. Bahkan pernah siaran langsung di dapur umum. Bagaimana dapur umum TNI itu untuk masyarakat yang berjuang menghadapi bencana tersebut.</p>	<p>Berbicara masalah kualitas, itu sama saja. Informasi itu sudah memenuhi unsur-unsur berita, 5W1H, sehingga satgas mengirim informasi itu sudah memenuhi unsur itu. Cuma kita juga lihat situasi. Mungkin untuk litnya kita sempurnakan lagi.</p> <p>Jadi dari segi kecepatan memang kan syarat mutlak, kita selalu menekankan personil puspen untuk mementingkan faktor kecepatan. Jadi mereka kirim berita secepat mungkin. Kalau pencitraan TNI semua sudah mencakup unsur itu. Mungkin walaupun ada yang menyoroti hal-hal negatif, orang bisa lihat kalau TNI itu tidak banyak bicara tapi banyak bekerja.</p>
<b>Bagaimana proses</b>	Kebanyakan tidak substansial, hanya redaksinya, kan	Jadi kita menerima, kadang-kadang unsur 5W1H itu

<b>pengeditan informasi?</b>	ada kalanya mereka, itu kan di lapangan, dengan kecepatan dan serba minim peralatan. Disitulah peran kita. Tapi bukan masalah substansi. Salah ketik, misalnya salah kalimat, seperti itu yang kita supervisi.	sudah cukup. Kalau waktu cukup kita minta kelengkapannya. Kita juga kolaborasi. Jadi sudah dimasukkan pesan-pesan dari pimpinan sehingga masyarakat tahu. Tentunya ada penyempurnaan-penyempurnaan dari kita di Puspen, agar benar-benar utuh, lengkap, dan tidak salah penafsiran.
<b>Bagaimana pengiriman ke media massa?</b>	Secara cepat kita kirim by fax dan email ke berbagai media yang kita anggap teman-teman media. Kita monitor itu hasilnya.	Jadi kita juga mengirim ke redaksi dan ke teman wartawan yang di bidang hankam. Yang ke redaksi menggunakan fax sementara yang ke wartawan lewat e-mail. Lalu kita cek apa yang bisa sudah menerima, minimal siaran pers kita sudah diterima. Kemudian kita juga menyampaikan dengan kedekatan kita dengan teman media, agar diberi satu ruang agar bisa dimuat. Kalau berita online itu selalu dimuat. Media cetak masih harus melewati rapat redaksi, kan mereka ada deadline dan sebagainya.
<b>Bagaimana hubungan Puspen TNI dengan media?</b>	Di Dispenum ini hubungan sangat baik dengan media dan itu sudah berjalan baik. Media yang biasa meliput TNI selalu kita beri. Hubungan sangat baik. Media itu kita anggap mitra. Kita jembatani media yang mau wawancara dengan kita. Kalau even-even tertentu kita selalu libatkan media, begitu juga dengan jumpa pers dengan panglima TNI	Sejauh ini cukup manis. Kita memahami, kita sudah berpedoman kalau media itu kita anggap saudara karena mereka itu yang menyampaikan informasi tentang kita ke masyarakat, tentang kinerja TNI, hal-hal yang sudah dibuat TNI. Kalau ada yang kurang pas, itu diselesaikan secara kekeluargaan.
<b>Bagaimana jika ada yang menyimpang?</b>	Kita monitor dan alhamdulillah tidak ada yang melenceng. Cuma ada beberapa media yang mengambil utuh, ada juga yang hanya penggalan-penggalan. Kita hanya bisa mengontrol, sepanjang tidak merugikan TNI, silakan saja	Kalau memang ada yang menyimpang, kita ingatkan secara pertemanan dulu. Biasanya berita yang menyimpang ini, hasil hunting-hunting itu, mereka olah sendiri tanpa cover both sidinya. Apabila terlalu jauh kita menggunakan hak jawab, sehingga tidak ada penafsiran yang salah.
<b>Saran atas peran Satgaspen TNI untuk kasus bencana nasional yang akan datang, khususnya</b>	Sarannya pada saat satgaspen turun ke lapangan itu mencari berita dan kemudian berita tersebut akan dipublikasikan oleh media. Baik siaran pers atau dijembatani dengan dansatgas. Juga mungkin dengan	Sebetulnya Satgaspen masih diperlukan. Secara parsial masih dibutuhkan. Memang hal-hal yang berkaitan dengan bencana itu sekarang sudah ada BNPB. Tapi BNPB juga harus belajar dari pengalaman-

**terkait dengan hubungan militer-media**

personil-personil atau pejabat-pejabat TNI, kita menjembatani untuk wawancara tersebut.

pengalaman TNI. Di Aceh, di Yogya, di Mentawai, sudah banyak membantu untuk BNPB. TNI juga harus akuntabilitas publik, melalui kegiatan-kegiatan seperti berbuat, membantu masyarakat. Apalagi dalam penanggulangan bencana, itu sudah sesuai dengan tugas TNI, OMSP itu salah satunya membantu masyarakat dalam menanggulangi bencana

### MATRIKS HASIL WAWANCARA SATGASPEN TNI

Pertanyaan	HM sebagai Jubir TNI PB	AYN sebagai Perwira Pers
<p><b>Pengalaman tugas di merapi dan peran dalam mengumpulkan informasi di lapangan</b></p>	<p>Jadi untuk satgaspen, saya mendapat tugas satgas PB Merapi yang dipimpin oleh Brigjen Saidi. Saya mendapat tugas untuk bergabung disana dalam rangka memberitakan kegiatan satgas TNI ini selama 1 bulan. Anggota saya terdiri dari pers, kameraman, fotografer, dan satu supir, jadi otomatis cuma lima orang. Tetapi dalam organisasi Satgas PB, saya tidak disebut sebagai Dansatgas, tapi saya disebut juru bicara satgas. Terkait dengan pertanyaan tadi, saya mendapatkannya langsung dengan terjun ke lapangan. Saya selalu mendampingi dansatgas kemanapun di lapangan. Jadi saya selalu melekat di sana dan setelah peninjauan selalu di informasikan ke publik. Evaluasi selalu dilakukan setiap sore dan selalu saya ikuti untuk mengetahui perkembangan.</p>	<p>Saya kesana karena Merapi itu kan banyak bantuan dari luar negeri. Kemudian saya berangkat dengan letkol Hari. Setiba di sana, saya lapor ke Dansatgas PB Merapi, kemudian setelah itu saya lapor ke BNPB karena saya diminta untuk jadi interpreter. Dari Dansatgas saya diperbantukan saja di satgas PB nya. Perintahnya dari satgas saya tetap di Satgas.</p> <p>Kita kerjasama dengan kominfonya. Jadi untuk informasi-informasinya kita dapat cepat. Kebetulan Wakapuspen dulukan Setyo Sularso, kami sama beliau diperintahkan tinggal di situ. Ada mobil. Kami dari puspen juga bawa kendaraan.</p> <p>Kita kan ada HT, jadi bisa memonitor keadaan di HT. jadi kita dekat dari Media Center, jadi setiap hari dapat update dari Kominfo. Kami juga ke lapangan, lihat kondisi. Kita melekat di Dansatgas. Kalau Dansatgas ke atas, kita ke atas. Dansatgas PB gantian dengan Dansatgaspen. Kalau ikut Satgas PB, saya standby di pos. Ada kantor di atas itu untuk TNI-Polri dari Kominfo.</p>
<p><b>Bagaimana kualitas informasi dari press release yang dibuat oleh Satgaspen TNI berikut ini? (Menanyakan kecepatan, kekuatan, kepastian, mengandung harapan, dan citra TNI)</b></p>	<p>Kecepatannya, saya selaku orang penerangan berusaha secepat mungkin. Saya buat siaran pers, saya arahkan kalau ada media ke Dansatgas. Saya mengundang media-media nasional dan lokal untuk meliput sendiri. Contohnya pada hari kedua, ada TVOne, langsung menayangkan secara live, yaitu tentang dapur lapangan TNI. Berbagai cara saya lakukan agar masyarakat tahu yang dilakukan TNI.</p>	<p>Berita-berita ini yang bikin Dansatgas terus ada juga dari Zipur, diperhalus juga. Saya hanya ikut di lapangan.</p> <p><b>1) Dapur lapangan TNI untuk pengungsi Merapi.</b></p> <p>Kalau dapur lapangan itu kebetulan lokasinya berada di dekat tempat kita tinggal. Itu setiap hari. Kita datang ke lokasi pagi-pagi. Kita lihat</p>

Prosesnya saya kumpulkan dari masyarakat langsung maupun ikut evaluasi setiap sore dari para relawan dan instansi terkait. Disamping itu dari posko-posko pengungsian. Misalnya yang terbesar di Mabuharjo, berapa jumlah pengungsinya, berapa bantuan yang datang. Disamping itu, data yang setiap hari dilaporkan di posko.

Keakuratan informasi di lapangan memang dalam PB di Merapi ini karena dilakukan berbagai instansi, banyak perbedaan dalam data. Contohnya gini, kodim mendata pengungsi, pemda mendata pengungsi, dan polisi juga mendata pengungsi. Misalnya di Mangunharjo, sampai terjadi selisih sangat besar sampai 10 ribu pengungsi. Kemudian yang kedua adalah penyaluran bantuan. Simpang siurnya data karena, satu ada donor yang langsung menyerahkan ke pengungsi dan ada juga yang menyalurkan bantuan ke posko. Yang benar adalah harus ke posko, tetapi kadang kita tidak bisa menolak jika ada yang ingin langsung ke pengungsi. Termasuk ada yang misalnya begini, salah satu SMA di Yogya, disitu digunakan untuk penampungan. Tapi yang membantu itu alumnusnya yang merasa mampu, mereka langsung menyumbang ke situ. Jadi data tidak hanya ada satu, tetapi kita tetap berpedoman pada yang tercatat. Yang tidak resmi sendiri saya yakin banyak.

Posko itu yang sumber datanya resmi. Karena saya mencatat posko itu yang didirikan secara resmi oleh pemerintah. Jadi data yang akurat yang saya gunakan adalah data resmi, jadi pertanggung jawabannya enak.

dapur lapangan itu seperti apa, proses distribusinya, proses masaknya, karena kita bawa satu tim, kemanapun kita pergi selalu bareng-bareng. Ada kameramen dan ada fotografer. Dari saya sendiri hanya rekorder, kertas, sama pulpen. Karena kita terjun langsung kita amati langsung. Seperti jumlah korbannya berapa, kita bisa lihat langsung dari situ. Dari poskonya masing-masing. Dapur lapangan itu gak hanya satu, ada banyak, itu dibagi untuk posko mana. Jadi posko yang tempat kita tinggal, itu melayani posko yang di UPN. Jadi ia hanya melayani UPN saja. Ada beberapa yang memberi harapan, tapi kita lebih pada mencitrakan TNI secara positif.

## **2) Satgas Brigade Khusus TNI PB Merapi.**

Karena kita bergabung di satgas PB. Begitu ia dibentuk, berapa personil, pembagian satgas bagaimana. Karena kita kan berkumpul satu tempat dengan PB. Melalui radio komunikasi. Kami di handphone dengan satgas PB. Jadi kita minta datanya langsung dari staf satgasnya. Setiap sore sama pagi itu ada laporan. Apel laporan. Jadi setiap satuan yang di lapangan apel bergantian ke posko radio. Kita ikut memonitor. Kita bisa menanyakan seperti apa.

## **3) TNI gunakan Alkapsus evakuasi korban Merapi.**

**Kita kan kemarin diberi tahu menggunakan apa. Jadi dari yang satuan-satuan itu ada kekuatannya berapa. Sekiranya dianggap menarik baru kita beritakan. Kalau keakuratannya, ya akurat, karena kita dapatnya dari pihak satuan. Yakin datanya akurat. Lebih ke pencitraan TNI. Kalau pada saat itu mungkin karena pengen tahu berita terbaru, mungkin dibaca masyarakat. Mereka membacanya lewat**

**koran.**

**4) Code tanggap merapi.**

Kita dapat informasi lebih dulu dari BNPB ke Kominfo. Begitu kita tahu akan ada kegiatan ini kita langsung merapat ke lokasi. Akuratnya dari BNPB. Sifatnya kualitatif. Kita langsung ke lokasi jadi mengalami.

**5) Satgas TNI Gunakan Mobil Pintar SIKIB Bantu Korban Merapi.**

Inikan datanya dari Kostrad TNI Malang. Pertanyaan di Mabes kita ini kemudian merapat ke posko, dimana dan kapan, dari kita melaksanakan ini, kita mengikuti. Hari Selasa jam segini, kita ngikut. Kita di posko terbesar. Lumayan lama ikut mobil, tapi tidak sampai satu hari. Kita ikut pada saat masyarakat baca ada berita onlinenya ada pertunjukan dari personilnya itu sendiri. Bahkan ada yang menanyakan kan harusnya muter, tapi mereka gak muter ke semua posko karena sesuatu dan lain hal. Mereka membantu menghibur korban. Memang di tempat pengungsian sudah ada hiburan tapi tidak layak sekali. Itu program yang mengelola Kostrad Malang.

**6) Gelar perhubungan Satgas TNI PB Merapi.**

Ini kebetulan karena satuan ada di posko yang lain di posko jadi kita bisa hubungi informasi. Sudah punya alat perhubungan. Semingguan sudah jalan. TNI dan BNPB untuk kelancaran TNI dan BNPB. Kalau Kominfo saya belum tahu. Kalau BNPB yang masuk ada beberapa chanel. Bermanfaat banget. Jadi kita bisa tahu situasi-situasi di lapangan. Kalau ada radio komunikasi dan perhubungan ini kita bisa tahu.

**7) TNI perketat daerah rawan merapi.**

Ini kita meninjau langsung ke atas dengan kopasus

TNI. Kan dapat datanya dari BNPB, udah seberapa parah terus kita kerjasama dengan kopasus ke atas. Waktu itu sih sudah langsung bergerak. Karena panas di atas, tergantung kondisi di lapangan. Kita gak bisa bawa badan doang ke atas. Kita dipandu dengan kopasus karena mereka sudah ada yang ke atas duluan. Yang sampai di atas pak Hari dan rekan-rekan, saya tidak. Ada pro dan kontra juga karena ada lokasi yang tidak dapat dimasuki badan doang. Karena ada yang tidak diperbolehkan jadi kita gak tau. Tapi tetap ada juga masyarakat yang nekad naik. Karena walaupun sudah diingatkan tetap saja ingin mengambil harta benda.

**8) TNI bantu warga bersihkan desa lereng merapi.**

Ini dari Magelang. Prosesnya kita sama Zipur. Pakai Bepo. Karena punya alat, Zipur memakai beponya selesai baru kita kembali ke posko baru kita buat laporan. Karena kita langsung ninjau jadi akurat. Kalau yang tadi membersihkan, masyarakat bisa tahu kalau sudah dibersihkan, jadi gak banyak debu.

**9) Dansatgas TNI tinjau langsung pos pengamatan merapi.**

**Kita sampai Satgas TNInya langsung mendatangi ke Boyolali langsung ke atas. Kita pakai kendaraan Satgas TNI PB. Kan ada beberapa lokasi yang ada plang. Ada yang merusak plang, masyarakat ada yang dapat masuk juga. Dari laporan satuan, kan ada yang sudah dipasang tanda bahaya, mereka melakukan patroli. Ada yang melihat masyarakat mencoba masuk atau mencopot plang.**

**10) Dharma pertiwi bantu korban merapi.**

Ini yang dari Surabaya. Itu kita dapat informasi kalau ada yang mau beri bantuan, kan dari Surabaya

butuh waktu. Jadi pas pagi-paginya itu kita bisa mengikuti ibu-ibu Darma Pertiwi. Ngasi bantuan, menanyakan kondisi masyarakat seperti apa, menanyakan yang dibutuhkan di tempat pengungsian itu apa. Pakaian, makanan, selimut. Mengandung harapan, karena dengan datangnya ibu-ibu inikan, mereka berharap dapat bantuan yang sangat dibutuhkan.

**11) Dansatgas TNI pimpin penysisiran di lereng Merapi.**

Ini waktu ternak-ternak penduduk yang gosong, yang kena debu dan asap, kalau gak dibakar bisa menyebarkan virus dan kuman-kuman. Jadi dansatgas saat itu meliput. Masih ada bangkai-bangkai ternak warga. Dansatgas dan Polri ke lokasi-lokasi itu dan diambil untuk dibakar. Itu sebenarnya kita sudah tahu sejak lama kalau ada banyak bangkai, tapi karena kegiatan yang harus dijalani banyak jadi tidak terlalu cepat. Dari satuannya tadi laporannya. Terkadang si ada rapat antar pemimpin satuan.

**12) Peranan Zipur dalam penanggulangan bencana merapi .**

Ini ditulis orang Zipur sendiri tapi diperhalus oleh dansatgas. Itu sudah pasti akurat. Ditinjaunya yang sama berita yang pakai depo tadi. Ini lebih memperdalam peranan satuan zeninya. Ini lebih pada pencitraan saja.

**13) TNI bersihkan Candi Borobudur.**

Ini kita tinjau langsung dengan beberapa satuan. Jadi kita benar-benar ke Candi Borobudurnya. Kami memperoleh info kalau dari beberapa satuan ingin membersihkan debu. Kita tiba, baru mau mulai. Karena itu candi, gak sembarangan pakai alat, jadi pakai kuas. Debunya dikumpulkan dimasukkan ke karung.

		<p><b>Informasinya pasti kita selain melihat-lihat juga nanya-nanya. Ini lebih ke situsnya sendiri.</b></p> <p><b>14) TNI perkuat tanggul bantaran Kali Code.</b> Ini yang berkaitan dengan banjir lahar di Code sebelumnya. Jadi daripada nanti banjir, pasir itu dikeruk dengan personil TNI terus dimasukkan karung lalu disimpan di pinggir kali. Informasi ini dari BNPB karena banjirnya sudah satu atau dua hari sebelumnya. TNI bergerak kesana, satgaspen ikut. Kalau misalnya bibir sungainya gak dikeruk, kan bisa masuk ke rumah warga karena waktu itu kan lagi hujan, takutnya semakin parah.</p> <p><b>15) TNI excellent tangani bencana Merapi.</b></p> <p>Hari terakhir kita mau selesai penugasan, jadi kegiatan yang sudah dilakukan Satgas TNI kita himpun di siaran pers ini. yang menyatakan excellent itu kepala BNPB. Ia kan berkunjung ke posko satgas. Ini lebih ke pencitraan</p>
<p><b>Bagaimana proses pengumpulan informasi?</b></p>	<p>Informasi itu saya berusaha mendapatkan secara kualitatif, cek orang per orang. Seperti di Mangunharjo, jadi disini Dansatgas minta diulang sekali lagi karena selisih perhitungan tadi. Kondisi bencanakan orang tidak tertib. Seakurat mungkin kami dapatkan data dengan cek dan ricek. Perbedaan jumlah pengungsi itu saja merepotkan berbagai bidang. Pencatatan itu bukan hanya jumlah pengungsi, tapi juga jumlah ternak. Warga kadang tidak patuh dengan aparat. Jadi pendataannya susah. Ternyata ada yang diatas dengan ternaknya. Tapi sekali lagi, satgaspen selalu bertopang dengan yang ada di lapangan, yang kelihatan mata.</p> <p>Kita memberi informasi sedapat mungkin yang menenangkan. Kalau kita tidak memberi informasi yang tegas dan jelas, mereka bisa tambah bingung.</p>	<p>Biasanya kita dapat informasi kalau kali Code banjir misalnya, kita tahu dari BNPB, kita langsung ke lokasi, kita lihat keadaannya seperti apa, bagaimana personil TNI menanganinya. Begitu selesai mengamati, baru dibuat beritanya lalu kita kirim. Karena malam hari, baru bisa dikirim pagi.</p>

	<p>Jadi kita membantu khususnya pada media. Sebagai contoh, Merapi itu pertama meletus, radius 20 km harus diungsikan. Dari 20 km bertahap menjadi 15 km, tapi dalam hal ini masyarakat masih banyak yang tidak patuh padahal ini bahaya, masyarakat tentunya akan jadi korban. Tapi kenyataannya mereka memakai jalan-jalan tikus. Kita himbau, kita beri keyakinan agar tidak memasuki wilayah bahaya tersebut. Masyarakat kadang tidak mematuhi larangan sehingga masih banyak yang melanggar. Aparat inikan patrolinya di jalan-jalan besar. Kita tidak dapat mengawasi satu per satu pengungsi juga. Jadi inilah yang terjadi di lapangan.</p> <p>Jadi siaran pers sebenarnya dibawah BNPB. Kita itu kan di bawah BNPB. Saya menginformasikan siaran pers itu berkaitan dengan TNI berdasarkan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi sampai selesai.</p>	
<p><b>Hubungan TNI dan Media Massa?</b></p>	<p>Kita ketahui di zaman sekarang ini jaman keterbukaan. Memang media kita masih menganut prinsip Bad News is a Good News. Saya selalu mengajak media membuat informasi yang benar. Contoh, banyak sekali media yang sering meliput tempat pengungsian yang kumuh, yang kotor, ya memang semua tempat pengungsian itu kotor, namanya juga tempat pengungsian. Jadi jangan terlalu mendramatisir keadaan yang sudah dramatis, jadinya lebih susah. Jadi yang jelek kita tutuplah, yang bagus kita beritakan, agar yang melihat kita senang.</p> <p>Di Mangunharjo itu ada kasus dapur lapangan terbakar. Media banyak yang mengambil gambar. Aparat-aparat berebut menyuruh media itu menghapus gambarnya. Ini kan kurang persuasif.</p>	<p>Sikap Media pada Militer Sangat membantu. Contohnya TVOne dari Jakarta. Kan ada yang bertugas di sana. Kita menghubungi Jakarta, dari TVOne ikut meliput juga. Dari korlap TVOnenya kita dikasi nomor telepon tim yang di Yogya. Cepat. Ada juga dari media online. Dia melihat ada kebakaran di tenda dapur lapangan, tapi karena kita sudah koordinasi dengan baik, jadi gak jadi diliput. Setelah kita bikin siaran pers sesuai keadaan di Yogya, tapi ada yang diambil beberapa kalimat, fotonya saja, yang dibuat salah si nggak atau di tambah-tambah, tapi dikurangi ada. Karena hanya diambil sedikit saja.</p>

	<p>Kalau ini diberitakan juga kita jadi susah. Jadi kami lakukan pendekatan persuasif dan mereka paham dan akhirnya tidak dimuat. Jadi mereka mendukung kita.</p> <p>Yang saya buat selama ini tidak ada yang dibesar-besarkan ataupun dibelokkan. Yang dikurangi ada karena kepentingan berita yang disorot media. Jadi secara luas tidak ada masalah, karena sejak pertama kali sudah saya tekankan kalau saya salah satu tugasnya adalah meluruskan berita yang tidak benar.</p>	
<b>Kesan negatif dan positif dengan media massa?</b>	<p>Kesan positifnya bahwa mereka mau bekerjasama dengan TNI. Pagi hingga malam, TNI lah yang bekerja, mereka tahu sendiri itu. Selama ini saya rasa tidak ada perselisihan yang terlalu menonjol karena kita selalu open, kita undang media kalau perlu. Selama satu bulan saya bekerja tidak ada kesan negatif.</p>	<p>Itu mungkin ke puspennya. Kita tidak langsung ke media. Wartawan juga nggak kami bawa jadi nggak ada yang ikut kecuali yang TVOne tadi sekali. Kesannya baik, karena kita minta dipublish dan mereka mau meliput live.</p>
<b>Bagaimana mengawal berita yang diterbitkan media massa?</b>	<p>Kualitas informasi tetap terjaga karena kita pantau terus dan kita kirim ke media terus kita kliping esok harinya. Kita cek. Kita buka internet, kita beli korannya. Jika ada yang dibelokkan kita langsung klarifikasi. Alhamdulillah tidak ada.</p>	<p>Kalau itu kita lebih pada hubungan baik Puspen dengan wartawan. Jadinya berita-berita yang dari Merapi itu gak ada yang dibesar-besarkan. Karena udah ada hubungan baik yang terjalin lama.</p>
<b>Saran atas peran Satgaspen TNI untuk kasus bencana nasional yang akan datang, khususnya terkait dengan hubungan militer-media</b>	<p>Kita itu penerangan tidak berdiri sendiri. Karena bencana ini berbeda dengan Darurat Militer di Aceh. Kita ini membantu pemda dan berada di bawah BNPB. Saya hanya satgaspennya TNI. Saran kedepan yang pertama, kita ini TNI harus terintegrasi dengan penerangan yang lain, baik PMI, BNPB, Rumah Sakit, terintegrasi kita seharusnya disana. Sebenarnya ini sudah difasilitasi di media center dan mereka juga punya yang lain. Dan pemberitaan ke depan, TNI punya versi sendiri, ini punya versi sendiri, seharusnya semua keluar dari satu pintu, yaitu humas BNPB. TNI memberitakan apa yang sudah dilakukan TNI. Ke depannya, itu masing-masing instansi</p>	<p>Kalau saran untuk satgaspen, personilnya agar ditambah. Itukan di Merapi ada beberapa kegiatan. Jadi ada beberapa yang terpaksa di pending karena kita satu tim meliput ke tempat lain. Kalau saran untuk hubungan media militer saya rasa lebih pada usaha menjaga hubungan baik dengan wartawan yang juga sudah sering meliput TNI. Kalau wartawan diperhatikan juga mereka akan lebih perhatian</p>

mempunyai visi penerangan yang sama. Tidak saling menonjolkan satu sama lain kalau terintegrasi kan.

Kedua, satgaspen kan anggotanya hanya lima, itu kan terlalu sedikit. Sementara bencana Merapi itu terjadi di empat wilayah. Yang timnya saja hanya tiga orang, yang dua harus melekat ke Dansatgas. Kadang saya pecah lima orang itu. Lain kalau saya punya empat tim, saya tempatkan di tiap kabupaten, inikan lebih efektif.

Media itu mempunyai agenda sendiri, langsung ke lapangan. Kita media itu selalu kita undang saat melaksanakan penyisiran seperti yang dilakukan Kopassus. Dan media ini sangat senang kalau diajak TNI karena bisa memasuki wilayah berbahaya. Jadi terjalin hubungan yang sangat erat. Kadang-kadang kita undang, kita informasikan siapa yang mau ikut. Kadang kita pinjami, misalnya masker. Misalnya naik ke lereng Merapi itu kan panas, jadi kita pinjami. Jadi hubungan dengan media sangat bagus.

Kalau ada berita dikurangi, selama tidak mengurangi substansi, informasinya tidak saya masalahkan. Dan selama ini juga tidak ada yang seperti itu.